

CERAI GUGAT PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)



TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Syariah/Hukum Islam pada Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2013/2014

Oleh:

DARLIANA

Nim: 80100212021

Promotor:

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.

Dr. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag.

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR
2013/2014**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darliana
NIM : 80100212021
Tempat/Tgl. Lahir : Watampone, 25 Oktober 1988
Jur/ Konsentrasi : Syariah/ Hukum Islam
Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jalan Manuruki XI Nomor 3 Makassar
Judul : Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Tahun 2010-2012)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, pelagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Makassar, 09 Juni 2014

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,

DARLIANA
NIM: 80100212021

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas segala nikmat dan karuniaNya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., sebagai suri teladan bagi manusia dalam kehidupan.

Tesis dengan judul: “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam/Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Segala upaya dilakukan dalam menyelesaikan tesis ini, namun pepatah bijak mengatakan “tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna” yang maha sempurna hanyalah Allah swt. Oleh karena itu, kekurangan dan keterbatasan yang ditemukan dalam tesis ini akan diperbaiki.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, maka sepatutnyalah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, moral maupun material. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan terutama ditujukan:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Abdul Qadir Gassing, HT., M.S., dan Para Wakil Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., yang telah memberikan kesempatan dengan segala fasilitas untuk menyelesaikan studi pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., sebagai Promotor dan Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag., sebagai Kopromotor yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, dan memotivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., dan Dr. H. Halim Talli, M.Ag., selaku dewan penguji yang telah memberikan motivasi, petunjuk dan bimbingan guna menyelesaikan tesis ini.
5. Para Guru Besar dan segenap Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan bimbingan ilmiahnya selama masa studi.
6. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta segenap stafnya yang telah menyiapkan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian tesis ini.
7. Para Staf Tata Usaha di lingkungan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi selama perkuliahan dan penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, para Hakim, Panitera, Sekretaris, pegawai dan staf di lingkungan Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone yang telah banyak membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan memberikan berbagai informasi penting yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini.
9. Penghargaan teristimewa dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda H. Jamaluddin dan ibunda Hj. Daming, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta pengorbanan dalam membimbing dan mendidik yang disertai dengan doa yang tulus.

10. Semua keluarga, khususnya Hj. Kasmi Jamaluddin, Hj. Ethy Jayanti Jamaluddin, dan Murni Jamaluddin, yang terus memberikan motivasi, doa, dan sumbangan pemikiran selama menempuh pendidikan pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

11. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran, dan kerjasama selama perkuliahan dan sahabat yang telah membantu hingga penyelesaian tesis ini, terkhusus kepada Ahmad Amiruddin, Sukmawati Basir, Dewi Adreani, Afif Firdaus, Etty Rachmawati dan A. yaqub.

Upaya maksimal telah dilakukan dan dengan lapang dada mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga Allah swt. senantiasa meridai semua amal ibadah yang ditunaikan dengan baik dan penuh kesungguhan serta keikhlasan karena Allah yang telah merahmati dan meridai alam semesta.



Makassar, 14 Juni 2014

Penyusun,

Darlina
NIM: 80100212021

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	19-91
A. Konsep dan Dasar Hukum Cerai Gugat	19
B. Hak Suami dan Istri dalam Cerai Gugat	36
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat	53
D. Dampak Cerai Gugat	65
E. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang	70
F. Kerangka Konseptual	88
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	92-104
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	92
B. Pendekatan Penelitian	94
C. Sumber Data	95
D. Metode Pengumpulan Data	97
E. Instrumen Penelitian	99
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	100
G. Pengujian Keabsahan Data	104

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA.....	105-173
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone	105
B. Faktor-Faktor yang menyebabkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone	122
C. Dampak dan Solusi Cerai Gugat terhadap Pihak-Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone	159
BAB V. PENUTUP.....	174-176
A. Kesimpulan	174
C. Implikasi Penelitian.....	175
DAFTAR PUSTAKA	177-182
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.....	107
Tabel 2	Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.....	107
Tabel 3	Daftar Jumlah, Hakim, panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pegawai/Staf dan Honorer.....	108
Tabel 4	Perkara yang Diterima Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2010.....	112
Tabel 5	Perkara yang Diputus Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2010.....	113
Tabel 6	Perkara yang Diterima Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2011.....	115
Tabel 7	Perkara yang Diputus Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2011.....	115
Tabel 8	Perkara yang Diterima Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2012.....	117
Tabel 9	Perkara yang Diputus Di Pengadilan Agama Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2012.....	118
Tabel 10	Data Peristiwa Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012.....	120
Tabel 11	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.....	125
Tabel 12	Faktor-faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone.....	155
Tabel 13	Dampak Cerai Gugat terhadap Pihak-Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Watampone.....	165

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekomendasi Izin Penelitian dari Kampus
2. Rekomendasi Izin Penelitian dari Litbang Provinsi Sulawesi Selatan
3. Rekomendasi Izin Penelitian dari Litbang Kabupaten Bone
4. Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Pengadilan Agama Watampone
5. Pedoman Wawancara
6. Surat Keterangan Wawancara
7. Foto Wawancara
8. Daftar Riwayat Hidup
9. Lampiran-lampiran



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sā	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zāl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zets
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fathḥah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> >	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i> >	i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*>

قِيلَ : *qita*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Ta>marbutḥ*

Transliterasi untuk *ta>marbutḥ* ada dua, yaitu: *ta>marbutḥ* yang hidup atau mendapat harakat *fathḥ*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>marbutḥ* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>marbutḥ* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>marbutḥ* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudḥ al-atfal*>

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-faḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydiḍ)*

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydid* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِينَا : *najjaina*>

الْحَقَّ : *al-h^qqq*

نَعْم : *nu^mima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>

Contoh:

عَلِي : 'Ali>(bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi>(bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilbab al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz}al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *mudhaf* ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينَ *billah* *dinullah*

Adapun *ta>marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz* *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma *Muhammadun* illa *rasul*

Inna awwala baitin wud*u*'a linnasi lallaz*i* bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadh*an* al-laz*i* anzila fi*h* al-Qur'*an*

Nas*i* al-Din al-T*usi*

Abu Nas*i* al-Farabi

Al-Gazali>

Al-Munqiz\min al-Dāla>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu>al-Walid Muhāmmad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>al-Walid Muhāmmad (bukan: Rusyd, Abu>al-Walid Muhāmmad Ibnu)
Nasī Hamid Abu>Zaid, ditulis menjadi: Abu>Zaid, Nasī Hamid (bukan: Zaid, Nasī Hamid Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānu wa ta'āla></i>
saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Alī 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Darliana

NIM : 80100212021

Judul : Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)

Tesis ini mengkaji tentang “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, dan untuk mengeksplorasi dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara/interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Setelah dianalisis terhadap data yang diperoleh, hasilnya menunjukkan bahwa cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peristiwa cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan cerai talak dengan alasan bahwa pihak istri lebih menyadari akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan. Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama yaitu faktor moral, Menyakiti, kawin di bawah umur, perselisihan terus menerus, cacat biologis dan tidak ada keharmonisan, faktor-faktor ini di dukung dengan kondisi “ketidak mampuan” dan “ketidakmauan” dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan sehingga terjadi pelanggaran terhadap satu pihak. Cerai gugat berdampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya. Dampak tersebut antara lain secara psikologis berpengaruh kepada anak dan istri karena berakibat terhadap kejiwaan dan mentalnya, secara sosial berdampak terhadap suami dan istri karena memiliki predikat status janda dan duda, secara ekonomis berpengaruh terhadap keuangan istri yang selama perkawinan ditanggung sang suami. Sedangkan solusinya mengenai hak asuh anak diberikan kepada istri selama anak tersebut belum mumayyiz dan harta bersama selama perkawinan harus dibagi dua secara adil dan merata.

Implikasi dari penelitian ini adalah akhir-akhir ini kecenderungan perempuan untuk mengajukan cerai lebih tinggi dibandingkan dengan pihak laki-laki. Oleh karena itu dicarikan solusi melalui ijtihad ulang dalam masalah-masalah hak perempuan yang sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadist dan sumber lain yang berupa Undang-undang, yang kiranya dapat ditemukan suasana baru dalam kedamaian berumah tangga yang bahagia lahir dan batin di dunia dan akhirat kelak. hendaknya suami istri lebih meningkatkan pengetahuan agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga terutama anak, hakim yang senantiasa memutus perkara memaksimalkan lembaga arbitrase agar pekerjaan halal yang di benci Allah tersebut dapat dikurangi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lain, demikian pula interaksi sosial dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi yang besar seperti negara maupun organisasi terkecil seperti keluarga dalam rumah tangga. Setiap makhluk hidup akan berusaha untuk tetap hidup dan menginginkan terjadinya regenerasi. Atas dasar itulah, terjadi perkawinan. Perkawinan dalam syariat Islam adalah sesuatu yang sangat sakral dan suci. Islam memberikan legalitas hubungan antara dua insan yang berlainan jenis melalui proses akad nikah yang disebut ijab kabul.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaaan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994), h. 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 40.

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan untuk tetap mempertahankan keluarga yang telah terbina. Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah, serta perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan, maka perceraian³ boleh dilakukan. Islam berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan itu tidak dapat dipisahkan lagi seperti ajaran dalam agama yang lain.⁴

Islam memahami dan menyadari hal tersebut, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan cerai gugat demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukan kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Bahkan akibat kemampuan ekonomi yang terus meningkat di kalangan kaum hawa, turut mempengaruhi tingginya gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang

³Perceraian adalah putus hubungan suami istri, disebut juga dengan talak yaitu perceraian dalam hukum Islam antara suami istri yang telah dijatuhkan oleh suami. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 163.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 15.

umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka cerai gugat setiap tahunnya.

Pada dasarnya terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang memengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan bagi istri, untuk mengajukan cerai gugat terhadap suaminya, baik itu faktor ekstern dalam rumah tangganya maupun faktor intern.

Perceraian masih banyak terjadi dalam kondisi masyarakat dewasa ini karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan di bawah payung hukum Indonesia dan hukum Islam yang telah diformalkan (Kompilasi Hukum Islam) yang diakibatkan oleh perilaku suami atau istri. Karenanya proses beracara yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas, tanpa menimbulkan akibat hukum yang panjang di kemudian hari.

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai. Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan cerai gugat. Cerai gugat merupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syara.⁵ Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Jika suami-istri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya, sehingga istri membencinya dan tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang

⁵Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), h. 14.

pernah diberikan oleh suami kepadanya dengan maksud agar suami menceraikannya. Tidak ada dosa bagi istri yang memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak berdosa menerima tebusan dari istrinya.⁶ Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS al-Baqarah/2 : 229

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁷

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian. Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga.⁸

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazabib al-Khamsah* penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf (Jakarta: Lentera, 2000), h. 462.

⁷Kementerian Agama RI, *al-Qu'ran dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil Cipta Media, 2010), h. 36.

⁸Hammudah Abd al-Ati, *The Family Stucture in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim" (Cet. I; Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 286.

Untuk menilai sebuah faktor atau alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum Islam ialah dengan menemukan jawaban apakah salah satu atau kedua belah pihak "tidak mau" lagi hidup bersama menjalani ikatan suami istri tersebut. Kondisi ini disebut dalam Islam dengan istilah *syiqaq* atau perceraian psikologis, yang ditandai dengan telah terjadinya sikap nusyuz atau sikap "tidak mau" menjalankan kewajibannya.⁹

Kasus cerai gugat, pasangan suami istri (RS-YM) yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Watampone. Pasangan tersebut belum dikaruniai seorang anak, karena selama ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Masa perkawinannya berlangsung kurang lebih 4 bulan. Menurut keterangan pihak istri, selama membina rumah tangga, hidup kedua belah pihak tidak pernah harmonis, selalu diliputi percekcoan, dan perselisihan berkepanjangan. Istri tidak pernah merasakan kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang demikian, bahkan penderitaan yang dialami dipendam menjadi derita batin.

Pemicu utama ketidakharmonisan dan penderitaan batin istri disebabkan karena suami tidak mampu membahagiakan istrinya baik lahir maupun batin, suami pencemburu terhadap istri, juga suami mengalami kelainan jiwa bahkan terkadang suami menyiksa istri di tempat tidur. Hal inilah yang membuat istri menderita batin yang berkepanjangan. Masalah dalam rumah tangga pasangan tersebut berjalan berlarut-larut tanpa ada upaya penyelesaian, pada puncaknya hubungan suami istri tidak dapat lagi dipertahankan sehingga terjadilah perceraian dengan talak *raj'i*.¹⁰

Kondisi suami dalam kasus itu yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki/impoten, tidak termasuk dalam kategori jenis *nusyuz*, karena ia

⁹Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Cet. I; Depok: Elsas, 2010), h. 201.

¹⁰Kasus ini dapat dilihat pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Putusan Nomor 0195/Pdt G/2011/PA.Wtp.

bukan merupakan pelanggaran atau pembangkangan atas kewajiban suami (*nusyuz*).¹¹ Namun demikian, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa dalam hal penyakit impoten, meski telah terbukti secara medis, hakim tidak boleh langsung menjatuhkan putusan cerai ketika salah satu pasangan/pihak yang dirugikan mengajukan permohonan/gugatan untuk bercerai. Pengadilan dalam hal ini memberikan waktu selama satu tahun (terhitung sejak perkaranya diajukan ke pengadilan), karena penyakit impoten ada yang bisa diobati. Jika dalam satu tahun penyakit yang diderita belum bisa disembuhkan, maka hakim boleh menceraikan pasangan suami istri tersebut.¹² Hal ini juga berlaku pada cacat/penyakit lainnya yang tidak bisa diobati.¹³

Keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita dalam hal pengajuan cerai mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam. Suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak kepada istri. Demikian juga istri berhak pula meminta cerai dari suami atau melalui pengadilan karena ada sebab yang membolehkan cerai.

Di samping sang suami dapat menggunakan hak talaknya untuk menceraikan istrinya, di Indonesia tidak sedikit istri telah mempergunakan haknya untuk memperoleh cerai dari suaminya melalui lembaga *taklik talak* di depan Pengadilan Agama.¹⁴

¹¹Sebuah rubrik konsultasi seksologi dengan Wimpie Pangkahila di tabloid Gaya Hidup Sehat. Diceritakan sebuah kasus ketidakmampuan pasangan (suami) melakukan hubungan seksual disebabkan oleh faktor kejiwaan (stress) yang justru disebabkan oleh karena pasangannya sendiri, yang dicurigainnya selingkuh dengan pihak ketiga. Dikutip oleh ER, Penis Loyo akibat Curiga Istri Selingkuh, Kompas. Com, Rabu 4 Juni 2008, dalam Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 223

¹²Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 224.

¹³Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 136.

¹⁴M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 31.

Pengadilan Agama Watampone sebagai tempat dilakukannya penelitian, sebagaimana Pengadilan Agama yang lain merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian, termasuk di dalamnya perkara cerai gugat yang menduduki ranking tertinggi di Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan.

Pengadilan Agama merupakan instansi yang menangani perkara bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam di wilayah hukum Kota Watampone. Setiap tahun, perkara cerai gugat (permohonan cerai yang diajukan Istri) di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone selalu mendominasi perkara cerai talak (permohonan cerai yang diajukan suami). Pada tahun 2010 berjumlah 196 perkara dari pihak laki-laki dan 649 perkara yang diajukan dari pihak istri. pada tahun 2011, 800 wanita mengajukan perkara, sedangkan pihak laki-laki berjumlah 280 yang mengajukan perkara cerai. Sedangkan pada tahun 2012, 906 perempuan mengajukan perkara cerai gugat dan dari pihak laki-laki berjumlah 323 yang mengajukan perkara cerai. Dari tahun ke tahun jumlah perkara cerai gugat lebih besar jumlahnya di bandingkan dengan perkara cerai talak.¹⁵

Berawal dari fenomena tersebut, penelitian tesis ini berusaha mengetahui secara tepat faktor yang mendorong terjadinya kasus cerai gugat seorang istri ingin menceraikan suaminya yang ada di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap fokus pembahasan dalam penelitian tesis ini, serta menghindari kesalahpahaman (*mis-understanding*) terhadap

¹⁵Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada Tahun 2012.

ruang lingkup penelitian yang dilakukan, maka yang perlu dikemukakan batasan pengertian terhadap beberapa variabel yang tercakup dalam judul tesis. Hal ini perlu dilakukan agar penelitian dapat terfokus pada objek kajian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Cerai gugat adalah istri yang mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai sebab/alasan tertentu. Dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi pihak laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak eksklusif untuk menceraikan istrinya. Berbeda halnya bila suami yang berinisiatif menceraikan istrinya, maka secara hukum disebut cerai talak. Kedua istilah (cerai talak dan cerai gugat) terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Jadi yang dimaksud dengan “cerai gugat” dalam penelitian ini adalah istri atau yang mewakilinya mengajukan gugatan cerai terhadap pihak suami ke Pengadilan Agama setempat.

Hukum Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hukum Islam yang bersifat dinamis, responsif dan merupakan hasil pemikiran ulama di Indonesia yang berdimensi *insaniyyah*. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia yang sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci, sehingga dimensi ini menjadikan hukum Islam lebih dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan pendekatan Ijtihad atau pada tingkat teknis disebut *istinbat al-ahkam*. Dalam dimensi terminologi hukum Islam di Indonesia lebih dimaknai sebagai hasil pikiran hukum dalam bidang fikih, fatwa-fatwa ulama, jurisprodensi (putusan Pengadilan) dan produk Undang-Undang.

Pelembagaan dan Pemberlakuan dimaksudkan penyerapan hukum atau integrasi hukum dalam produk Undang-Undang sebagai sebuah legislasi dalam suatu

sistem hukum nasional yang mengikat berlaku bagi seluruh umat Islam, yang implementasinya sebagai kerangka pondasi awal dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, cikal bakal penggunaan terminologi hukum Islam dalam tatanan hukum nasional di Indonesia.

Dalam batasan operasional penelitian ini, cerai gugat perspektif perundang-undangan di Indonesia dipahami sebagai inisiatif istri yang mengajukan gugatan terhadap suami harus betul-betul didasarkan pada sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri.

2. Deskripsi Fokus

Permasalahan ini muncul berkaitan dengan adanya kesenjangan dalam penyelesaian kasus cerai gugat perspektif perundang-undangan di Indonesia yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada tahun 2010-2012. Oleh karena itu penelitian hanya dibatasi pada permasalahan yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Matriks Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan karena ketidakmampuan terbagi atas dua yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Internal 2. Faktor eksternal - Alasan karena ketidakmauan/perceraian psikologis (Syikak) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suami tidak menjaga, melindungi dan membela 2. Suami tidak mengatur dan memelihara 3. Suami tidak memberi perhatian dan pembinaan 4. Suami tidak memberi nafkah lahir

	dan batin
Dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya. dampak tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. secara psikologis 2. secara moral 3. secara sosial 4. secara ekonomis atau finansial - Memiliki dampak bagi para hakim atau majelis hakim yang berkewajiban mendapatkan dan menegakkan kebenaran materil melalui produk keputusannya. - Solusi cerai gugat boleh selama dilandasi dengan alasan-alasan yang dibenarkan agama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, pokok permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana cerai gugat perspektif perundang-undangan di Indonesia studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada tahun 2010-2012 ? Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone?
2. Bagaimana dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan pada peneliti sebelumnya maupun terhadap buku-buku yang

diterbitkan, ditemukan berbagai hasil penelitian dan buku yang relevan dengan pembahasan tesis ini.

Nur Taufiq Sanusi dalam bukunya *“Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmonis”* lebih cenderung menjelaskan mata rantai perkawinan dan perceraian secara umum, yang dimulai dari penyatuan antara dua insan melalui perkawinan psikologis, lalu perkawinan yuridis kemudian berlanjut ke perkawinan sosiologis, begitupun dengan proses perceraian harus melalui ketiga tahapan itu.¹⁶ Berbeda dengan penelitian ini akan menjelaskan dampak dan solusi terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

Abdul Aziz Dahlan dalam karyanya *“Ensiklopedi Hukum Islam, Buku V”* tulisan ini mencoba menguraikan bahwa Islam menentukan orang yang berhak menjatuhkan talak itu adalah suami karena bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga, baik yang berkaitan dengan masalah nafkah, tempat tinggal dan menanggung seluruh persoalan rumah tangga.¹⁷ Hukum Islam di Indonesia, menentukan bahwa hak untuk bercerai bukan hak monopoli kaum laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, amandemen Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, kemudian amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, sehingga spesifikasi penelitian ini mengangkat berbagai kasus cerai gugat yang dilakukan oleh istri.

¹⁶Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 190.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Buku V* (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1778.

Sementara itu, Hammudah Abd al-Ati menulis sebuah buku dengan judul *“The Family Structure in Islam”* Salah satu sub pembahasan dalam buku ini adalah kasus perceraian, yang dikelompokkan dalam empat bagian, hak pria untuk bercerai, hak wanita untuk bercerai, perceraian berdasarkan persetujuan bersama dan perceraian melalui proses pengadilan.¹⁸ Dari empat bagian tersebut, menunjukkan bahwa hak untuk bercerai bukan hak semata-mata kaum laki-laki tetapi kaum perempuan juga memiliki hak yang sama bila kedua suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Letak perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus kajian terhadap beberapa hal yang mendorong istri untuk melakukan cerai gugat.

Muhammad Jawad Mughniyah juga mengungkapkan dalam karyanya yang berjudul *“al-Fiqh ‘ala al-mazahib al-khamsah”* dalam buku ini dijelaskan siapakah yang menjatuhkan talak itu laki-laki atau perempuan ? menurut Imam Malik (93-179H), Imam Syafi’I (150-204H), dan Imam Hambali (164-241H), bahwa yang menjatuhkan talak adalah laki-laki. Menurut Imam Hanafi (90-150H), yang menjatuhkan talak adalah perempuan. Buku ini tidak menjelaskan kebolehan istri melakukan gugatan cerai terhadap suami. Hal ini yang menjadi fokus penelitian dalam tesis ini.¹⁹

Metode perceraian yang umum berlaku dalam ikatan perkawinan orang Islam di Indonesia adalah melalui institusi talak, dimana suami dapat menceraikan istrinya sesudah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk mengkonsiliasikan pasangan suami istri tersebut tidak

¹⁸Hammudah Abd al-Ati, *The Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul *“Keluarga Muslim”*, h. 306-309.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah* penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, h. 446.

menemui hasil yang memuaskan. Namun begitu, cara lain untuk mengakhiri kehidupan perkawinan bukannya tidak umum untuk dilakukan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 disebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat dilepaskan melalui satu dari tiga cara: karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.²⁰ Oleh karena itu dalam hukum Islam ada dua cara untuk mengakhiri perkawinan lewat campur tangan pengadilan, yaitu melalui proses khuluk yaitu istri setuju untuk mengembalikan mahar kepada suaminya sebagai imbalan dari kemerdekaan yang bakal diperoleh, atau melalui perceraian yang diisyaratkan secara umum dikenal dengan istilah taklik talak,²¹ yang berasal dari istilah Arab *ta'lik talak*.²²

Walaupun eksistensi taklik talak dalam hukum Indonesia sering menjadi topik perdebatan di antara para ahli.²³ Beberapa para ahli masih dipengaruhi oleh sifat pro dan kontra dari argumen-argumen yang diajukan oleh para ahli hukum Islam mengenai hal ini. Sebagian besar dari para ahli setuju bahwa lembaga taklik talak ini merupakan sarana yang sangat efektif

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *The Indonesia Marriage Law* (Jakarta: Biro Konsultasi Perkawinan, 1988). Lihat juga, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal 113 dan 114 yang memberikan peraturan yang sama. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (tc; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993/1994), h. 56.

²¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1998), h. 78.

²² Untuk selanjutnya, istilah Arab *Ta'liq talaq* dibedakan dengan istilah dalam bahasa Indonesia taklik talak. Istilah yang pertama mengindikasikan hukum Islam dalam esensinya, sementara pengaruh adat dapat diindikasikan pada lembaga taklik talak.

²³ Mahmoud Syaltut, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan Ismuha (tc. Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 218-219.

untuk memberikan perlindungan bagi istri dari sikap semena-mena pihak suami.

Menurut M. Djamil Latief, dalam bukunya, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang dalam hal perceraian. Perempuan berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, jika suami telah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum, misalnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, pemabuk dan lain-lain.²⁴

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya dalam pasal 73 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi: tempat kediaman, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.²⁵

Aturan tersebut memberi ruang dan inisiatif pihak istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat melalui proses peradilan. Ada dua hal dalam pasal 73 ayat (1) yaitu, gugatan cerai istri dan dominasi Pengadilan Agama dalam kasus perceraian. Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, bahwa aturan-aturan perceraian yang terdapat di dalam perundang-undangan di

²⁴M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, h. 47.

²⁵Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h. 78.

Indonesia masih mengandung beberapa persoalan mendasar.²⁶ Penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan seorang istri mengajukan gugatan perceraian terhadap suami.

Persoalan yang krusial antara lain posisi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkawinan. Ada empat masalah yang dapat didiskusikan. *Pertama*, perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri. Dalam hal ini dengan cara mengucapkan ikrar talak oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberikan keterangan tentang telah terjadinya perceraian. *Kedua*, perceraian dengan penyaksian pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. *Ketiga*, secara implisit bisa dikatakan bahwa perceraian dinyatakan sah bila dilakukan setelah ada izin dari pengadilan. *Keempat*, perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan oleh suami di depan sidang pengadilan tersebut.²⁷

Sedangkan menurut Tabir al-Haddad dalam bukunya *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, bahwa setidaknya ada beberapa alasan pentingnya ikrar talak di depan pengadilan, yaitu:

1. Kehadiran pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan pihak-pihak yang akan bercerai disesuaikan dengan tuntunan syariat Islam. Dalam kasus cerai talak, seorang suami sebelum menjatuhkan cerai harus berpikir ulang dan memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga suami menjadi lebih hati-hati dan bertindak rasional.

²⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004), h. 235.

²⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 236.

2. Merupakan lembaga kekuatan dengan melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak cerai agar dilakukan secara prosedural dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan berfungsi sebagai al-hukm seperti yang dianjurkan syariat Islam.
4. Hakim pengadilan diharapkan dapat berfungsi sebagai pembina kerukunan rumah tangga dan berperan menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya ganti rugi dalam cerai dan mut'ah.²⁸

Selanjutnya Ahmad Mujahidin juga menulis sebuah buku *“Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia”* buku tersebut lebih cenderung mengemukakan teknis mengajukan gugatan yang dilakukan pihak istri terhadap suami, prosedur mengajukan gugatan perdata, macam-macam gugatan (tertulis dan lisan) dan hal-hal yang terjadi dalam mengajukan gugatan perdata, yakni penggabungan, perubahan, dan pencabutan gugatan.²⁹

Demikian pula buku yang berjudul *“Hukum Acara Peradilan Agama”* karangan Roihan A. Rasyidi, buku ini mengupas lebih luas tentang gugatan, dan cara-cara mengajukan gugatan, bentuk dan isi gugatan, kelengkapan dan syarat gugatan, akan tetapi uraiannya lebih merupakan uraian umum seputar teknik beracara di Peradilan Agama.³⁰

²⁸Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 87.

²⁹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h. 137-147.

³⁰Roihan A. Rasyidi, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 47-55.

Sedangkan untuk menelusuri aspek legalitas suatu perkara perceraian, penulis merujuk beberapa Undang-Undang yang berkaitan langsung dengan materi pokok penelitian ini antara lain: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alimuddin,³¹ Mahasiswa Pascasarjana Universitas Alauddin Makassar, dengan judul: “Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat”(Studi Kasus Tahun 2007-2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng). Dalam tesis ini diterangkan bahwa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Watansoppeng mengalami peningkatan setiap tahun dan tingginya angka kasus tersebut disebabkan beberapa faktor, dan yang paling dominan adalah tak ada tanggung jawab suami, ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta krisis ekonomi. Sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis adalah cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor penyebab isrti mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang harus dilandasi oleh alasan-alasan yang sangat urgen dan juga memiliki dasar hukum yang dibenarkan oleh agama.

Berdasarkan beberapa tulisan tersebut, tentu masih banyak lagi tulisan yang lainnya. Namun uraian tersebut hanya sebagai survei awal untuk membuktikan bahwa permasalahan tersebut valid untuk dibahas sebagai karya ilmiah yang tidak hanya menarik namun juga memberi muatan kontribusi yang mendesak bagi para pengembangan ilmu hukum Islam.

³¹Alimuddin, “Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007-2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng)”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2011)

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yaitu untuk mengungkapkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone perspektif perundang-undangan di Indonesia. Tujuan khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.
- b. Untuk mengeksplorasi dampak dan solusi cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

2. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu kegunaan, baik kegunaan teoritis/ilmiah maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Dari segi kegunaan ilmiah, penelitian ini dapat menjadi kerangka dasar pemikiran dan wacana baru dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum Islam.
- b. Dari segi kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi praktisi hukum Islam, para pegawai Pengadilan Agama Watampone, pemerintah serta masyarakat Islam pada umumnya yang memiliki perhatian terhadap hukum Islam untuk dijadikan acuan dasar.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan solusi terhadap berbagai problematika hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORIETIS

A. Konsep dan Dasar Hukum Cerai Gugat

1. Konsep Cerai Gugat

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu,¹ mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan (putus hubungan perkawinan) dengan perkataan lain terjadi perceraian antara suami istri.

Kata perceraian dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata cerai yang artinya pisah. Pengertian kedua diartikan sebagai putusnya hubungan suami istri. Selain kedua definisi tersebut cerai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna lain terhadap cerai talak yaitu hidup berpisah antara suami istri selagi keduanya masih hidup, selanjutnya cerai mati diartikan sebagai perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal dunia.²

Cerai dalam bahasa arab berasal dari kata - يطلق - طلق - طلاقا, *tathlaqan Tḥlaqa, yatḥiqu*, yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali perkawinan.³

¹Misalnya Khuluk, Zhihar, Ila', Lian, Talak, Syiqaq, Fasakh, Taklik Talak, dan karena kematian. Lihat Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh Jilid III* (Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAN Jakarta, 1984), h. 251.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 278.

³Syaerifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2* (Cet. I; Jakarta: Berkah Utami, 2010), h. 37.

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, kata talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau meninggalkan suatu ikatan.⁴

Jadi secara harfiah talak berarti lepas, bebas atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah syarak, para ulama berbeda mengemukakan rumusan atas definisi talak namun esensinya sama. al-Syaukaniy mengatakan bahwa talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, berasal dari kata ithlaq, yakni melepaskan dan meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melepaskan tali ikatan perkawinan.⁵

Sayyid Sabiq juga mendefinisikan talak sebagai berikut:

حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya :

”Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”⁶

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Abdu Rahman al-Jaziri, talak menurut bahasa adalah melepaskan tali ikatan antara suami istri, sedangkan menurut istilah syara' adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.⁷

Adapun yang dimaksud dengan menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkat ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Hal ini terjadi pada talak *bain*, sedangkan yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak

⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1776.

⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Nailul Authar Juz VII* (t.c; Beirut: Dar al-Jil, 1973), h. 3.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah* (Beirut: Dar-al-Fikr, 1983), h. 206.

⁷ Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia buku 2*, h. 38 yang dikutip langsung dalam buku Abd. Al-Rahman Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu'ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV*, (Misja: al-Maktab al-Tijariyahal Kubra, 1969), h. 278.

talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁸

Konteks definisi cerai sebagaimana dikemukakan oleh para ulama fikih bermacam-macam, diantaranya menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, bahwa cerai itu adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan menggunakan lafal khusus. Ungkapan langsung berlaku ketika lafal cerai selesai diucapkan tanpa terkait dengan syarat atau masa yang akan datang. Misalnya, dalam kasus cerai *bain Kubra* (cerai yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya), hukum dan segala akibatnya berlaku secara langsung, seperti suami tidak berhak rujuk dengan istrinya sebelum istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai kembali atau suami wanita itu meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan “untuk masa yang akan datang” adalah hukum cerai itu belum berlaku secara seluruhnya tetapi tertunda oleh sesuatu hal. Misalnya yang disebut cerai *raj'i* (talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah dicampuri). Dari segi lafal cerai, hubungan suami istri telah terhenti tetapi ada implikasi hukum lain yang tertunda berlakunya hingga masa iddah wanita itu habis.⁹

Pengertian yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i mengatakan cerai itu adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Definisi cerai ini mengandung arti bahwa hukum cerai itu berlaku secara langsung

⁸Talak *Raj'i* yaitu suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang dijatuhkan bukan ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 17.

⁹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1776.

baik dalam cerai *raj'i* maupun cerai *ba'in*¹⁰. *Ketiga*, definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki yang mengatakan bahwa cerai adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.¹¹

Perceraian dalam hukum Islam halal tetapi dimurkai oleh Allah, Islam menghendaki dan memerintahkan terwujudnya ikatan perkawinan yang langgeng dalam suasana *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Bila ditinjau dari segi *ahkam al-khamrah*, perceraian jatuh pada kategori halal, tetapi perbuatan itu dibenci oleh Allah.¹²

Islam memiliki konsep tentang perceraian. Perceraian dalam Islam berada dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syariat yaitu antara perintah dan larangan. Jika memang upaya damai kedua belah pihak sebab tidak bisa lagi tercapai, maka perceraian itu merupakan hal yang wajib. Penerapan hukum wajib tersebut berdasarkan kaidah usul fikih *al-Hukmu Yaduru Ma'a Illatihi Wajudan Wa 'Adaman* bahwa hukum itu mengikuti Illatnya. Misalnya jika istri murkah, meskipun dilarang bercerai selama istri masih menstruasi atau antara kedua suami istri baru saja bersenggama. Islam melarang perceraian tanpa ada alasan yang kuat, sebab hal itu merupakan bentuk kejahatan. Islam melarang setiap orang melakukan kejahatan serta menyakiti orang lain. Perceraian dibenarkan oleh hukum jika ada alasan yang benar. Misalnya lantaran tujuan perkawinan terjadi gagal diwujudkan kedua belah pihak.¹³

Secara umum hukum Islam membuka terjadinya perceraian sebagai solusi terhadap kemelut rumah tangga dan merupakan pilihan terakhir mencapai krisis

¹⁰Talak *ba'in* adalah talak tiga kalinya, sebelum istrinya dikumpul, dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 179.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1771.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 67.

¹³Abu Muhammad 'Izzuddin 'Abdul Aziz bin 'Abdissalam As Salmi al Damsyiqi, *Al mulqab bi al Sultan al 'Ulama Qawa'id al Ahkam Fi Mashalih al Anam 'Alaqa Alaih Thaba 'Abdul Rauf Said* (Misja: Dar-Umn al-Qura>1991), h. 237.

keluarga yang gagal diwujudkan melalui proses perdamaian kedua belah pihak. Membiarkan kehidupan suami istri yang sudah tak mungkin didamaikan lagi, maka sewajarnya permasalahannya diserahkan kepada ahli, yakni Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memberi penjelasan yang sebaik-baiknya akan kegagalan perkawinan tersebut.

Menurut Hammudah Abd al-Ati bahwa perceraian bukanlah merupakan perbuatan perdata dan bukan pula pada perjanjian suci tetapi sintesis antara keduanya. Perceraian diperbolehkan tetapi bukan tanpa aturan dan mekanisme antara satu dengan yang lainnya. Sebaliknya juga bukan tidak bisa diputuskan seperti sebuah perjanjian suci. Islam merupakan agama yang mempunyai karakter di tengah-tengah, mengandung tujuan keseimbangan.¹⁴

Jadi, prinsipnya perceraian itu halal, meskipun tidak diharuskan atau tidak disukai. Beberapa mazhab mempunyai pendapat dan penilaian yang berbeda tentang praktik perceraian, di antaranya bahwa perceraian itu merupakan perangkat hukum dalam mekanisme disiplin dan kasih sayang. Perangkat itu mempunyai arti serta merupakan akibat yang pasti dari kebebasan laki-laki dan perempuan dalam menentukan pilihan atau pasangannya. Ada pula ulama mengecam praktik perceraian.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian itu adalah tindakan hukum, yakni terjadinya perpisahan antara suami istri setelah diikat dengan perkawinan yang sah, dan perpisahan itu merupakan jalan terakhir setelah semua cara dilakukan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga.

Pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum Islam khusus pada pasal 132 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada

¹⁴Hammudah Abd Al-Ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib dengan judul “*Keluarga Muslim*” (Cet. I: Surabaya: Bina Ilmu, 1984), h. 286.

¹⁵Abdullah Zaki, *Fiqh Empat Mazhab* (Cet. II; Bandung: Haryini, 2004), h. 372-373

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.¹⁶

Sedangkan cerai gugat maksudnya istri mengambil inisiatif untuk melakukan perceraian terhadap suaminya dengan berbagai alasan tertentu. Dalam literatur fikih klasik, lebih banyak memberi ruang bagi laki-laki diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak yang eksklusif untuk menceraikan istrinya.¹⁷ Bila suami yang akan menceraikan istrinya secara hukum disebut cerai talak. Istilah cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.¹⁸ Jadi yang dimaksudkan dengan cerai gugat dalam penelitian ini, adalah istri atau yang mewakilnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama setempat.

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Terdapat di dalam al-Qur'an dan beberapa hadis Rasulullah saw, petunjuk mengenai masalah perceraian yang sering dijadikan sebagai landasan baik cerai talak maupun cerai gugat. Menurut ulama fikih, ayat-ayat al-Qur'an mengenai perceraian merupakan ayat terperinci. Di antara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya melakukan perceraian adalah firman Allah swt, dalam QS al-Baqarah/2 : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ

¹⁶ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 51

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1778

¹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, h. 78

اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدْتِ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.¹⁹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perceraian yang dapat dirujuk kembali untuk dua kali. Maksudnya seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang digunakan ayat itu adalah "dua kali" bukan dua perceraian. Hal ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada interval waktu antara perceraian yang pertama dan yang kedua. Interval waktu itu untuk memberi kesempatan kepada suami dan istri melakukan perenungan sikap dari tindakan masing-masing. Hal ini tidak dapat terlaksana bila perceraian itu langsung jatuh dua atau tiga kali, dengan sekedar mengucapkan kata cerai dalam satu tempat dan waktu yang sama.²⁰

Prinsip tersebut telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad saw, dan khalifah pertama Abu Bakar al-Siddiq r.a. tetapi pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a. mengambil kebijakan lain mengenai perceraian ini, Umar menetapkan bahwa perceraian yang jatuh dua kali atau tiga kali sesuai ucapan, waktu dalam sekali waktu atau sekali ucap. Hal ini berarti Umar menempuh dengan maksud

¹⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 460.

memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu dengan mudah mengucapkan kata cerai. Umar berharap, dengan kebijakan ini para suami berhati-hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan tersebut tidak tercapai atau ada kesempatan untuk melakukan perenungan, berusaha memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, walaupun pendapat Umar tersebut didukung oleh beberapa fuqaha berikutnya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, dan Abu Hanifah, namun banyak ulama dan pemikir Islam sesudah ulama mengkritisi pendapat tersebut bahkan cenderung menolaknya, karena dewasa ini kecenderungan untuk mempersempit kesempatan praktik perceraian semakin besar. Hal ini ditempuh dengan jalan menempatkan syarat-syarat jatuhnya perceraian, seperti keharusan adanya saksi, atau perceraian harus dilakukan melalui proses pengadilan.²¹

Selain ayat tersebut yang dijadikan dasar hukum praktik perceraian, juga dalam al-Qur'an ditemukan satu surah secara khusus membicarakan masalah perceraian yakni surah at-Talaaq/65. Dalam surah ini diterangkan hukum-hukum mengenai perceraian, Iddah dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam masa talak dan Iddah, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan baik.

Firman Allah swt. dalam QS at-Talaaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ تَحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang

²¹Hammudah Abd Al-Ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib dengan judul "Keluarga Muslim," h. 287.

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²²

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang mukmin agar dalam melakukan perceraian hendaknya istri dalam keadaan suci yang dipertimbangkan dari masa iddah yaitu masa suci. Suami tidak diperbolehkan menceraikan istrinya dalam keadaan haid, sebab masa haid itu termasuk *quru'* yang diperhitungkan. Pada ayat ini juga Allah memerintahkan untuk menentukan iddah dan menjaganya.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, bahwa ayat itu memerintahkan kepada umat Islam jika hendaknya menceraikan istrinya hendaklah pada waktu yang diperhitungkan dari iddah, yaitu masa suci yang tidak didekati, sehingga tidak akan memperlama masa iddah. Jika istri diceraikan pada masa haid, maka perceraian itu bi'dah dan haram. Maksud istri dalam ayat tersebut adalah istri yang telah dicampuri yang mempunyai *quru'*. Adapun istri yang belum pernah dicampuri maka tidak ada iddah baginya.²³

Berdasarkan ayat 1 surah at-Thalaq/65 yang disebutkan para ulama membagi perceraian ke dalam tiga macam, yaitu (1) perceraian sunah yaitu ketika istri diceraikan dalam keadaan suci tanpa didekati atau dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya, (2) perceraian *bid'ah* yaitu jika istri diceraikan pada waktu haid atau pada waktu suci tetapi telah dicampuri, sehingga diketahui apakah istri hamil atau tidak. Intinya bahwa dengan perceraian itu suami telah memperpanjang masa iddahnya, sebab haid itu tidak diperhitungkan di dalam iddah. Demikian pula masa

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558

²³Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Jus 28 terj. Bahrin Abubakar, dengan judul "*Tafsir Maraghi*" (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1987), h. 218

suci yang sesudahnya, sebab iddah itu melalui tiga masa haid secara penuh. (3) perceraian yang bukan sunah dan bukan pula bid'ah, yaitu perceraian dilakukan terhadap istri yang masih kanak-kanak dan tidak haid serta tidak pernah dicampuri.²⁴

Hadis yang dijadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Ibn Umar, Rasulullah saw bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ²⁵

Artinya :

”Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah azza wajallah adalah talak” (HR. Abu Daud).

Hadis itu menjadi dalil bahwa di antara halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan oleh perbuatan perceraian. Melakukan perceraian tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dasar hukum bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari praktik perceraian selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan perceraian jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan perceraian itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

Dalam konteks yuridis formal, masalah perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan *seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa ”Perkawinan menurut hukum Islam

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* Juz 28 terj. Bahrn Abubakar, dengan judul ”*Tafsir Maraghi*”, h. 219.

²⁵ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud Juz I (Bairut: Dar Fikr, t. th), h. 661.

adalah akad yang sangat kuat atau *ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶ Namun dalam realitanya seringkali perkawinan itu kandas dan putus di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

Perkawinan dapat diputus karena :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan²⁷

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak suami istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang memberikan aturan yang terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Namun Undang-Undang tidak menyebutkan lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya itu dianggap meninggalkannya seseorang itu.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 menyatakan beberapa hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 51.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 218 .

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁹

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dinyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan persidangan tersendiri.³⁰

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi hukum terapan di Pengadilan Agama, juga mengatur tentang putusnya perkawinan dengan sebab perceraian yakni pada pasal 116.

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.³¹

Pasal 116 dalam KHI ini sejalan dengan atau merupakan tambahan dari pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan terjadinya perpindahan agama (murtad). Tambahan dua poin ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik Talak adalah janji atau pernyataan biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar "janji" yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan perceraian sama *khuluk* kepada istri. Jadi taklik talak sebagai sebuah ijtihad baru sangat penting untuk melindungi hak-hak istri.³²

1. Hukum Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sebaliknya melepaskan diri dari ikatan perkawinan hal itu menyalahi sunah Allah

³¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 93-94.

³² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 219.

Rasul-Nya, serta menyalahi kehendak Allah menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Meskipun Islam menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, namun dalam kenyataannya seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran atau sebab lain yang tidak dapat lagi mempertahankan. Bila dilanjutkan akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka hukum Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah usul fikih disebut makruh.

Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya perceraian itu dengan berbagai penahanan. Hal ini terlihat dalam QS an-Nisa/4: 34

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.....

Terjemahnya:

...wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.....³³

Ayat tersebut mengandung informasi penting terhadap perceraian, yakni dilakukan secara bertahap. Tahapan perceraian dalam tenggang waktu tertentu, dimaksudkan sebagai masa perenungan agar pihak suami atau istri diharapkan kembali utuh setelah terjadi perceraian. Hukum Islam pada dasarnya tidak sekaligus memutuskan ikatan perkawinan sekalipun telah terjadi perceraian. Islam mengatur tahapan-tahapan dan tenggang waktunya dalam satu proses perceraian satu, dua, dan

³³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

tiga, agar pasangan suami istri yang sudah bercerai pada tahap satu dan dua masih mempunyai kesempatan untuk memikirkan, merenungkan, dan mempertanyakan diri akan kesalahan, kekeliruan dan kekurangan juga kelebihan masing-masing.

Terlepas dari penahapan tersebut, proses perceraian merupakan perbuatan yang tidak disenangi. Walaupun hukum asalnya adalah makruh namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu maka hukum perceraian itu menjadi:

- a. Sunah yaitu apabila dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbulkan. Bila keadaan seperti ini pilihan perceraian itu lebih baik dilakukan.³⁴
- b. Makruh yaitu perceraian apabila masih bisa dicegah, kalau diperkirakan tak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri. Dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Berdasarkan hadis “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.³⁵
- c. Mubah atau boleh yaitu apabila perceraian itu dilakukan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita atau laki-laki tidak baik, pelayanannya terhadap suami buruk, dan hubungan antara keduanya tidak harmonis sekalipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih tujuan perkawinan yang dikehendaki syara’ tidak akan tercapai. Oleh karena itu, suami boleh menceraikan istrinya.³⁶
- d. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 127.

³⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah “Syariah”* terjemahan Syari’ah The Islamic Law oleh Zaimudin dan Rusydi sulaiman (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 223.

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1777

sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar *kaffarah* sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakannya itu memudaratkan istrinya.³⁷

- e. Haram yaitu perceraian dihukum haram dilakukan ketika suami mengetahui bahwa istrinya akan melakukan perzinaan, apabila ia melakukan perceraian terhadap istrinya. Dengan perceraian tersebut, berarti suami memberi peluang bagi istrinya untuk melakukan perzinaan. Dalam hal ini termasuk juga perceraian yang diharamkan, kalau suami menceraikan istri dalam keadaan haid, nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan nifas) tetapi dicampuri lebih dahulu.³⁸

Mengingat bahwa kedudukan hukum dari perceraian itu adalah perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah swt atau makruh, yaitu sebuah kedudukan hukum yang lebih dekat kepada haram, maka sebuah perceraian haruslah betul-betul didasarkan pada sebuah alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan dalam hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu talak atau perceraian, baik itu merupakan keinginan suami atau permintaan istri, termasuk memberikan legitimasi hukum atas penjatuhan talak tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, adalah perbuatan dosa yang diharamkan atasnya aroma syurga. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak, khususnya oleh lembaga Peradilan Agama yang memiliki kompetensi.

2. Hikmah perceraian

Ulama fikih mengatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan suami istri yang kekal dan abadi, yang disebut Allah swt sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat). Perjanjian yang kuat ini sudah seharusnya dipelihara, dijaga dan mendapat tempat yang layak di hati kedua suami istri. Tetapi dalam dinamika

³⁷ Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurtubi, *Aqdiyatur Rasulullahi Shalallahu> 'Alaihi wa Sallam* (Cet. I; Bairut: Darul Qolam, 2000), h. 128.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 127.

kehidupan sebuah rumah tangga selalu saja ada faktor, baik pribadi maupun sosial yang ikut mempengaruhi proses kehidupan rumah tangga itu. Sebagai manusia biasa, perselisihan, pertengkaran dan perbedaan pendapat antara suami dan istri selalu saja ada dan kadang sulit untuk dihindarkan.³⁹

Walaupun perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, namun sebagai jalan terakhir bagi kemelut suatu rumah tangga, maka perceraian itu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkannya perceraian adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang timbul perbedaan sikap yang menjurus kepada pertentangan, sehingga tujuan perkawinan menjadi terganggu. Dalam kondisi seperti ini kalau dilanjutkan, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan dapat mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian daripada mempertahankan sebuah rumah tangga yang tidak tentram. Dengan demikian perceraian dalam Islam dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapat kemaslahatan antara kedua belah pihak.

Selain hikmah yang dipaparkan di atas, lebih rinci lagi ada beberapa hikmah yang terkandung dalam sebuah perceraian yaitu:

1. Bersikap positif dengan perceraian

Kegagalan dalam membina rumah tangga atau bercerai tidak selalu buruk. Sering kali kegagalan itu membawa kebaikan dan manfaat kepada kedua belah pihak yang bercerai. Sebagai manusia biasa terkadang gagal mengetahui apa yang terbaik untuk diri sendiri.

2. Mengatur perancangan dan melakukan muhasabah diri

Tindakan paling penting selepas perceraian adalah memastikan tidak berulang dan dijadikan pembelajaran kedepannya. Rasulullah bersabda yang bermaksud: "Orang yang beriman tidak akan disengat dua kali di lubang yang sama."

³⁹Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1778.

(Riwayat Muslim). Sebagai seorang Muslim, berfikir sebelum mengerjakan sesuatu dan merupakan perintah daripada al-Qur'an dan sunnah. Islam mengajar manusia supaya mempertimbangkan antara yang baik dan buruk karena agama ini datang dengan membawa konsep menolak mafsadat (kerusakan).

3. Kembali berusaha dan lebih berkualitas

Bagi yang bijak dan memahami agama dengan kepahaman yang sah, walaupun terjadi sebuah perceraian tidak menghalangi aktivitas dan akan segera kembali bekerja serta berusaha dengan lebih gigih, berhati-hati dan mengambil pembelajaran dari proses perceraian untuk menjadi manusia yang lebih baik pada masa depan.

4. Menghindarkan diri dari kesukaran hidup akibat hubungan yang tidak cocok antara suami dengan istrinya, yang apabila dipertahankan terus menerus, akan kian bertambah kesukarannya.
5. Menghindarkan diri dari perbuatan seorang dengan orang lain di luar pasangannya, sebagai akibat dari pernikahan yang tidak kafaah, dan melemahkan gairah seksual.

Dengan demikian salah satu solusi bagi suami istri yang selalu bertengkar dan semua upaya untuk melanjutkan kebahagiaan keluarga menemukan jalan buntu, sehingga penderitaan dalam rumah tangga terjadi. Maka masing-masing antara suami dan istri diberi waktu dan kesempatan agar melakukan sesuatu untuk menciptakan kebahagiaan perkawinan dengan orang lain.

B. Hak Suami dan Istri dalam Cerai Gugat

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara suami istri yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam kedua belah pihak.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan

peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.

Paradigma terbesar yang berkembang dalam masyarakat di negeri ini, bahwa kewajiban seorang suami hanyalah diseputar masalah kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, berupa uang belanja rumah tangga bulanan dan pemenuhan kebutuhan biologis pasangannya. Paradigma seperti ini sangat sempit dan sangat ironis bahwa hal yang sesempit itu kemudian lebih dipersempit lagi oleh adanya batasan-batasan kultural serta pemahaman yang dangkal, khususnya terkait dengan kebutuhan biologis suami istri itu sendiri.⁴⁰

Banyak fakta yang menunjukkan bahwa ketika seorang suami telah memberikan uang belanja pada istrinya, maka seolah-olah telah menunaikan tugas secara menyeluruh dan berhak untuk meminta pelayanan yang maksimal dari istri sebagai imbalannya. Demikian halnya seorang istri, ketika diberikan uang belanja oleh suaminya, tak jarang diantara para istri merasa telah memiliki hak sepenuhnya atas uang belanja tersebut, sehingga dapat membeli apa saja yang dikehendaki dengan pemberian tersebut, tanpa perlu bermusyawarah dengan pasangannya terlebih dahulu. Kedua contoh kecil ini merupakan fenomena yang ada, bahkan cenderung berkembang dalam kehidupan masyarakat, yang tidak jarang memunculkan konflik rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian.⁴¹

Atas dasar itulah kemudian akan dipaparkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, menurut apa yang ditentukan oleh Allah swt sebagai pegangan bagi umat Islam.

⁴⁰Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 47.

⁴¹Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 48.

Islam datang untuk mengatur hubungan antara kedua pasangan dengan peraturan yang begitu menajutkan yang menjamin kehidupan bahagia, penuh kasih dan sayang serta saling memahami. Dengan demikian maka dibuatlah ketentuan bagi suami istri hak-hak atas yang lainnya, dan dibuat juga undang-undang perkawinan. Ketika undang-undang tentang perkawinan telah diberlakukan, maka lebih memudahkan jalan untuk melaksanakan hak kedua belah pihak, sehingga tidak ada hak untuk kedua belah pihak yang dihilangkan dan merasa dirugikan karena tidak terlaksana akan hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dengan adanya undang-undang tentang perkawinan maka hilang setiap kezhaliman dan setiap kehinaan, dan diumumkan bahwa setiap orang satu sama yang lain itu adalah sama kedudukannya dalam sifat kemanusiaan, dalam hak-hak kebendaan dan kemasyarakatan, yang lebih utama lagi dari semua itu adalah masalah ibadah, maka diberlakukan bagi kedua belah pihak ketentuan hak-hak yang menjaga kelanggengannya dan menjaga kemuliaan serta menjaga kehormatannya.

Terdapat perbedaan besar antara pandangan syariat Islam dengan ilmu hukum dalam menilai hubungan antara hak dan kewajiban manusia. Ilmu hukum meletakkan pemberian hak kepada manusia sebagai fungsi utama hukum. Oleh karena itu dalam kajian ilmu hukum dinyatakan adanya hubungan objektif disamping adanya hukum subjektif. Hukum objektif adalah peraturan-peraturan hukum itu sendiri, yang memberikan kepada seseorang hukum subjektif, yakni apa yang menjadi haknya.⁴²

Walaupun hukum objektif dan hukum subjektif dapat dibedakan, tetapi tak dapat dipisahkan. Ada hubungan yang erat antara keduanya. Jika hukum objektif adalah aturan hukum, maka hukum subjektif adalah aturan hukum yang dihubungkan

⁴²Lambertus Johannes Van Apeldoorn, *Geschiedenis Van het Nederlandsche Juwelijks Recht Voor de Invoering Va de Fransche Wetgeving* terjemahan *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. XXII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), h. 53-55.

dengan seorang tertentu, dengan demikian menjadi hak. Jadi hukum subjektif timbul jika hukum objektif bersaksi, yang sekaligus menimbulkan dua hal, di satu pihak memberikan hak di pihak lain meletakkan kewajiban.⁴³

Untuk itu, hak diartikan dengan kebenaran dan kadang juga diartikan dengan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pemilik hak. Dalam Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai milik, kewenangan, dan kekuasaan, derajat atau tingkatan.⁴⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.⁴⁵

Sebelumnya akan di paparkan mengenai Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang bersifat bukan kebendaan.⁴⁶ Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain:

- a) Islam datang dengan mewajibkan seorang suami memberikan mahar kepada istrinya.⁴⁷
- b) Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain kebutuhan

⁴³Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Syariat Islam "Mengenal Jati Diri Manusia"* (Cet. I; Jakarta: Mihrab, 2004), h. 32-33.

⁴⁴Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah* (Cet. I; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2011), h. 30.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 120.

⁴⁶Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008), h. 218.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* (Cet. X; Damaskus: Dar Fikr, 1418 H/1997 M), h. 294.

rumah tangga pada umumnya. Disamping itu, suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.⁴⁸

- c) Istri wajib mengantar dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d) Istri wajib mendidik dan mengurus anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat bukan kebendaan antara lain:

- a) Suami istri harus menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing.
- b) Suami istri harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- c) Suami istri harus menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling mencintai.
- d) Suami istri harus saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua.⁴⁹

Mengenai hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Intinya bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 31 UUP (Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁵⁰

Suami istri hanya mempunyai tempat kediaman yang tetap yang mengenai hal ini ditentukan oleh suami istri bersama. Suami istri wajib saling mencintai,

⁴⁸ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, h. 218.

⁴⁹ Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, h. 219.

⁵⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 20.

saling menghormati, saling memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lainnya.

Adapun mengenai kewajiban suami istri sebagaimana yang tertuang dalam

Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 adalah sebagai berikut:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya maupun pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵¹

Sepintas melihat mengenai kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah maka baik bagi istri maupun suami, dapat menggambarkan bahwa kepatuhan seorang baik suami maupun istri pada Allah swt ditunjukkan dengan memikul kewajiban masing-masing kedua belah pihak, suami sebagai pelindung sekaligus pembela segala kepentingan istri serta keluarganya (keturunannya) dari hal-hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga, baik terkait dengan kehidupan dunia maupun ukhrawi, maka hal itu juga menjadi kewajiban istri untuk menjaga ketika suami tidak hadir atau sedang berpergian. Wajib untuk menjaga dan melindungi dan melakukan pembelaan atas diri dan kehormatannya sebagai perempuan dan istri, menjaga atau melindungi kepentingan-kepetingan keluarga dari hal-hal yang dapat menggannggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga, terkait dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi agar dapat menjadikan suatu keluarrga sebagai sendi dasar dalam susunan masyarakat.

⁵¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 79.

Dalam sebuah rumah tangga seorang suami maupun istri wajib saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan setia dalam memberi bantuan kepada orang lain menunjukkan bahwa antara suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam mensejahterakan suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Karena sasaran dan tujuan hidup bersuami istri ialah ketentraman hati, cinta dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan bersuami istri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan berdekatan tetapi ruh berjauhan.⁵²

Suami istri berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak, menunjukkan bahwa seorang suami juga bertanggung jawab untuk memberikan perhatian dan pembinaan kepada istri dan anak atas dasar kasih sayang dan mu'asyarah bil ma'ruf. Oleh karena itu jika kemudian seorang anak menemui kendala dengan masalah pendidikan, kesehatan, lingkungan atau lainnya, seorang suami sebagai bapak harus bisa memberikan perhatian yang baik serta melakukan pembinaan sang anak dapat mengatasi kendala yang dihadapi, sehingga perhatian dan pembinaan ini diharapkan akan melahirkan generasi-generasi yang lebih baik dimasa akan datang.

Demikian halnya dengan seorang istri, jika menemui kendala dengan masalah internal rumah tangga, kesehatan, lingkungan atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama serta berlebihan dalam pola hidup, maka suami berkewajiban memberikan perhatian dengan mengingatkan dan melakukan pembinaan yang baik, agar nantinya sang istri dapat hidup mendampingi suami sebagai sosok

⁵²Yusuf al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* terj *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 603

perempuan yang sholehah dan bertanggung jawab atas kewajiban yang dibebankan dipundaknya sebagai seorang istri dan ibu bagi keturunannya.⁵³

Berdasarkan penjelasan hak dan kewajiban di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban-kewajiban yang diberikan antara suami maupun istri, pada prinsipnya merupakan hak Allah swt, yang menuntut adanya kepatuhan dan pertanggung jawaban di hadapan Allah swt atas pelaksanaannya dalam memenuhi kewajiban masing-masing kedua belah pihak.

Dengan pemahaman seperti itu, menunjukkan bahwa dalam agama Islam sama sekali tidak diajarkan adanya bentuk-bentuk pemaksaan kehendak, apalagi bermaksud mengediskreditkan, memarginalkan ataupun merendahkan salah satu pihak. Bahkan sebaliknya Islam memberikan sebuah konsep tentang hak dan kewajiban yang sangat tinggi nilainya, dengan didasarkan pada pola hubungan timbal balik dan perlakuan seimbang, bukan hanya antara suami istri, tetapi juga antara Allah swt dengan hamba-Nya tanpa mengabaikan atau bahkan sangat sesuai dengan hal-hal mendasar yang ada pada diri masing-masing pasangan tersebut.

Hubungan antar jenis kelamin pada masa pra Islam tidak begitu banyak ditandai oleh poligami, tetapi lebih banyak ditandai oleh perceraian yang sering terjadi, ikatan perkawinan yang longgar dan seks bebas yang membuat sulit untuk menggambarkan suatu batas antara perkawinan atau prostitusi. Pada zaman ini cerai gugat telah berlaku ditandai sebagian kaum hawa menceraikan pria dengan cara, jika suami istri yang tinggal di tenda, lalu memutarnya sehingga pintu yang menghadap ke timur menjadi menghadap ke barat dan ketika suami melihat hal ini mengetahui akan dirinya telah diceraikan dan tidak masuk ke dalam tenda.⁵⁴

⁵³Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 57.

⁵⁴Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), h. 59

Bahkan sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif undang-undang telah memberikan jaminan kedudukan yang terhormat dan seimbang kepada perempuan sebagai istri. Terdapat perubahan signifikan terhadap dominasi laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) dalam kehidupan berumah tangga. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 memberikan hak dan kedudukan seimbang antara seorang istri dengan seorang suami.

Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan angka 4 huruf (F) menyatakan: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.”⁵⁵

Asas-asas dalam undang-undang ini, adalah mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hak untuk menjatuhkan talak tidak lagi menjadi hak mutlak seorang suami, yang dapat dilakukan kapan saja dia mau, akan tetapi harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, dan juga dengan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri dalam proses perceraian tersebut. Adapun hak suami istri dalam proses cerai gugat adalah sebagai berikut:

1. Adanya hak suami dan istri yang seimbang untuk mengajukan perceraian.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ada diskriminasi, antara suami dan istri dalam hak untuk mengajukan perceraian. Suami memiliki hak mutlak untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Kapan saja suami dapat menjatuhkan talak tanpa kewajiban apapun kepada istri.

⁵⁵Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, h. 36-37.

Sementara istri apabila akan mengajukan perceraian, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dengan mengajukan gugatan tersebut, istri akan kehilangan hak-haknya karena mengajukan gugatan dianggap perbuatan nusyuz sehingga istri harus rela kehilangan hak, hanya karena istri mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengubah keadaan tersebut, dan memberikan hak yang sama kepada suami atau istri untuk mengajukan perceraian. Baik suami ataupun istri dapat mengajukan perceraian melalui sidang Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan harus ada alasan yang ditentukan di dalam Undang-undang yaitu:

- Suami dapat menceraikan istri dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan di tempat kediaman Termohon (istri).
- Sedangkan istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan di tempat kediaman Penggugat (isteri).

Hak suami dan istri begitu seimbang diatur sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur, akan tetapi satu hal yang sudah jelas yaitu bahwa undang-undang al-Qur'an mengenai perlakuan terhadap perempuan dalam perceraian adalah lebih bersifat perikemanusiaan dan lebih mengandung jiwa keadilan daripada apa yang tertulis dalam kitab-kitab lainnya.⁵⁶

Bahkan pada zaman Rasulullah saw pernah terjadi suatu kasus menyangkut tentang keseimbangan hak antara suami dengan istri dalam proses perceraian. Orang yang memegang hak perceraian adalah orang yang memegang betis. Pada zaman itu Rasulullah saw ditanya seorang hamba sahaya, katanya aku telah dikawinkan oleh majikan perempuanku dan kini hendak memisahkan antara aku dan istriku.

⁵⁶Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 234.

Mendengar cerita itu beliau lalu menghaturkan puja dan puji kepada Allah swt., dan mengatakan "bagaimana keadaan beberapa kaum yang mengawinkan budak laki-laki dengan budak perempuan, kemudian ingin memisahkan antara keduanya. hak perceraian hanya orang yang memegang betis. Maksudnya ialah bahwa hak perceraian itu hanyalah hak suami maupun istri bukan hak tuan sebagai majikan."⁵⁷

Dalam hal suami yang memulai proses perceraian, hanya perlu mengajukan permohonan izin ikrar talak. Jika permohonan itu dikabulkan, hakim langsung menetapkan sidang majelis penyaksian pengucapan ikrar talak tersebut, kemudian mengeluarkan "Surat Keterangan" terjadi pengucapan talak.⁵⁸

Sebaliknya, kalau istri yang memulai proses perceraian harus mengajukan gugatan seperti gugatan perdata biasa dengan segala formalitasnya, dengan hak banding, kasasi dan lain-lain bagi suami.

Di dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengandung suatu prinsip yang sangat penting dalam menangani perkara-perkara perceraian. Tujuan perceraian tidak bisa dihindari, maka perceraian itu diusahakan tidak akan membawa kepedihan, terutama kepada anak keturunan.⁵⁹

Bahkan pada saat ini perceraian yang diajukan oleh istri lebih mendominasi di Pengadilan Agama dibandingkan dengan cerai yang diajukan suami, hal tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran/ pembangkangan salah satu pasangan baik istri maupun suami atas hak dan kewajiban dalam perkawinan, sehingga pihak yang merasa tidak terpenuhi haknya akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

⁵⁷ Ibn Qoyyim Jauziyah, *Fatwa-Fatwa Rasulullah* (Cet. I; Qahiro: Maktabatul al-Qur'an, 2000), h. 78.

⁵⁸ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya"* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 125.

⁵⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia "Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya"*, h. 125.

Perkembangan pemikiran hukum keluarga akhir-akhir ini menganggap perceraian bukan merupakan hasil akhir dari salah satu pihak baik suami maupun istri. Unsur kesalahan tidak dipersoalkan, setidaknya bukan menjadi orientasi hakim dalam menangani perkara perceraian. Perkara perceraian apapun dari hakim tidak mengandung "kalah menang". Pengadilan yang menangani kasus-kasus sengketa keluarga berusaha bukan hanya menjadi *Court of law* yang tegar, tetapi menjadikan sebagai *social institution* (lembaga kemasyarakatan) yang menagangani sengketa-sengketa unit terkecil susunan masyarakat yaitu keluarga.

2. Hak mengajukan komulasi

Komulasi gugatan tidak diatur dalam HIR atau BW, bahwa yang disebut dengan gugatan adalah diajukan oleh seorang, karena merasa haknya dilanggar. Jadi dalam hal ini ada kepentingan dari yang bersangkutan sehubungan dengan pengajuan gugatan tersebut, yaitu ada suatu fakta hukum yang menjadi dasar gugatan. Komulasi yang tidak ada hubungannya sama sekali adalah tidak benar.⁶⁰

Pada umumnya gugatan harus berdiri sendiri, penggabungan gugatan yang diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu, yaitu apabila pihak istri atau suami adalah yang secara nyata telah bersengketa yang diajukan di muka persidangan dan dalam penggabungan gugatan itu memang sudah diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Undang-undang UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberikan hak untuk mengajukan gugatan komulasi, yaitu istri dapat mengajukan gugatan perceraian secara komulasi dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri, atau dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁶⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara* (Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), h. 228.

Demikian juga suami, dapat mengajukan permohonan talak dikomulasikan dengan permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama atau dapat diajukan setelah pelaksanaan ikrar talak suami kepada istri.⁶¹

3. Hak Mut'ah, Nafkah dalam cerai Talak

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.⁶² Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu kehendak si istri, pemberian itu tidak wajib. Kadar mut'ah boleh ditentukan melalui persetujuan kedua belah pihak. sekiranya terdapat pertikaian mengenai kadar ini, Mahkamah Agung akan menentukan kadar bayaran mut'ah tersebut.

Dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan tegas pasal 149 menyatakan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separoh apabila qabla al dukhul.
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶³

Sedangkan pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai tentang kewajiban bekas suami terhadap istrinya yaitu:

⁶¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia Lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 212.

⁶² Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Tentang Ketentuan Umum*, h. 51

⁶³ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149*, h. 107.

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.⁶⁴

Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suami selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidak sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Adapun hak-hak istri yang bercerai dari suami dihubungkan dengan hak yang diterima terbagi atas tiga yaitu:⁶⁵

- a. Istri yang diceraikan dalam bentuk talak *Raj'i*, dalam hal ini para ulama sepakat bahwa hak yang diterima bekas isteri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik sandang maupun pangan dan tempat kediaman.
- b. Seorang isteri yang diceraikan dalam bentuk *Ba'in*, apakah itu ba'in sughra atau ba'in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh golongan ini adalah Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat seperti antara lain Ibnu Mas'ud, Imam Malik dan Imam Syafi'i bekas isteri tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. Adapun Ibnu Abbas dan Daud al-Zahiri dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa bekas isteri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam keadaan mengandung. Pendapat ini berdasarkan ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam

⁶⁴Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 149*, h. 112.

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 144.

keadaan tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah (Pasal 149 huruf (b) KHI.

- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si isteri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama sepakat, isteri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat yaitu: Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan "berhak atas tempat tinggal", sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila isteri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan

Setelah hakim Pengadilan Agama mengabulkan suatu perkara perceraian, istri memiliki hak mut'ah dan nafkah iddah dari suami, besar mut'ah dan nafkah iddah tergantung dalam bentuk perceraian yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hak istri dalam nafkah dan tempat tinggal, namun penulis cenderung mengikuti pendapat imam malik dan syafi'I bahwa istri yang diceraikan oleh suami karena tidak ada pelanggaran hak dan kewajiban berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suami.

4. Hak Hadanah (Pemeliharaan Anak)

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan /urusan anak-anak yang belum mumayyiz.⁶⁶

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.⁶⁷

⁶⁶Mumayyiz adalah anak yang masih berusia dibawah 7 tahun bagi laki-laki sedangkan usia anak 9 tahun bagi perempuan atau usia anak yang mampu menentukan, membedakan, dan memilih hal-hal atau sesuatu yg baik dan yg buruk, sekitar tujuh sampai sembilan tahun. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, h. 1052.

⁶⁷Muhammad Andi Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 215.

Bagi anak yang belum mumayyiz apabila terjadi suatu perselisihan antara suami dan istri hingga berujung pada perceraian maka hak asuh anak diberikan kepada istri, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁶⁸

Dalam hal pemeliharaan anak para imam mazhab berbeda pendapat tentang suami istri yang bercerai dan mempunyai anak maka hak pemeliharaan anak menurut Imam Hanafi dalam suatu riwayatnya, ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan makan, minum, pakaian, beristinjak dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak untuk memeliharanya. Untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga dewasa, dan tidak diberikan pilihan.⁶⁹

Menurut Imam Maliki bahwa ibu lebih berhak memelihara anak perempuan hingga menikah dengan seseorang laki-laki dan disetubuhi. Begitupun dengan anak laki-laki juga hingga anak itu dewasa.⁷⁰

⁶⁸Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Tentang Pemeliharaan Anak*, h. 90.

⁶⁹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah* (cet. II; Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi, 2004/1424), h. 416.

⁷⁰Muhammad Andi Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 216.

Namun menurut imam syafi'I mengatakan bahwa ibu berhak memeliharanya, baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan, hingga berusia tujuh tahun. Sesudah itu, bapak dan ibunya boleh memilih untuk memelihara. Siapa yang mengambilnya maka dialah memeliharanya.

Sedangkan menurut Imam Hambali dalam ha ini mempunyai dua riwayat. *pertama*, ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun. Setelah itu, boleh memilih ikut bapak atau tetap bersama ibu. Sedangkan untuk anak perempuan, setelah berumur tujuh tahun, terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. *Kedua*, ibu lebih berhak atas anaknya hingga dewasa setelah itu bapaknya lebih berhak untuk memeliharanya.⁷¹

Dengan pemahaman seperti itu, hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa ketika seorang suami dan istri bercerai maka anak yang dihasilkan selama perkawinan tetap berhak mendapat nafkah dari orang tua karena hubungan anak dengan orang tuanya adalah abadi, sedangkan hubungan istri dengan suami bisa terputus, dan sebutannya menjadi bekas istri dengan perceraian tetapi apabila hubungan dengan anak maka tidak akan ada sebutan bekas anak, seumur hidup akan menjadi anak, dan anak lelaki

⁷¹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, h. 68.

sampai dia mampu membiayai hidupnya sendiri maka tetap menjadi tanggungan sang ayah yang lebih wajib memberi nafkah kepada semua orang yang menjadi tanggungan, dan seorang perempuan sampai bisa mendapatkan suami.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat

Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja, yaitu ayah dan ibu. Tidak banyak dari pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang sedang terjadi pada anak ketika proses perceraian sedang berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah satu-satunya jalan bagi orangtua untuk dapat terus menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan. Namun apapun alasannya, perceraian selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran tersebut masih bisa ditutup-tutupi sehingga anak tidak tahu, namun tidak jarang anak bisa melihat dan mendengar secara jelas pertengkaran tersebut. Pertengkaran orangtua, apapun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orangtuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa takut, sedih dan bingung.

Dalam kondisi seperti ini, yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari keluarga yang pecah itu. Dalam Islam, Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diupayakan harus terjalin utuh. Namun apabila secara manusiawi ikatan perkawinan dalam keluarga itu menjadi mustahil untuk dipertahankan. Hanya dalam keadaan yang tidak dapat dipertahankan itu sajalah perceraian diizinkan dalam Syariah.

Putusnya ikatan perkawinan bisa terjadi disebabkan oleh faktor perilaku dari salah satu pihak pasangan suami istri itu bersifat buruk, atau salah satunya bertindak

kejam terhadap yang lainnya, pasangan yang tidak dapat hidup rukun sebagai suatu keluarga yang utuh. Maka dalam kasus ini syiqaq lebih memungkinkan terjadi, walaupun demikian peristiwa ini akan tetap tergantung kepada kedua belah pihak. Perceraian pasti akan terjadi bilamana salah satu pihak merasa tidak mungkin untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan terpaksa harus memutuskannya.⁷² Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat antara lain:⁷³

- 1) Ketidakharmonisan dalam rumah tangga: Alasan tersebut adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- 2) Krisis moral dan akhlak: Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat melalaikan tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
- 3) Perzinahan: Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya cerai gugat adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.
- 4) Pernikahan tanpa cinta: Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan telah

⁷² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah "Syariah"* terjemahan Syari'ah The Islamic Law oleh Zaimudin dan Rusydi sulaiman, h. 225

⁷³ Hasbi Indra, et al, *Potret Wanita Shalehah*, (Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 222

berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi perkecokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

Faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat antara lain persoalan ekonomi, perbedaan usia yang besar dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Perbedaan penekanan dan cara mendidik anak juga pengaruh dukungan dari pihak luar seperti tetangga, sanak keluarga, sahabat dan situasi masyarakat yang terkondisi.⁷⁴

Saat ini telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami istri, ternyata yang menyebabkan perceraian pada umumnya bukanlah karena tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh fakto-faktor lain sebagai pemicunya antara lain:⁷⁵

a) Status Sosial Ekonomi

Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun wanita yang memiliki pendidikan lebih tinggi melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikannya.

b) Usia Saat Menikah

⁷⁴Dagun, S. M, *Psikologi Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 114.

⁷⁵Subiyanto. P, *Membahagiakan Pasangan "Kiat mengembangkan dan Memperdalam Relasi Suami Istri"* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 14.

Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melauai berbagai penelitian bahwa pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.

c) Suku/ Ras

Populasi kulit hitam memiliki tingkat perceraian lebih tinggi disebabkan oleh alasan-alasan ekonomi.

d) Tidak mempunyai anak/keturunan

Weinberg seorang peneliiti Keluarga/rumah tangga berkata tidak memiliki keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena anak membantu keutuhan dan mempersatukan keluarga.

e) Kekecewaan

Pada mulanya pasangan suami istri berusaha menampilkan diri sesempurna mungkin agar diterima oleh pasangannya, tapi dalam perjalanan waktu menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kekecewaan demi kekecewaan muncul sehingga hidup berpasangan menjadi beban yang melelahkan.

f) Dendam

entah disengaja atau tidak, melukai atau menyakiti pasangannya adalah kenyataan yang tidak terhindarkan. Tidak jarang pasangan yang terluka terus menyimpang luka itu menjadi dendam dan berusaha menunggu kesempatan untuk membalas melukai pasangannya.

g) WIL dan PIL

Perselingkuhan yang ditandai dengan hadirnya “orang ketiga” baik Pria Idaman Lain (PIL) maupun Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan perkawinan akan sangat mengancam relasi secara serius. Masuknya orang ketiga sering kali tidak secara langsung, melainkan melalui proses dimana terjadi gangguan relasi atau pelarian diri.

h) *Single Parent*

Trend baru yang menggejala di negara maju, yakni gaya hidup sebagai *single parent* atau orang tua tunggal, yaitu orang bisa tanpa pasangannya menjalani pengasuhan anak secara sengaja. Gaya hidup semacam ini akan memacu pasangan untuk berani untuk mengambil keputusan cerai karena mendapat pembenaran dan peneguhan, khususnya laki-laki atau wanita yang memiliki kemandirian tinggi di bidang finansial, bahkan emosional.

i) Karir

Kebebasan individual dewasa ini memberi peluang bagi setiap orang untuk aktualisasi diri selebar-lebarnya. Ekonomi pasar menjadikan karir bagi seseorang dengan imbalan tanpa batas. Orang bisa tergoda mencurahkan seluruh hidupnya demi karir dengan mengorbankan relasi sebagai orang berpasangan, atau meningkatnya prestasi tidak diimbangi dengan kemampuan berkomunikasi sebagai suami atau istri.

J) Gender

Kita dibesarkan dalam suasana paternalistik dimana pria dipandang lebih unggul daripada wanita. Wanita dikodratkan untuk urusan rumah tangga dan melayani pria, sebaliknya pria bekerja di luar rumah sebagai kepala keluarga. Kondisi ini ikut membentuk cara pandang dan harapan-harapan kita terhadap pasangan.

Perceraian saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasa warsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah. Fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.

Syariat Islam telah memberikan jalan keluar kepada istri yang tidak suka hidup bersama dengan suami. Apabila kebencian itu datangnya dari pihak istri dan menginginkan perceraian, maka jalan keluarnya menurut istilah fuqaha disebut cerai

gugat. Hanya saja, sebagaimana halnya syariat menyuruh laki-laki untuk bersabar dalam menanggung derita, menekan pasangannya, serta tidak begitu saja melakukan perkara halal yang sangat dibenci Allah kecuali ketika sangat diperlukan, maka pada sisi lain syariat juga melarang pihak wanita tergesa-gesa minta cerai sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَبَاسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْخَنَّةِ (رواه ابوداود)

Artinya :

Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab yang dapat dibenarkan, maka tidak akan mencium bau surga (HR Abu Daud).

Maksud dari hadist ini ialah wanita-wanita yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama maka haram hukumnya mencium bau surga. Wanita-wanita yang tidak suka kepada suaminya dan merasa khawatir kebenciannya itu akan menyebabkan dia mengabaikan hukum-hukum Allah dalam masalah rumah tangga, maka ia boleh membeli kebebasannya dengan mengembalikan pemberian suaminya, baik berupa mahar maupun hadiah.

Sesungguhnya apabila seorang wanita tidak suka kepada suaminya karena perangnya, rupanya, agamanya, karena telah tua, karena lemah atau faktor-faktor lainnya, dan dia takut tidak dapat menunaikan hak Allah dalam mentaati suaminya, maka ia boleh meminta cerai gugat kepada suaminya.

Syari'at Islam memberi kemungkinan kepada istri untuk mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan, ketika timbul keadaan yang tidak memberikan kenyamanan dalam kehidupan perkawinannya. Keadaan dimaksud membuatnya menderita karena tidak diperlakukan dengan adil, sehingga tidak tahan lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan yang terjalin antara diri dan suami.

Dalam keadaan seperti itu, dan demi melepaskan penderitaan, syari'at Islam memberi hak untuk menuntut perceraian ke Pengadilan. Alasan-alasan yang menyebabkan sang istri sebaiknya meminta cerai dari suami yaitu:

a. Sebab Cerai Karena Penyakit atau Cacat Tubuh

Jika terjadi cacat atau penyakit pada salah satu pihak baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana mestinya, atau menimbulkan penderitaan batin salah satu pihak, atau membahayakan hidup, mengancam jiwa, maka yang bersangkutan berhak mengadakan hal itu kepada Hakim, kemudian Pengadilan memutuskan perkara.

Cacat atau penyakit dimaksud meliputi cacat jiwa seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit lepra, dan cacat kelamin seperti penyakit pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menjatuhkan cerai karena alasan adanya penyakit itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa penyakit tersebut tidak diketahui keberadaannya sebelum menikah, akan tetapi jika sudah diketahui tapi tidak keberatan dengannya, maka hal itu tidak dibolehkan.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang munculnya penyakit (cacat) setelah menikah sebagai alasan untuk bercerai. Namun jumhur ulama selain (Ibnu Hazm) berpendapat bahwa boleh menjatuhkan cerai atas alasan tersebut, meski terjadi perbedaan lagi dalam merumuskan bentuk penyakit atau cacat yang dimaksud.

Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menyatidakan bahwa jika ada seorang laki-laki menikah dengan wanita, sedangkan dia gila atau punya penyakit seperti lepra, kusta, lemah syahwat, dan qarn. Dan jika dia sudah menyetubuhi, maka si istri berhak mendapatkan maharnya karena sentuhan yang dilakukan kepada sang istri, dan urusan dirinya diserahkan kepada wali.⁷⁶

Adapun menurut Imam Hanafi Cuma mengkategorikan penyakit atau cacat tubuh berupa putus zakar dan Impotensi. Demikian halnya Imam Syafi'i, Imam

⁷⁶Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a. diterjemahkan M. Abdul Mujieb AS* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 609

Malik dan Imam Ahmad bin Hambal menetapkan penyakit/cacat tubuh seperti lemah syahwat, gila, sopak, penyakit menular, putusnya zakar atau imponten bagi laki-laki dan bagi wanita yaitu tumbuhnya tulang pada kemaluan, kemaluannya buntu, kemaluannya tersumbat daging, atau kemaluannya terlalu basah boleh meminta cerai.⁷⁷

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, semua penyakit atau cacat tubuh yang menyebabkan suami istri saling menjauhi sehingga tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan maka dapat dijadikan alasan untuk memilih apakah akan tetap mempertahankan tali pernikahan atau bercerai.⁷⁸

Dari beberapa pendapat di atas, penulis cenderung sepakat dengan pendapat Ibnu Qayyim karena mengingat bentuk dan jenis penyakit yang sedemikian rupa berkembang maka dalam merumuskan sifat penyakit lebih bijaksana dibandingkan jenisnya. Ditambah melihat keadaan saat ini, tampaknya surat keterangan dari dokter atau rumah sakit merupakan syarat mutlak yang mesti dilampirkan untuk menguji kebenaran dari suatu penyakit yang di derita salah satu pihak baik istri maupun suami.

Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 75 yang berbunyi:

Apabila gugatan cerai gugat didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksa diri pada dokter.⁷⁹

⁷⁷Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 193.

⁷⁸Kamal Muhktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 215.

⁷⁹Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

Demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan diatur dalam pasal 116 (c) yang berbunyi:

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.⁸⁰

b. Karena Tidak Ada Nafkah

Sebagian para Imam seperti Imam malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa istri berhak mengajukan permohonan cerai gugat kepada Pengadilan karena suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini Pengadilan berhak menjatuhkan talak kepada istri yang menggugat itu atas nama suaminya.⁸¹ Landasan hukumnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 229

فَإِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Terjemahnya :

“Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik.”⁸²

Dalam ayat ini mengatakan bahwa suami dibebani untuk menahan istrinya secara ma’ruf atau melepaskan dan menceraikannya secara baik. Jelas tidak diragukan bahwa tiadanya nafkah berarti penahanan bukan secara ma’ruf.

Tidak memberi nafkah kepada istri dan menterlantarkan istri tanpa diberi nafkah serta diceraikan adalah perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan

⁸⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 93

⁸¹ Sri Mulyati, *Relasi suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*, h. 33

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Syaamil Cipta media, 2010), h. 36.

berarti menimbulkan kemudharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

c. Sebab Cerai Karena Pasangan Melakukan Zina

Dalam Kitab al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili dijadikan dalil yang menggambarkan tentang seorang suami yang berzina. Dalam penjelasan hukumnya, Rasulullah saw memberikan hak sepenuhnya kepada istri untuk meminta cerai atau tidak, berdasarkan hal tersebut, maka alasan karena pasangan berzina dapat menyebabkan bolehnya meminta cerai, meski tidak wajib. Tetapi dalam hal ini jika pasangan masih dapat menerima perbuatan suami atau istri yang berzina dengan lapang dada, maka Islam tidak mengharuskan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara suami istri.

Cerai gugat dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya pasal 87 (a) yang berbunyi:

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tiada bukti sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat mengurus pemohon atau penggugat untuk bersumpah.⁸³

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 116 (a) yang berbunyi:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.⁸⁴

⁸³Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

⁸⁴Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 93

d. Sebab Cerai Karena Tindakan Menyakiti/Menganiaya

Tindakan menyakiti atau menganiaya pasangan suami istri dapat dijadikan sebagai alasan untuk memutuskan hubungan suami istri. Dalam hubungan di atas, perceraian dilakukan atas penetapan langsung dari Nabi saw sebagai hakim tertinggi dalam dunia hukum Islam. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt agar masing-masing pasangan memberlakukan / menggauli pasangannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu tindakan menyakiti dan menganiaya pasangan sama saja dengan menentang perintah Allah swt.⁸⁵

Menurut mazhab Maliki bahwa dalam keadaan seperti ini istri punya hak untuk mengajukan perkaranya kepada pengadilan agar dipisahkan kalau kehidupan istri bersama suaminya itu sudah tidak memungkinkan lagi.

e. Karena takut terjadi bencana

Bila suami menghilang tanpa suatu halangan dalam waktu yang cukup lama, semnetara istri memandang bahwa kepergian suaminya itu akan menjatuhkannya pada bencana, maka boleh meminta cerai gugat.

Menurut pendapat al-Malikiyah bila istri berbahaya lantaran ditinggal pergi lama oleh suaminya, misalnya ia takut menyeleweng, maka ia harus mengajukan perkaranya kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya.⁸⁶

Berbeda dengan al-Hanafiyah dan al-Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa hilangnya suami tidak dianggap suatu alasan yang benar bagi perempuan dalam memohon perceraian. Menurut para ulama syarat-syarat bagi wanita yang meminta diceraikan lantaran hal tersebut adalah:

⁸⁵Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 195.

⁸⁶Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*, h. 35.

1. Hilangnya suami bukan karena adanya suatu halangan yang dapat diterima.
2. Istri berbahaya lantaran hilangnya suami
3. Ada *ghibah* di lain daerah tempat tinggal istri.
4. Lewat setahun.

Tapi jika suami meninggalkan istrinya karena halangan yang dapat diterima, seperti menuntut ilmu, atau berdagang, atau bekerja di luar negeri, atau sebagai tentara yang bertugas di tempat nan jauh, maka istri tidak diperkenankan minta dipisahkan. Istri juga punya hak untuk minta diceraikan lantaran kesepian yang melanda dirinya selam ditinggal suaminya selama setahun, sementara istri takut terjermus dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

Mengenai batas waktu, Imam Malik mengatakan setahun. Tapi ada yang menagtakan tiga tahun dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa waktu tercepat bagi bolehnya istri minta dipisahkan adalah enam bulan. Setelah enam bulan ini, istri boleh minta cerai, sebab waktu ini yang paling lama bagi wanita untuk bisa bersabar atas hilangnya suami.⁸⁷

f. Karena suami ditahan

Menurut Imam Malik dan Ahmad boleh menceraikan karena suami ditahan. Sebab tertahannya suami itu menjadikan istri berbahaya lantaran jauh darinya. Jika selama ditahan suami itu diputuskan berat hukumannya, semenatara istri memandang tidak akan kuat mengekang dirinya, maka ia boleh mengajukan perkaranya kepada hakim.

Dalam konteks penerapan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya untuk orang Islam, ada beberapa alasan yang membolehkan seorang suami atau istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

⁸⁷ Sri Mulyati, *Relasi Suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*, h. 36

Berdasarkan hal tersebut di atas istri bisa meminta cerai kepada suaminya dengan alasan-alasan yang dibenarkan agama namun disatu sisi selama istri masih bisa bertahan dalam perkawinannya meskipun suami pergi jauh, atau dipenjara kurungan. Karena dalam Islam perkawinan tetap bisa dipertahankan selama tidak ada pihak yang merasa tersakiti karena pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Alasan-alasan yang disampaikan di atas, kurang lebihnya merupakan kerangka dasar dalam menilai boleh tidaknya seorang istri meminta cerai terhadap suaminya. Hal ini juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 Tentang putusnya perkawinan dengan menambah 2 ayat yaitu suami melanggar taklik talak dan suami murtad yang menyebabkan ketidarakunan dalam rumah tangga menjadi alasan yang sakral dalam memutuskan hubungan suami istri melalui Proses cerai gugat yang diajukan istri. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia yang terus berkembang pada zaman saat ini nilai-nilai yang diyakini baik, mulai bergeser dan dipaksakan masuk dalam ruang logika berpikir manusia yang rasional. Sehingga tidak jarang pula, hukum yang melingkupi dan mengawal sebuah ikatan perkawinan agar tidak bercerai berai dengan alasan-alasan yang dibuatnya, jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan lagi untuk mempertahankan rumah tangga yang telah dibangunnya.

D. Dampak Cerai Gugat

Akhir-akhir ini banyak dijumpai permasalahan mengenai disorganisasi keluarga, diantaranya adalah cerai gugat. Kasus cerai pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, dapat dibayangkan betapa banyak

keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Cerai gugat senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua cerai membawa dampak yang negatif. Cerai gugat merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga cerai gugat tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.

Dampak traumatik dari cerai gugat biasanya lebih besar daripada dampak kematian, karena sebelum dan sesudah cerai sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional serta mengakibatkan cela sosial, bahkan kesulitan dan kerumitan diri setelah terjadi perceraian. Ada lima tahap penyesuaian setelah perceraian yaitu:⁸⁸

1. Tahap penyangkalan bahwa ada perceraian
2. Tahap timbulnya kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlihat.
3. Tahap usaha untuk tidak bercerai dengan alasan pertimbangan anak-anak mereka.
4. Tahap mengalami depresi mental saat tahu akibat menyeluruh dari perceraian terhadap keluarga.
5. Tahap persetujuan untuk bercerai.

Walaupun telah melalui lima tahap di atas, ada kemungkinan seseorang tidak pernah dapat mengatasi perasaan kesepian, kesendirian, dan keterasingan. Kesepian mungkin akan menjadi kesulitan terbesar yang akan dirasakan. Dalam sosiologi perceraian, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses

⁸⁸Hurloch. E. B., *Psikologi Perkembangan "Suatu Pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan"* (ed. V; Jakarta : Erlangga, 1999), h. 309

pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan suami istri berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.

Dampak lain dari cerai gugat adalah masalah perubahan status dan peran. Perubahan status dari seorang istri menjadi janda apalagi karena cerai, jauh lebih sulit diterima oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya anggapan umum yang mengatakan bahwa istri yang meninggalkan hubungan pernikahan (apapun alasannya) adalah perempuan yang gagal dalam memelihara keutuhan rumah tangganya dan gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya serta membuat malu keluarga. Akibatnya banyak perempuan yang menjadi tertekan dan menyalahkan dirinya atas seluruh kejadian yang ada serta mempercayai dirinya sebagai perempuan gagal.⁸⁹

Bagi perempuan yang telah memiliki anak selain tekanan status yang telah berubah juga mengenai hak pengasuhan anak. Umumnya seorang istri sangat berharap agar hak pengasuhan anak dapat diberikan kepadanya.

Masalah perekonomian pasca perceraian juga merupakan masalah yang harus diselesaikan. Setelah perceraian sangat mungkin terjadi penurunan perekonomian yang cukup drastis. Oleh karena itu kaum ibu harus mencari pekerjaan untuk menopang kebutuhan keluarga.

Studi tentang akibat cerai gugat terhadap anggota keluarga menunjukkan bahwa akibatnya sangat besar, terutama setelah tahun pertama perceraian, kemudian secara bertahap terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang mengganggu anggota keluarga terutama suami dan istri secara bertahap bisa menyesuaikan diri.

⁸⁹ Wirawan Sudarto, *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jurnal Ilmiah Psikologi; ARKHE, Vol 10 No. 1, 2001), h. 45.

Dampak lain dari cerai gugat adalah dampak yang bersifat positif. Selain dampak-dampak yang bersifat negatif seperti yang telah dijelaskan di atas, dampak positif yang dapat diambil dari status baru sebagai seorang janda juga ada yakni adanya peluang untuk melakukan pengalaman-pengalaman serta kreativitas baru yang merangsang seorang wanita untuk lebih bebas mengaktualisasikan dirinya.⁹⁰

Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasikan diri dapat membuat seseorang menjadi mandiri.⁹¹ Individu yang mandiri merupakan individu yang bebas untuk menentukan arahnya, dapat bertindak sesuai keinginannya dan hal-hal yang dilakukannya bukan karena orang lain maka dari itu untuk mewujudkan keinginan-keinginannya tersebut akan dilakukan secara ulet dan progresif. Usaha yang dilakukannya juga dengan mencari alternatif lain seperti berinisiatif dan kreatif walaupun demikian semuanya dilakukan dengan control diri karena didukung dengan rasa percaya diri yang mantap.

Di satu sisi perceraian akan memiliki dampak terhadap perkembangan anak, Perceraian bagi anak adalah “tanda kematian” keutuhan keluarganya, rasanya separuh “diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua bercerai dan harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibunya yang tiba-tiba tidak tinggal bersamanya lagi. Dampak negatif perceraian terhadap perkembangan anak-anak antara lain:

1. Tak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang waswas
2. Minder dan tak percaya diri
3. Kehilangan figur ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran superego tidak ada
4. Anak menjadi tidak terkendali
5. Anak suka memberikan pilihan yang tak terduga

⁹⁰Su'adah, *Sosisolgi Keluarga* (Cet. I; Bandung: Universitas Muhammadiyah, 2003), h. 236.

⁹¹Wanita mandiri adalah wanita yang bekerja ataupun melakukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan uang dapat ia dapat putuskan sendiri penggunaannya. Munandar, S, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia Suatu Tinjauan Psikologi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), h. 23.

Sementara dampak positif dari perceraian orang tua terhadap perkembangan anak-anak antara lain:

1. Anak jadi lebih mandiri
2. Anak mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah.
3. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit⁹²

Perasaan-perasaan ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Beberapa indikator bahwa anak telah beradaptasi dengan menyadari dan mengerti bahwa orang tuannya sudah tidak lagi bersama dan tidak lagi berfantasi akan persatuan kedua orang tua, Dapat menerima rasa kehilangan, Tidak marah pada orang tua dan tidak menyalahkan diri sendiri, menjadi dirinya sendiri.

Beberapa psikolog menyatakan bahwa bantuan yang paling penting yang dapat diberikan oleh orangtua yang bercerai adalah mencoba menenteramkan hati dan meyakinkan anak-anak bahwa mereka tidak bersalah. Yakinkan bahwa mereka tidak perlu merasa harus ikut bertanggung jawab atas perceraian orangtuanya. Hal lain yang perlu dilakukan oleh orang tua yang akan bercerai adalah membantu anak-anak untuk menyesuaikan diri dengan tetap menjalankan kegiatan-kegiatan rutin di rumah. Jangan memaksa anak-anak untuk memihak salah satu pihak yang sedang cekcok serta jangan sekali-sekali melibatkan dalam proses perceraian tersebut. Hal lain yang dapat membantu anak-anak adalah mencari orang dewasa lain seperti bibi atau paman, yang untuk sementara dapat mengisi kekosongan hati setelah ditinggal ayah atau ibunya. Maksudnya, supaya anak-anak merasa mendapatkan topangan yang memperkuat mereka dalam mencari figur pengganti ayah ibu yang tidak lagi hadir seperti ketika belum ada perceraian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerai gugat terjadi karena ditimbulkan oleh berbagai macam hal dan dengan adanya perceraian akan

⁹²<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/>, Jumat, 04 Juli 2014, jam 14.00.

membawa permasalahan bagi pihak-pihak yang mengalaminya, terutama bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan, bagi para wanita yang diceraikan merasakan dampak dari perceraian baik itu yang bersifat jnegatif maupun yang bersifat positif.

E. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang

1. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Perkawinan pada dasarnya ditujukan untuk selama-lamanya atas dasar saling cinta mencintai antara suami istri. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga tidak selamanya berada dalam suasana yang damai dan tentram, adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan misalnya salah satu pihak melalaikan kewajibanya, munculnya rasa tidak saling mempercayai antara satu dengan yang lain dan sebagainya.

Keadaan seperti ini dapat juga menyebabkan keretakan keluarga kedua belah pihak, maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang telah gagal dalam membina rumah tangga yaitu perceraian.

Tidak dapat dipungkiri Islam menetapkan bahwa pernikahan antara suami istri untuk selama hidup agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup, memelihara dan mendidik anak-anak sebagai generasi yang handal. Oleh karena itu bagi seorang muslim ideal sekali menikah untuk seumur hidup, suami istri hendak mempunyai pandangan yang sama yaitu bahwa pernikahan akan berakhir apabila salah seorang di antara kedua suami istri meninggal dunia, hanya kematian yang akan memisahkan.

Oleh karena ikatan suami istri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat dan suci maka tidak selayaknya suami istri begitu mudah untuk memutuskan dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang mau merusak dan menghancurkan. Pergaulan suami istri adalah pergaulan yang paling rapat dan erat. Suami istri hidup serumah, sedapur, sekasur, sebilik dan sepembaringan. Tentu saja pergaulan yang seerat dan serapat itu membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat, serasa dan sekemauan serta saling berlapang dada. Suami istri harus bersabar apabila melihat sesuatu yang kurang berkenan atau kurang disenangi pada pasangannya.

Perbedaan pandangan hidup dan perubahan hati bisa menimbulkan krisis, mengubah rasa cinta dan kasih sayang menjadi benci. Tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri dalam rumah tangga apabila timbul pertentangan yang sangat memuncak. Permasalahannya, kalau seandainya suami istri yang berbeda prinsip hidup dan pertentangan sudah memuncak, telah mengubah rasa cinta menjadi benci, persesuaian menjadi pertikaian, yang tidak mungkin lagi untuk berpadu menjadi satu.

Putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak.⁹³ Konsekuensinya bahwa suatu hubungan perkawinan dapat lepas atau melepaskan perjanjian. Syari'at Islam adalah syari'at yang *riil* dan *idiil*. Riil artinya mengakui realitas kehidupan dan *idiil* artinya mempunyai prinsip dan cita-cita mulia untuk kemaslahatan hidup manusia sepanjang masa.⁹⁴

Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan yang berkepanjangan. Perselisihan

⁹³ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 34.

⁹⁴ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II* (Cet. I; Yogyakarta, 2009), h. 3.

tersebut yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis sehingga mendatangkan kemudharatan. Oleh karenanya, Islam membuka jalan berupa perceraian yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Persengketaan suami istri tidak langsung menjadi alasan yang memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsialisasi agar rumah tangga dapat dipertahankan.⁹⁵

Adapun tata cara perceraian khususnya cerai gugat dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci sebelum terjadinya perceraian, seperti usaha mendamaikan kembali. Tetapi jika semua upaya untuk merukunkan kembali dan membentuk hubungan yang baik menghasilkan kegagalan, maka tidak ada halangan untuk memaksa hidup bersama.

Al-Qur'an mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan untuk menyelesaikan sengketa keluarga baik untuk kasus *syiqaq*⁹⁶ maupun *nusyuz*⁹⁷. Al-Qur'an dan hadis menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui dua cara. Kedua cara tersebut berlaku umum untuk seluruh konflik yang terjadi, termasuk perkara cerai gugat. Adapun proses penyelesaian perkara tersebut, sebagai berikut:

⁹⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 175.

⁹⁶*Syiqaq* adalah perselisihan yang berkepanjangan dan berkelanjutan antara suami istri yang tidak dapat diketahui siapa salah siapa yang benar, sehingga sulit dicarikan jalan penyelesaiannya, maka dapat ditunjuk *hakam* dari masing-masing pihak istri dan hakanm dari pihak suami untuk dicarikan jalan keluar atas permasalahan dalam rumah tangganya. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh jilid II* (Cet. II; Jakarta: Dektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Departemen Agama, 1984), h. 266-267.

⁹⁷*Nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban suami istri, *Nusyuz* tidak hanya terjadi dari pihak istri, tetapi juga dari pihak suami. *Nusyuz* dari pihak suami bersikap keras kepada istrinya, tidak mau menggaulinya dan tidak memberi nafkah. *Nusyuz* dari pihak istri dapat berupa tidak patuh dan taat kepada suaminya, tidak mengurus kepentingan rumah tangga dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Lihat Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga terj. buku aslinya Al-Khilafat al-Zaujiyyah oleh Nor Hasanuddin* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Garafindo Persada, 2005), h. 39-40.

a. Penyelesaian melalui Perdamaian (*Islah*)

Mediasi dalam fikih Islam dikenal dengan kata *Islah* artinya mendamaikan mengandung pengertian mencakup perdamaian dalam lapangan harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam peperangan dan perdamaian antara sesama kaum muslimin maupun muslimat dan non muslimin. Secara bahasa, kata *Islah* berarti merendam pertikaian, namun menurut pengertian terminologi *Islah* adalah suatu akad perjanjian untuk mengakhiri pertikaian diantara dua orang yang berperkara agar terjadi perdamaian di antara keduanya. Masing-masing pihak yang melakukan perdamaian itu, disebut *mushakih* artinya orang-orang yang berdamaian. Menyelesaikan perdamaian secara damai adalah berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk mengakhiri perkara.⁹⁸

Lafadz *al-Islah* juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya adalah *tajdid* (pembaharuan), *taghyir* (perubahan) yang kedua mengarah kepada kemajuan dan perbaikan kondisi. Maka dalam hal ini, *Islah* artinya bertalian erat dengan tugas para Rasul yang ditindak lanjuti hingga sekarang. Di samping itu, *Islah* merupakan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perbaikan dengan jalan damai, baik dalam keluarga, sosial maupun dalam peperangan dan lain-lain.⁹⁹

Ibnu Mandzur dalam *Lisanul al-'Arab* berpendapat bahwa kata *Islah* biasanya mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi kerusakan, sehingga dimaknai dengan *iqamah*.¹⁰⁰ Sementara itu, Ibrahim Madkour dalam *al-Mu'jam al-Wajiz* mengatakan bahwa kata *Islah* mengandung makna yaitu manfaat dan keserasian serta terhindar

⁹⁸ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 60

⁹⁹ Hasbi ash-Shiddiqy, *al-Islam II* (tc; Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 448.

¹⁰⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab* (tc; Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 518.

dari kerusakan. Jika kata tersebut berbentuk imbuhan maka diartikan menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak dan berarti menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan.¹⁰¹

Menurut Ahmad Mujahidin dalam buku *Pembaharuan Hukum Acara Perdata* mengatakan perdamaian adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.¹⁰²

Islah sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka *Islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan yang menimbulkan sebab-sebab serta menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara.¹⁰³

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara seksama

¹⁰¹ Ibrahim Madkour, *Al-Mu'jam al-Wajiz* (t. p., t.t), h. 368.

¹⁰² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 166.

¹⁰³ Alauddin at-Tharablisi, *Muin al-Hukkam fi Mayataradidu>Balna al-Khasamaini>mi al-Ahkam* (Beirut: Dar-al-Fikr, t. th.), h. 123.

dalam masyarakat. Konteks ini merupakan tugas hakim yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia terhadap keadilan tersebut.¹⁰⁴

Ajaran Islam memerintahkan agar penyelesaian setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian, firman Allah QS al-Hujurat/49: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.¹⁰⁵

Ayat di atas memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan *sylh*¹⁰⁶ dalam menyelesaikan sengketa, kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bahkan Umar bin Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak melakukan perdamaian, baik pada awal proses perkara diajukan maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak tidak menempuh upaya damai, hakim harus proaktif dan mendorong para pihak mewajibkan kesepakatan damai dalam menangani sebuah sengketa.

Sebagaimana yang dikutip oleh Syahrizal Abbas dalam buku *Tarikh al-Qafha> fi al-Islam*, bahwa penegasan Umar bin Khattab dapat diketahui dari surat yang

¹⁰⁴Lihat Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 2004), h. 3-4 .

¹⁰⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 744.

¹⁰⁶*Sylh* merupakan proses penyelesaian sengketa dimana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara secara damai. Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw., menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur *sylh* baik di depan Pengadilan maupun di luar Pengadilan. *Sylh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan tidak terpacu secara ketat pada pengajuan alat bukti. Abu>Zakariyya bin Yahya al-Nawawi> *Mughni al-Muhtaj> Juz II* (Mesir: Mustafa>al-Bab al-Halabi>1957), h. 111.

ditulis kepada Abu Musa al-‘Asari, seorang hakim Kufah. Umar bin Khattab menulis surat yang berisi prinsip pokok beracara di Pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip *sulh*. Hakim wajib menjalankan *sulh* kecuali *sulh* yang menghalalkan yang haram dan *sulh* yang mengharamkan yang halal. Umar berpandangan bahwa kewajiban ini harus dilakukan oleh hakim, karena melalui upaya damai keadilan dapat diwujudkan para pihak. Putusan Mahkamah yang mengikat para pihak tidak dapat memuaskan hati kedua belah pihak berdasarkan fakta atau bukti yang telah menempatkan para pihak dalam keadaan menang atau kalah.¹⁰⁷

Fase *sulh* ini dianggap sebagai upaya alternatif untuk menyatukan keluarga dan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara suami istri. Itulah yang disebut de fase berdamai dengan memakai perantara (mediator).¹⁰⁸

Karena itu, Islam Menyerahkan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kata sepakat yang adil kepada para pihak yang berperkara, namun pada fase ini Islam meletakkan syarat *sulh* agar lurus dan adil pada putusan seorang mediator yang adil, karenanya kehormatan rumah tangga dan kelangsungan kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia tetap terjaga.

b. Pembuktian Fakta Hukum (Adjudikasi)

Penyelesaian sengketa melalui proses pembuktian fakta hukum dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh para pihak dalam menuntut atau mempertahankan haknya di hadapan Pengadilan.¹⁰⁹ Pengajuan alat bukti ini dimaksudkan

¹⁰⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 162 dan lihat Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh al-Qafha' fi al-Islam* (Kairo: Al-Mathba' al-Misriyah al-Hadisah, 1987), h. 13.

¹⁰⁸Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga terj. buku aslinya Al-Khilafat al-Zaujiyyah oleh Nor Hasanuddin*, h. 69.

¹⁰⁹Abdul Rahim, *The Principles Muhammad Jurisprudence* (London: Luzac & Co, 1991), h. 67-91

untuk membuktikan siapa yang berhak dan berwenang terhadap sesuatu dan siapa yang tidak berwenang atau tidak berhak terhadap sesuatu. Melalui alat bukti tersebut, maka terungkap jelas duduk perkara dan pihak yang mendapat hak sesuai dengan hukum Allah.¹¹⁰

Pentingnya saksi dalam peradilan menjadi hal yang sangat urgen dan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan perkara, maka Al-Qur'an menegaskan agar saksi tidak memberikan kesaksian palsu dan saksi harus bersikap adil, hal ini terdapat pada QS Al-Maidah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹¹

Dalam kenyataannya, pengajuan bukti di Pengadilan terkadang juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Namun karena para pihak memiliki kemampuan meyakinkan hakim dengan alat bukti yang diajukan, maka hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti tersebut.¹¹² Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw:

¹¹⁰ Abdul Rahim, *The Principles Muhammad Jurisprudence*, h. 368

¹¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 131.

¹¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 158.

إِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ¹¹³

Artinya:

Sesungguhnya alat bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang tergugat.

Proses penyelesaian melalui adjudikasi ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan para pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutuskan perkara sebatas alat bukti kuat yang diajukan pihak yang berperkara. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti-bukti yang ada, maka hakim memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah pihak yang bersengketa. Ada dua hal yang mengindikasikan adjudikasi yaitu:

- 1) Hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan diketahui dari alat bukti yang diajukan di Pengadilan Agama. Boleh jadi pihak yang pintar dan mampu berhujjah telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya meskipun hakikatnya ia tidak berhak.
- 2) Alat bukti tidak menjamin seluruhnya mampu mengungkapkan fakta-fakta hukum, karena dalam proses pengadilan terdapat pula alat-alat bukti palsu yang diajukan oleh pihak yang bersengketa.

Proses pengajuan perkara melalui pengadilan tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa karena para pihak yang memiliki keterbatasan bukti dalam pengajuan alat bukti. Oleh karena itu, usaha yang diserahkan kepada kedua hakim perdamaian dan diserahkan kepada kedua suami istri adalah merupakan usaha yang digariskan oleh Al-Qur'an untuk satu tujuan, yaitu penyelesaian semata. Usaha itu pindah dari tugas suami istri menjadi tugas pihak keluarga yang mencintai kebaikan dan perbaikan atau orang-orang yang mewakili kedua belah pihak yang berselisih dalam mencintai kebaikan dan perbaikan.

¹¹³ Muhammad Ibn 'Ayyis Ibn Musa Ibn al-Dhahak al-Tarmisi > Abu 'Ayyis, *Sunan Tarmizi* (Cet. II: t.t.: Dar Fikr, 1998 M), h. 322

2. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Menurut Undang-Undang

Setelah melalui tahapan arbiterasi (hakam) upaya perbaikan dan perdamaian gagal dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak (khususnya istri) untuk tinggal bersama lagi (perceraian psikologis), maka proses ini dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan prosedural yuridis atau melalui jalur lembaga peradilan agama, dalam rangka memperjelas status ikatan hukum yang dari aspek psikologis ini sebenarnya telah berpisah.¹¹⁴

Pengajuan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, khususnya pada Bab IV Tentang Hukum Acara, mulai pasal 54 hingga pasal 91. Pasal 54 menyebut bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Sedangkan pasal 91 menyatakan:

- 1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.
- 2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

Secara ringkas dapat dijelaskan mekanisme pengajuan yaitu bahwa pihak yang bermaksud mengajukan perkara, menyampaikan permohonan/gugatannya ke Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera Muda. Panitera wajib secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada Ketua Pengadilan Agama, disertai “usul tindak” atau “saran tindak”, yang kira-kira berbunyi “*sudah diteliti dan syarat formal cukup*”. Atas dasar itu, Ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis

¹¹⁴Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 133.

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan, disebut “Penunjukan Majelis Hakim (model PMH).¹¹⁵

Penetapan PMH memakai nomor kode indeks surat ke luar biasa dan isinya menunjuk siapa-siapa hakim yang akan menangani perkara dimaksudkan, siapa hakim ketua dan anggota, mungkin pula sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Ketua Majelis, setelah menerima PMH dari ketua Pengadilan Agama, kepadanya diserahkan berkas perkara yang bersangkutan dan selanjutnya harus membuat Penetapan Hari Sidang (model PHS), kapan sidang pertama akan dilangsungkan.

Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS. Penetapan hari sidang selain “sidang pertama” dapat ditentukan dan dicatat dalam berita acara sidang (tidak perlu dengan PHS lagi). Adapun ketika sidang sudah dimulai, maka secara ringkas dapat dijelaskan pula bahwa mekanisme pemeriksaan perkara melalui beberapa tahapan yaitu: pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik penggugat, pembuktian dan putusan hakim. Adapun mengenai biaya perkara, menurut pasal 89-91 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut dibebankan kepada penggugat atau pemohon.¹¹⁶

Bagi calon penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus melalui tahapan petugas yang berada di Pengadilan tempat mengajukan gugatan. Adapun mekanisme penerimaan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama serta hal-hal yang terkait dengannya sebagai berikut:

¹¹⁵Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata “Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 148.

¹¹⁶Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 134.

a. Tahap Pengajuan Perkara

Pada tiap-tiap perkara perdata¹¹⁷ yang berada dalam pemeriksaan dimuka hakim selalu sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berhadapan satu sama lain yaitu penggugat dan tergugat¹¹⁸. Tiap-tiap proses perkara di pengadilan Agama dimulai dengan diajukannya surat gugatan¹¹⁹ oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Disamping gugatan yang diajukan dengan tertulis juga dimungkinkan secara lisan.

Surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama melalui petugas meja I, yang memiliki tugas untuk sebagai berikut:¹²⁰

1. Menerima surat gugatan/ permohonan dan salinannya.
2. Menaksir panjar biaya perkara
3. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut yang meliputi:¹²¹

a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai

¹¹⁷Secara umum perkara perdata dibagi dua yaitu perkara voluntair dan kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan, tidak terdapat sengketa dan tidak ada lawan sedangkan perkara kontentius adalah perkara yang bersifat gugatan, yang mengandung sengketa dan ada pihak lawan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 41.

¹¹⁸Penggugat adalah pihak yang mulai mengajukan perkara, sementara tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik dimuka pengadilan. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 134.

¹¹⁹Surat gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 39

¹²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 59

¹²¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h. 148

- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Di samping itu syarat gugatan harus memenuhi beberapa hal yakni gugatan tersebut merupakan tuntutan hak, adanya kepentingan hukum, merupakan sengketa dan dibuat secara cermat dan terang.

a) Isi Gugatan

Isi gugatan setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Identitas para pihak yang meliputi nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan.
- 2) Posita atau Fundamentum Petendi atau penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugatan. Posita terdiri dari dua bagian yakni, kejadian/ peristiwa dan penjelasan duduk perkara, serta alasan yang berdasarkan hukum.
- 3) Petitum yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat. Petitum ini harus lengkap dan jelas mengingat petitum ini merupakan bagian terpenting dari surat gugatan. Disamping petitum (gugatan pokok) juga dijumpai tuntutan tambahan misalnya:
 - a. Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan, saksi, pemeriksaan setempat dan biaya panggilan.
 - b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meski ada perlawanan.
 - c. Agar tergugat dihukum membayar bunga (moratoir)
 - d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom)
 - e. Dalam surat gugat cerai, ada tuntutan nafkah bagi istri.¹²²

¹²²Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 136.

Sebuah tuntutan pokok agar dikabulkan dan gugatan juga harus disertai dengan tuntutan pengganti (subsider) atau cadangan. Menurut pasal 178 HIR, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih apa yang diminta.

b) Pihak-Pihak yang Berperkara

Dalam perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak yang berperkara, yakni penggugat yang merupakan pihak yang langsung berkepentingan dengan perkara tersebut. Penggugat sering juga disebut pihak materiil. Di lain pihak ada pihak tergugat (*defendant*) yang selain sebagai pihak formil, juga sebagai pihak yang berkepentingan (pihak materiil).

Pada dasarnya sesuai dengan pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R. Bg, setiap gugatan harus diajukan ke Pengadilan secara tertulis. Tetapi jika orang yang menggugat buta huruf, maka sesuai ketentuan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R. Bg gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat ihwal gugatan lisan tersebut dalam bentuk tertulis.¹²³

Gugatan yang dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh penggugat, jika telah menunjuk kuasa khusus maka surat gugatan ditandatangani oleh kuasa hukumnya.

c) Penggabungan Gugatan

Penggabungan gugatan (kumulasi). Beberapa gugatan hak dalam satu gugatan diperkenankan dalam hukum acara perdata. Ada hubungan antara gugatan yang satu dengan yang lain. Dalam prakteknya dikenal beberapa bentuk penggabungan yakni:¹²⁴

¹²³Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 137.

¹²⁴Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 138.

- a) Kumulasi Subjektif yaitu penggugat seseorang menggugat beberapa orang atau sebaliknya beberapa orang menggugat 1 orang.
- b) Kumulasi Objektif yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan atau gugatan dalam satu perkara.
- c) Intervensi (campur tangan) yakni adanya pihak ketiga yang atas kehendaknya mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat tergugat. Orang ikut intervensi dinamakan intervenient.

Dari ketiga hal di atas, dan khususnya yang pertama semuanya diperiksa dan diproses oleh Panitera Muda. Gugatan yang ada didaftarkan lalu di sampaikan ke Ketua Pengadilan Agama dan seterusnya hingga pada penetapan hari sidang (PHS), sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.¹²⁵

b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Dalam persidangan perkara perdata khususnya cerai gugat, hakim bersifat pasif mendengarkan dari kedua belah pihak, sehingga hakim memberikan kesempatan penuh kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan sendiri duduk perkaranya. Untuk itu, hakim memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di muka hakim pada waktu yang telah ditentukan. Apabila pada waktu yang telah ditentukan, penggugat tidak datang menghadap meski sudah dipanggil secara patut dan juga tidak mneguasai kepada orang lain untuk menghadap, maka gugatan dianggap gugur, namun tidak mengurangi hak penggugat untuk mengajukan gugatan baru (pasal 124 HIR dan 148 R. Bg) sebaliknya jika tergugat tidak menghadap meski sudah dipanggil secara patut dan tidak menguasai kepada orang lain untuk

¹²⁵Prosedur permohonan sama dengan prosedur gugatan dan setiap perkara sudah harus diputus paling lama dalam waktu 6 bulan, kecuali jika menurut hukum acara tidak memungkinkan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 57

menghadap, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan luar hadir tergugat (verstek), kecuali bila gugatan melawan hak atau tidak beralasan.¹²⁶

Mekanisme pemeriksaan perkara perdata peradilan agama yang dilakukan di depan sidang Pengadilan secara sistematis harus melalui beberapa tahap berikut ini:

1) Melakukan perdamaian

Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/tergugat. Hakim harus bersifat aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak.¹²⁷ Jika upaya perdamaian dapat dilakukan oleh hakim, maka harus dibuat akta perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dan dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian itu. Sebab suatu akta perdamaian secara hukum tetap dianggap mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

2) Pembacaan Surat Gugatan

Pada tahap ini pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan hukum dan petitum) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang menjadi acuan (obyek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.¹²⁸

¹²⁶Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 139.

¹²⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 85.

¹²⁸Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h.161.

Dalam pembacaan gugatan, penggugat bisa saja mencabut gugatannya atau merubah gugatan. Gugatan dapat dirubah dalam pemeriksaan perkara, sepanjang tidak merubah atau menambah petitum (tuntutan pokok).¹²⁹

3) Jawaban Tergugat

Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat melalui majelis hakim dalam persidangan. Jawaban tergugat dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan, jawaban dapat berupa:

- (1) Pengakuan yakni memberikan isi gugatan, sebagian atau seluruhnya.
- (2) Bantahan yakni sangkalan terhadap pokok perkara.
- (3) Reverte atau menyerahkan pada kebijaksanaan hakim, tidak membantah dan tidak pula membenarkan.
- (4) Eksepsi (tangkisan) yakni sanggahan terhadap suatu gugatan atau perlawanan yang tidak mengenai pokok perkara.¹³⁰

4) Replik Penggugat

Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat, bahkan penggugat bisa menyampaikan dalil-dalil tambahan untuk menguatkan dalil dalam gugatan sebelumnya.¹³¹

5) Duplik Tergugat

¹²⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 99.

¹³⁰Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 141.

¹³¹Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata "Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*, h.162.

Tergugat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

6) Pembuktian

Penggugat mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugatan. Demikian juga tergugat mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.

Pembuktian ini untuk menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang disampaikan kedua belah pihak, sebelum hakim mengambil keputusan. Hal ini seperti ketentuan dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg yang menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa pihak yang mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain. Menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tertentu.¹³²

7) Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan (*konklusi*) baik pihak penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat sebagai kata akhir dalam proses pemeriksaan, kesimpulan tersebut sesuai dengan pandangan masing-masing pihak dan disampaikan secara singkat.

8) Tahap Putusan Hakim atau Penetapan Hakim

Putusan hakim¹³³ mempunyai kekuatan yang mengikat kedua belah pihak, juga mempunyai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian ini dalam arti biasa dipergunakan untuk alat bukti mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya.

¹³² M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005), h. 35

¹³³ Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan dan mengakhiri perkara antara para pihak. Produk hakim dari hasil pemeriksaan di persidangan ada tiga macam, yaitu putusan, penetapan, dan akata perdamaian. Disamping itu terdapat produk putusan Pengadilan Agama lain yang bukan merupakan produk

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam pemeriksaan, maka pada tahap akhir yang ditunggu-tunggu kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat adalah adanya putusan atau penetapan. Pada tahapan ini hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum (berdasar pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses penyelesaian perkara cerai gugat menurut Undang-undang di Pengadilan Agama harus melalui beberapa tahapan di mulai dari tahapan perdamaian hingga tahapan putusan atau penetapan hakim. Adapun setelah putusan hakim, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, masih dapat menempuh langkah atau upaya hukum yang dapat dilakukan, seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali, ketiganya tidak memerlukan kehadiran pihak-pihak yang berperkara karena proses ini merupakan tahapan pemeriksaan ulang terhadap berkas-berkas dan putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama tingkat pertama, untuk menyesuaikan ketentuan hukum, baik formil maupun materiil.

F. Kerangka Konseptual

Perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Perkawinan diharapkan berlangsung abadi seumur hidup untuk membina suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* atau hidup bahagia dan harmonis antara suami istri dan anak-anaknya.¹³⁴

persidangan tetapi memiliki kekuatan hukum sebagaimana akta otentik yaitu akta komparasi dan akta keahliwarisan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 251.

¹³⁴Hasbi Indra, et al, *Potret Wanita Shalehah*, h. 221

Namun dalam kenyataannya untuk membina suatu perkawinan yang bahagia tidak mudah, bahkan sering kehidupan perkawinan kandas di tengah jalan. Bukannya kebahagiaan atau ketenangan yang didapati di dalam rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran.

Bukan kecocokan yang terjadi antara suami istri, melainkan semakin menonjolnya perbedaan satu sama lain. Tidak sedikit pasangan muda atau setelah memiliki anak kemudian berpisah, karena tidak menemukan kecocokan lagi dengan pasangannya, sehingga akhirnya rumah tangga menjadi berantakan dan mereka bercerai.¹³⁵

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah swt. bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah swt. menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tak mungkin dihindarkan.

Perceraian merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh bila mana tali perkawinan memang benar-benar sudah tidak dapat diperta-

¹³⁵Hasbi Indra, et al, *Potret Wanita Shalehah*,h. 221.

hankan lagi, tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat. Hal ini pun mendapat legitimasi baik oleh Al-Qur'an maupun Hadis Rasulullah saw.

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan cerai gugat, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Berangkat dari penjelasan pengertian cerai gugat seperti yang disebutkan oleh Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam cukup jelas bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Perceraian tidak akan terjadi bila berbagai problem rumah tangga dan keluarga bisa diatasi dengan penuh bijaksana, seperti masalah ekonomi (keuangan, kejujuran, krisis cinta dan perselingkuhan). Karena dalam rumah tangga siapapun akan mengalami berbagai problem baik yang berupa faktor internal maupun eksternal, berat atau kecil, yang menyebabkan ketidakharmonisan berupa pertengkaran dan perbedaan satu sama lain.

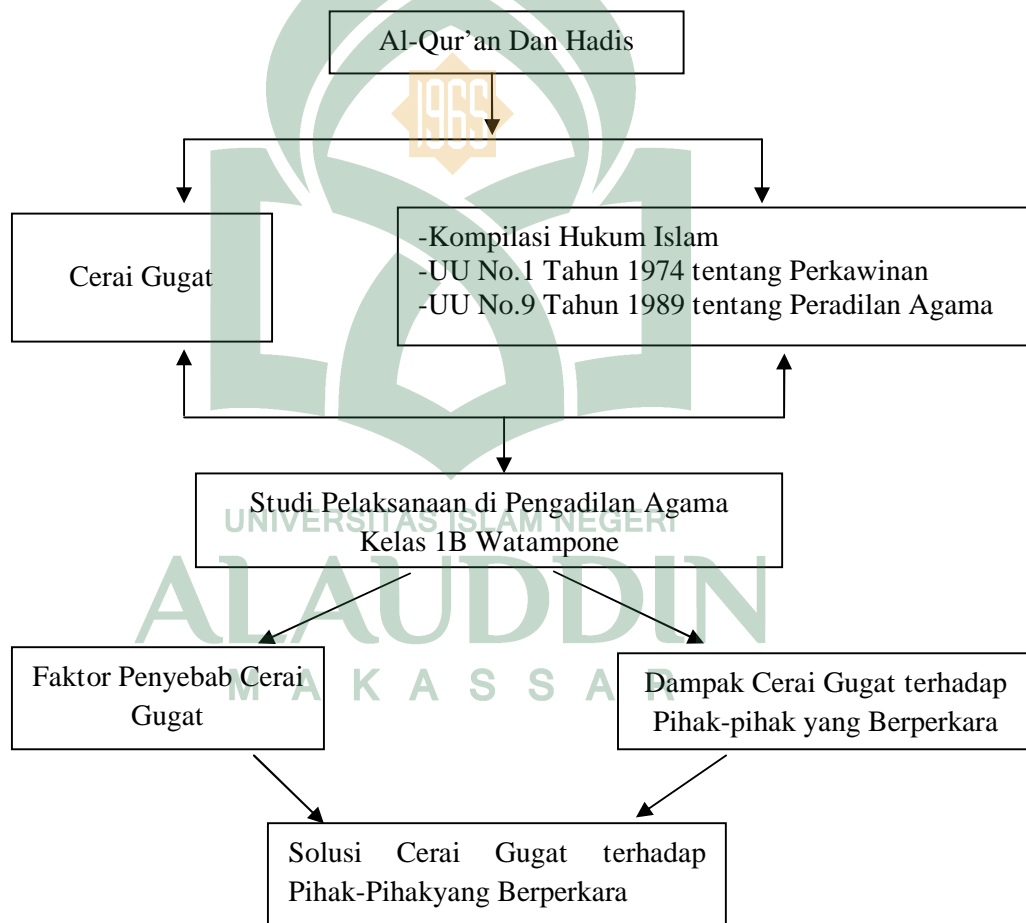
Ketidakmampuan dalam menyelesaikan problem yang menimpa keluarga, lebih dipengaruhi karena kurang matangnya sikap dan pribadi masing-masing, sikap egoisme yang berlebihan serta tidak mau menerima saran dari pihak lain (orang tua).

Perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal namun, tidak disukai Tuhan karena memiliki dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya. Dampak tersebut antara lain secara psikologis, moral, sosial dan ekonomis.

Untuk mengurangi dampak negatif dari aspek ekonomis atau finansial inilah, peraturan peundang-undangan yang berlaku menegaskan orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan

anak. Sedangkan dari sudut moral, para hakim atau majelis hakim berkewajiban mendapatkan dan menegakkan kebenaran materil melalui produk keputusannya. Ada ungkapan yang populer dikalangan ahli hukum bahwa putusan hakim tidak akan bisa merubah hakikat peristiwa yang pernah terjadi dan hakim harus menegakkan kebenaran baik secara formil maupun materil, dalam memutuskan setiap perkara, tanpa dipengaruhi (di intervensi) oleh pihak manapun.

BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone

Keberadaan Pengadilan Agama Watampone yang selama ini berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempunyai wilayah hukum (yurisdiksi) yang sama dengan Pengadilan Negeri Watampone. Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone tersebut berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan, 333 Desa dan 39 Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebesar 705.717 jiwa terdiri dari :

) Laki-Laki	:322.724	Orang
) Perempuan	:382.993	Orang
Jumlah Penduduk Menurut Agama		
) Islam	: 701.045	Orang
) Kristen Protestan	: 2.961	Orang
) Kristen Katolik	: 543	Orang
) Hindu	: 598	Orang
) Budha	: 570	Orang

Pengadilan Agama Watampone dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki wilayah yurisdiksi. Wilayah yuridiksi disini adalah wilayah hukum tertentu, biasanya disebut *yurisdiksi relatif* tertentu yang merupakan wewenang suatu pengadilan, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.¹

Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, sebagaimana pengadilan agama di daerah lainnya, merupakan suatu lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991), h. 26.

orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah menegakkan hukum untuk mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan suasana prikehidupan yang aman dan tenteram.²

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 *Vide Instelling Besluit*, Menteri Agama dan juga memenuhi *Mission* Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Ketua Pengadilan Agama Watampone yang pertama adalah K.H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut:

1. H. Muh. Yusuf Hamid
2. H. Abd. Hamid Djabbar
3. H. Hamsah Mappa
4. H. Muh. Said Syamsuddin

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor: B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, yang pada saat itu berkantor di sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun, yakni pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah Kantor milik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe dan pada saat itu pula diresmikan gedung baru Pengadilan

²Tim Redaksi, *Mimbar Hukum* No. 30 Thn. VIII 1997, Edisi Januari-Februari (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997), h. 5.

Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama. Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso Nomor 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini pada tahun 2014 memiliki personil 50 orang.

Selanjutnya mengenai ketenagaan Pengadilan Agama Watampone, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Watampone

N o	Nama	Golongan Terakhir	Pendidikan Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	K.H. Abdullah Syamsuri	III/a	Mad.	1958 s.d. 1979
2.	K.H. Abdul Hamid Djabbar	III/a	SLTA	1979 s.d. 1985
3.	Drs. H. Hamdan, SH.	IV/a	S.1	1985 s.d. 1992
4.	Drs. M. Ihsan Yusuf	IV/a	S.1	1992 s.d. 1997
5.	Drs. H. Muslimin Simar, SH., MH.	IV/c	S.2	1997 s.d. 2004
6.	Drs. H. Abuhuraerah, SH., MH.	IV/c	S.2	2004 s.d. 2008
7.	Drs. H. Muhammad Yanas, SH., MH.	IV/b	S.2	2008 s.d. 2010
8.	Drs. Muh. Husain Shaleh, SH.	IV/b	S.1	2010 s.d. 2014
9.	Drs. H. M. Yuzar Husein., MH.	IV/c	S.2	2014 s.d skrg

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama berdirinya Pengadilan Agama Watampone yang dulunya bernama Mahkamah Syariah Watampone mulai tahun 1958 sampai sekarang tahun 2014 sudah dipimpin oleh sembilan orang ketua, yang dibantu oleh wakil ketua sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel. 2
Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone³

³Sumber data: Arsip Dokumentasi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone

N o	Nama	Golongan Terakhir	Pendidika n Terakhir	Tahun Menduduki Jabatan
1.	Drs. M. Amin Abbas	III/d	S.1	1997 s.d. 2002
2.	Drs. Muh. Abduh Sulaeman, MH.	III/d	S.2	2002 s.d. 2004
3.	Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, SH.	IV/a	S.1	2004 s.d. 2007
4.	Drs. H. Suudi Azhari, LS	IV/a	S.1	2009 s.d.2009
5.	Drs. Bahrul Amzah, MH.	IV/b	S.2	2009 s.d. 2011
6.	Drs. Alimuddin Rahim, SH., MH.	IV/c	S.2	2011 s.d. 2014
7.	Drs. Usman, SH., MH.	IV/c	S.2	2014 s.d. skrg

Untuk pelayanan terhadap masyarakat di bidang hukum dan hal-hal yang terkait dengannya, Pengadilan Agama memiliki 54 orang personil yang terdiri dari Hakim, Panitera/ Sekretaris, panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pegawai/Staf dan dibantu oleh beberapa honorer, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3

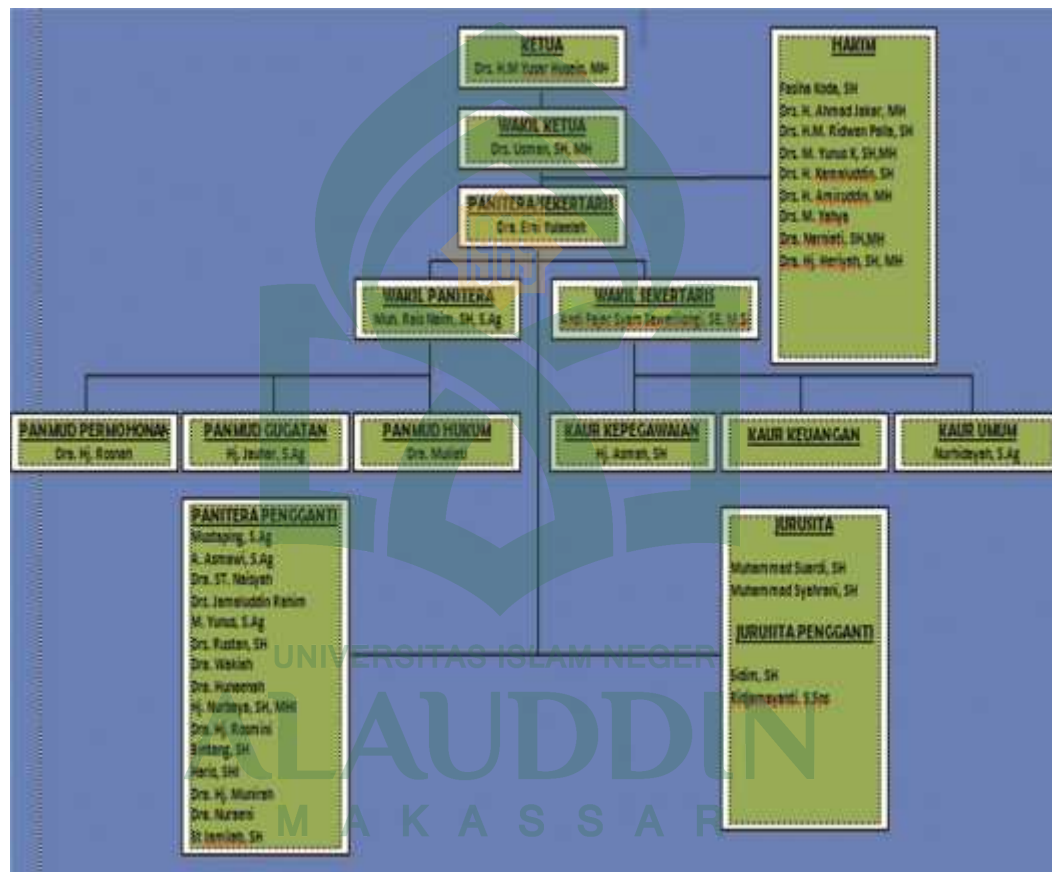
Daftar Jumlah Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural, Pegawai / Staf dan Honorer

	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Hakim	8	3	11	
2.	Panitera/Sekretaris	-	1	1	
3.	Panitera Pengganti	8	9	17	
4.	Jurusita	2	-	2	
5.	Jurusita Pengganti	2	-	2	
6.	Pejabat Struktural	1	2	3	
7.	Pegawai/Staf	-	1	1	
8.	Honorer	8	5	13	
Jumlah		29	21	50	

Dari tabel tersebut di atas, sudah tergambar mengenai keadaan pegawai, mulai dari hakim sampai dengan staf di Kantor Pengadilan Agama Watampone.

Namun untuk lebih jelas lagi mengenai jalur struktural kepegawaian di lingkup Kantor Pengadilan Agama Watampone, dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE



Seperti yang telah dikemukakan, bahwa Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴

Di samping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum / perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006- KMA Nomor: KMA/080/VII/2006).
- c. Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA, Nomor: KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administrasi yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan, dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomo: KMA/080/VIII/2006).

⁴Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

- f. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian *ruk'iyah al-hilal* dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Watampone sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, Pengadilan Agama Watampone memiliki visi dan misi. Visi yang dimaksud adalah “terwujudnya sumber daya institusi Pengadilan Agama Watampone yang profesional dan bermoral”. Sedangkan misi Pengadilan Agama Watampone adalah:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya peradilan

Hal ini mengandung makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bebas mandiri, profesional dan bermoral maka pelaksanaan proses peradilan yang prima merupakan langkah antisipatif terhadap era reformasi hukum yang selalu menganggap bahwa proses ke pengadilan akan selalu lama dan berbelit-belit, dengan misi tersebut yang mengedepankan pelayanan yang prima sehingga terpenuhi asas yang cepat, sederhana, dan biaya yang ringan.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan

Hal tersebut mengandung makna bahwa dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi Pejabat, Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, Kejurusitaan harus senantiasa ditingkatkan. Ujung tombak dalam penegakan hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada di tangan hakim. Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparatur peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan tetap mendapat perhatian

peningkatan sumber daya, karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparat.

Melihat dari segi keadaan perkara baik yang diterima maupun diputus di Pengadilan Agama Watampone khususnya pada tahun 2010 sampai 2012 adalah sebagai berikut:

a. Tahun 2010

Perkara yang diterima Januari sampai Desember Tahun 2010 sebanyak 1.009 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 4
Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2010

Nomor	Bulan	Itsbat Nikah	Dispensi Kawin	Cerai Talak	Cerai Gugat	Kewarisan	P3HP Ahli Waris	Lain-lain
1.	Januari	8	1	17	55	3	4	1
2.	Februari	8		11	50		4	
3.	Maret	8	2	18	47	1	4	
4.	April	8		14	63		2	3
5.	Mei	4	1	19	51	1	3	1
6.	Juni	18	1	15	55	1	8	
7.	Juli	8		13	56		5	1
8.	Agustus	3		11	27		1	
9.	September	4	1	22	56		4	1
10.	Oktober	7	1	13	53	1		1
11.	November	5	3	26	63	1	5	1
12.	Desember	7	3	17	73	1	2	3

Banyak perkara	88	13	196	649	9	42	12
Jumlah Perkara		1.009 Perkara⁵					

Adapun perkara yang diputus Januari s/d Desember Tahun 2010 sebanyak 956 perkara.

Tabel. 5

Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2010

No mor	Bulan	Itibat Nikah	Dispensi kawin	Cerai talak	Cerai Gugat	Kewarisan	P3PH	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Dicabut
1.	Januari	3		12	42		1	2		2	3
2.	Februari	7	1	18	56		2	1	1	3	4
3.	Maret	11		19	63	2	5	3	1	4	5
4.	April	5	2	7	37		4	2		2	3
5.	Mei	8		10	32		3	4			10
6.	Juni	3	1	14	44	1	2	7		2	6
7.	Juli	23		15	39	1	5	2			2
8.	Agustus	6		13	59		3	2		3	5
9.	September	2	1	10	33		2	4	1		4
10.	Oktober	7		10	33			2		3	1
11.	November	6	1	16	49		4	1	1	1	6
12.	Desember	7	1	20	59	1	5	3			5
Banyak Perkara		88	8	164	546	5	36	33	4	20	54
Jumlah		958 Perkara⁶									

⁵Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2010

⁶Sumber Data, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone, 2010.

Dari data yang terdapat pada table di atas, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2010 Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone menerima perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) sebanyak 649 perkara, namun perkara yang diputus hanya ada 546 perkara berarti ada sebanyak 103 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur dan bahkan ditolak. Selanjutnya perkara cerai talak (perceraian yang diajukan pihak suami) sebanyak 196 perkara namun perkara yang diputus hanya ada 164 perkara berarti ada sebanyak 32 perkara yang memiliki keterangan dicabut, gugur dan bahkan ditolak.

Prosentase cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dibanding cerai talak cenderung meningkat, baik perkara yang diterima maupun perkara yang diputus. Cerai gugat mencapai 332, 9 % dibanding cerai talak.⁷ Hal ini berarti cerai gugat yang diajukan pihak istri lebih banyak atau rata-rata prosentase setiap tahun mengalami peningkatan.

Untuk perkara lain-lain, diperoleh keterangan pada tahun 2010 tiga perkara permohonan terbanyak adalah itsbat nikah sebanyak 88 perkara yang diterima dan bahkan putus sebanyak 88 perkara, P3HP sebanyak 42 perkara yang diterima namun perkara yang diputus ada sebanyak 36 perkara, dan dispensasi kawin sebanyak 13 perkara yang diterima namun yang diputus ada sebanyak 8 perkara.

b. Tahun 2011

Perkara yang diterima Januari sampai Desember Tahun 2011 sebanyak 1.259 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 6

⁷Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase cerai gugat dibandingkan cerai talak adalah jumlah cerai gugat yang diputus dibagi dengan jumlah cerai talak yang diputus. Hasil pembagian tersebut dikali 100 sehingga diperoleh jumlah prosentase cerai gugat dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah cerai gugat yang diputus}}{\text{jumlah cerai talak yang diputus}} \times 100 = \dots \% \quad (\text{cerai gugat})$$

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2011

Nomor	Bulan	Itsbat Nikah	Dispensa si Kawin	Cerai Talak	Cerai Gugat	Kewaris an	P3HP Ahli Waris	Lain-lain
1	Januari	8	1	27	86	2	6	1
2	Februari	5	4	18	67		10	1
3	Maret	5	3	25	81		4	4
4	April	9	1	24	60		4	2
5	Mei	6	4	21	61	1	1	
6	Juni	8		20	69	1	2	7
7	Juli	5	1	25	52		2	5
8	Agustus	5		11	26		4	2
9	September	2	4	29	76		3	
10	Oktober	8	2	28	100		3	
11	November	5	9	33	69		3	1
12	Desember	3	2	19	53	1	7	2
Banyak perkara		69	31	280	800	5	49	25
Jumlah Perkara		1.259 Perkara⁸						

Adapun perkara yang diputus Januari s/d Desember Tahun 2011 sebanyak 1.220 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 7
Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Sulawesi
Selatan Januari s/d Desember 2011

⁸Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2011

No mor	Bulan	Itsbat Nikah	Dispensi kawin	Cerai talak	Cerai Gugat	Kewarisan	P3PH	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Dicabut
1.	Januari	5	2	18	37		5	5	1	1	9
2.	Februari	7	3	11	50		5	4		5	5
3.	Maret	4	2	18	73	1	8	1		3	8
4.	April	11	2	23	86	1	4	12		1	7
5.	Mei	2	1	22	61	1	1	1	1	2	6
6.	Juni	6	2	14	49		2	8		1	10
7.	Juli	9	1	20	62		2	8		4	11
8.	Agustus	3		11	32		1	3		1	7
9.	September	4	2	14	53		6	2	1	2	4
10.	Oktober	5	2	22	52		3	1	2	5	8
11.	November	4	10	19	73		3	2	1	6	5
12.	Desember	7	4	27	50		7	2		2	8
Banyak Perkara		67	31	219	678	3	47	49	5	33	88
Jumlah		1.220 Perkara⁹									

Keadaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya perkara perceraian. Perkara yang terbanyak adalah perkara cerai gugat, jumlah perkara yang diterima pada tahun 2011 adalah sebanyak 800 perkara, namun perkara yang diputus sebanyak 678 perkara berarti ada 122 perkara cerai gugat yang memiliki keterangan dicabut, dicoret dari register, tidak diterima, gugur dan ditolak. Selanjutnya jumlah perkara

⁹Sumber Data, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2011.

cerai talak yang diterima pada tahun 2011 sebanyak 280 perkara, namun jumlah perkara yang diputus sebanyak 219 berarti 61 perkara cerai talak yang memiliki keterangan dicabut, dicoret dari register, tidak diterima, gugur dan ditolak. Prosentase cerai gugat pada tahun 2011 lebih banyak dibanding cerai talak, hingga mencapai prosentase 309,5 % dibanding cerai talak.

Untuk perkara lain-lain, diperoleh keterangan tiga perkara permohonan terbanyak adalah itsbat nikah sebanyak 69 perkara yang diterima sekaligus perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, jumlah perkara P3PH yang diterima sebanyak 49 perkara namun yang jumlah perkara diputus sebanyak 47 perkara, dan jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima sekaligus diputus sebanyak 31 perkara pada tahun 2011.

c. Tahun 2012

Perkara yang diterima Januari sampai Desember Tahun 2012 sebanyak 1.472 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 8

Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2012

Nomor	Bulan	Itsbat Nikah	Dispensa si Kawin	Cerai Talak	Cerai Gugat	Kewaris an	P3HP Ahli Waris	Lain-lain
1	Januari	15	7	37	109	0	3	5
2	Februari	11	1	21	60	0	7	0
3	Maret	9	7	29	73	0	3	0
4	April	5	1	24	76	0	3	1
5	Mei	10	1	20	65	0	1	0
6	Juni	6	6	23	71	4	5	2

7	Juli	2	2	20	63	0	1	1
8	Agustus	4	1	22	41	0	3	0
9	September	11	6	40	102	0	3	1
10	Oktober	9	10	29	92	1	6	1
11	November	14	18	38	110	1	3	2
12	Desember	12	12	20	44	2	4	0
Banyak perkara		108	72	323	906	8	42	13
Jumlah Perkara		1.472 Perkara¹⁰						

Perkara yang diputus Januari s/d Desember Tahun 2012 sebanyak 1.548 perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 9
Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Sulawesi Selatan Januari s/d Desember 2012

No mor	Bulan	It'sbat Nikah	Dispensa si kawin	Cerai talak	Cerai Gugat	Kewaris an	P3PH	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Dicabut
1.	Januari	14	4	16	56	0	3	3	0	0	9
2.	Februari	6	4	25	82	0	4	2	0	5	5
3.	Maret	3	4	26	75	0	4	0	1	5	5
4.	April	6	3	16	81	0	3	6	1	6	8
5.	Mei	6	1	33	75	0	1	0	4	5	6
6.	Juni	7	2	17	72	0	1	6	4	2	4

¹⁰Sumber Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2012

7.	Juli	7	6	21	61	0	4	1	1	5	13
8.	Agustus	2	1	9	69	0	1	3	3	3	4
9.	September	3	4	27	56	0	5	6	3	1	2
10.	Oktober	12	9	28	94	1	4	3	4	4	4
11.	November	7	14	23	73	0	3	4	1	9	9
12.	Desember	16	16	36	86	1	6	5	2	9	7
Banyak Perkara		89	68	277	880	2	39	39	24	54	76
Jumlah		1.548 Perkara¹¹									

Dari data yang terdapat pada tabel di atas, terbukti bahwa perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang dikenal dengan cerai gugat jauh lebih besar dibandingkan perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Prosentase cerai gugat dibanding cerai talak cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 jumlah perkara cerai gugat yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone sebanyak 906 perkara namun yang jumlah perkara yang diputus pada tahun 2012 sebanyak 880 perkara, sedangkan jumlah perkara cerai talak yang diterima sebanyak 323 perkara namun jumlah perkara yang diputus sebanyak 277 perkara. Prosentase perkara cerai gugat mencapai 317, 6% dibanding perkara yang diajukan suami.

Untuk perkara-perkara yang lain pada umumnya didominasi oleh perkara itsbat nikah yang setiap tahun cenderung meningkat di wilayah Kabupaten Bone. Jumlah itsbat nikah sebanyak 106 perkara yang diterima namun yang perkara yang diputus sebanyak 89 perkara, jumlah perkara dispensasi kawin yang diterima sebanyak 72 perkara namun jumlah perkara yang diputus sebanyak 68 perkara,

¹¹Sumber Data, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, 2012.

sedangkan jumlah perkara P3PH yang diterima di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone sebanyak 42 perkara namun jumlah perkara yang diputus hanya mencapai 39 perkara.

Keadaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik untuk perkara perkawinan maupun mengenai penetapan ahli waris. Hal ini terbukti dari kasus-kasus yang diajukan oleh para pencari keadilan mengenai perkara perkawinan maupun kewarisan selama 3 tahun terakhir ini, jumlah perkara lebih banyak diterima bahkan diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dengan segala pertimbangan yang ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel peristiwa cerai talak dan cerai gugat yang diterima oleh Kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone maupun yang telah diputus perkaranya mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut:

Tabel. 10
Data Peristiwa Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012

No	Tahun	Jenis Peristiwa			
		Cerai Talak		Cerai Gugat	
		Diterima	Diputus	Diterima	Diputus
1.	2010	196	164	649	546
2.	2011	280	219	800	678
3.	2012	323	277	906	880

Dari tabel tersebut di atas, didapati bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Bone masih terus meningkat, penulis mengambil data kasus perceraian mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 khusus menyangkut cerai gugat.

Data di atas menjelaskan bahwa perkara cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan peristiwa cerai talak, hal ini menunjukkan bahwa kasus cerai gugat yang diajukan pihak istri menandakan banyaknya terjadi karena pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami sehingga pihak istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, yang disebut dengan cerai gugat selama tiga tahun (2010-2012) di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone mengalami peningkatan sebanyak 2.355 perkara, sedangkan perkara yang diajukan oleh suami sebanyak 799 perkara. Prosentase cerai gugat lebih besar 294,7 % dibanding dengan cerai talak.

Adapun alasan perceraian yang paling banyak adalah cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Menurut Drs. Usman¹² sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa cerai gugat lebih banyak dibanding cerai talak karena pada saat ini pihak istri telah menyadari akan hak dan kewajibannya dalam perkawinan sehingga apabila tidak sesuai dengan kenyataannya maka akan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.¹³ Sedangkan menurut H. Kamaluddin menyatakan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak karena pihak suami takut mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama Watampone karena takut untuk di tuntutan nafkah iddah, dan nafkah Mut'ah dari pihak istri apabila permohonannya dikabulkan.

¹² H. Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 10 Maret 2014.

¹³ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014

Hal senada yang diungkapkan oleh Hj. Heriyah bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak karena masyarakat memahami bahwa cerai gugat lebih cepat penyelesaiannya di Pengadilan Agama daripada cerai talak.¹⁴

Sedangkan menurut H. Ahmad Jakar mengatakan bahwa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone karena dengan alasan bahwa suami tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan hal ini sebagaimana tercantum dalam sighat taklik talak serta adanya pelanggaran akan hak dan kewajiban dalam perkawinan seperti suami nusyuz terhadap istrinya sehingga diakhiri dengan jalan cerai gugat di Pengadilan Agama.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa cerai gugat lebih banyak di Pengadilan Agama dibandingkan dengan cerai talak karena istri telah menyadari hak dan kewajiban dalam rumah tangga maka apabila tidak teralisasi dengan baik maka akan mengajukan gugatan di Pengadilan dengan berbagai alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan lebih memudahkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama apabila seorang istri yang mengajukan gugatan tanpa harus dibebani nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Bahkan dalam perkara cerai yang diajukan istri terhadap suami didasari dengan alasan bahwa suami telah melanggar sighat taklik talak dan tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B

Watampone

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang damai dan abadi, tanpa dibatasi oleh waktu kecuali dengan meninggalkannya salah

¹⁴Hj. Heriyah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

¹⁵ H. Ahmad Jakar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

satu dari suami istri. Kelestarian serta kelanggengan tali perkawinan adalah salah satu yang sangat prinsip dalam perkawinan, dalam rangka membina rumah tangga yang tentram, sehingga kesinambungan pendidikan anak turunan dapat berlangsung dengan baik.

Berpegang kepada kerangka pemikiran ini, maka cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.

Jika sebuah rumah tangga yang di dalamnya terjadi perkecokan yang berkepanjangan, maka dalam diri suami/istri terdapat dua hal yang bertentangan. Pertama, bahaya cekcok yang berkepanjangan dalam rumah tangga, ini jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu dalam rangka mencapai *sakinah* (ketenteraman), dan kedua, bahaya cerai yang juga bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dalam kondisi demikian, jika bahaya cerai lebih ringan dibandingkan dengan cekcok berkepanjangan, maka seseorang dibolehkan bercerai demi menghindari dari bahaya yang lebih besar. Sebaliknya, jika menurut pertimbangan bahaya cerai gugat lebih besar daripada cekcok rumah tangga karena masih dapat didamaikan, maka cerai gugat tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian syari'at Islam bertujuan untuk memperkecil jumlah cerai gugat jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam, cerai hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian.

Pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengabulkan permintaan cerai gugat istri terhadap suaminya dalam kasus-kasus tertentu dan dibenarkan oleh syara. Bahkan menurut Hj. Heriyah, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone mengatakan bahwa perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone yaitu karena permintaan istri yang disebabkan karena kasus yang mengandung unsur KDRT, misalnya pernah dipukul, ditinggalkan, tidak diberi nafkah lahir dan batin.¹⁶ ditambahkan oleh Fasiha Koda juga salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, rata-rata perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone diawali dengan perselisihan dan pertengkaran, yang sudah barang tentu pada pertengkaran tersebut terungkap kata-kata yang sangat menyakitkan hati kemudian diakhiri dengan tindakan meninggalkan pihak istri tanpa memberikan nafkah.¹⁷

Sebagai dasar pengambilan data kasus perceraian khususnya cerai gugat perspektif hukum Islam, penulis mengacu pada data peristiwa cerai tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 11
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone

¹⁶Hj. Heriyah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

¹⁷Fasiha Koda, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 6 Maret 2014.

No	Penyebab	Tahun			Jumlah
		2010	2011	2012	
1	MORAL				
	1)Poligami yang tidak sehat	-	2	-	2
	2)Krisis Akhlak	64	59	73	196
	3)Cemburu	25	-	222	247
2	MENINGGALKAN KEWAJIBAN				
	1)Kawin paksa	50	120	4	174
	2)Ekonomi	256	152	304	712
	3)Tidak ada tanggung jawab	110	123	157	390
3	KAWIN DI BAWAH UMUR	20	30	-	50
4	MENYAKITI				
	1)Kekejaman jasmani	36	17	27	80
	2)Kekejaman mental	10	21	-	31
5	DIHUKUM	7	9	-	16
6	CACAT BIOLOGIS	10	4	-	14
7	TERUS MENERUS				
	1)Politis	5	2	-	7
	2)Gangguan pihak ketiga	80	50	73	203
	3)Tidak ada keharmonisan	172	198	206	576
	LAIN-LAIN	-	110	-	-
	JUMLAH	845	897	1.066	2.698

Pada tabel di atas secara jelas dicantumkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian, menurut data dari Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2010 berjumlah 845 perkara dan yang paling banyak karena faktor ekonomi (256) perkara dan faktor tidak ada keharmonisan (172) perkara. Pada tahun 2011 berjumlah 897 perkara dan yang paling dominan karena faktor tidak ada keharmonisan (198) perkara dan faktor ekonomi (152) perkara. Sedangkan pada tahun 2012 berjumlah 1.066 perkara yang paling dominan yaitu faktor ekonomi (304) perkara, dan faktor karena memiliki rasa cemburu (222) perkara serta faktor karena tidak ada keharmonisan (206) perkara.

Faktor-faktor di atas menjadi penyebab-penyebab perceraian masyarakat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Hal ini bukan berarti bahwa penyebab terjadinya perceraian dalam realitas kehidupan masyarakat muslim hanya terbatas pada sejumlah faktor di atas, namun kemungkinan untuk bertambah masih sangat terbuka. Hal ini tentu saja disebabkan bahwa setiap daerah memiliki situasi dan kondisi, serta problematika yang dihadapi masing-masing mempunyai kesamaan juga perbedaan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping itu perkembangan disegala aspek kehidupan manusia setiap tahunnya, tentu saja ikut menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru yang bisa mengganggu keharmonisan sebuah ikatan pasangan suami istri. Untuk itu adapun batasan dari faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone antara lain:

a. Faktor moral yang meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Poligami yang tidak sehat mempunyai batasan bahwa perkawinan yang tidak mempunyai izin dari istri dan tidak tercatat, sekalipun ada izin namun tidak tercatat juga termasuk dalam faktor ini.
- 2) Krisis ahklak yang dimaksud bahwa suami mempunyai kelakuan dan budi pekerti yang jelek terhadap istri dan keluarga, bahkan sering melakukan perjudian, minum-minuman keras hingga mabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- 3) Faktor cemburu yaitu pada awalnya salah satu pasangan baik itu suami maupun istri memiliki sikap cemburu terhadap pasangannya hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangganya, terlebih suami sampai menyakiti istri dengan kekerasan karena cemburu.

- b. Faktor meninggalkan kewajiban salah satu pasangan suami istri terbagi atas 3 hal yaitu:
- 1) Kawin paksa yaitu pada awalnya dilihat dari sebelum pernikahan, pernikahan yang berlangsung antara kedua belah pihak karena kemauan orang tua. Karena setelah pernikahan tidak ada kata paksaan.
 - 2) Faktor ekonomi yaitu suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada istrinya (pemenuhan kebutuhan material) dan hal ini sesuai dengan sighth taklik talak.
 - 3) Tidak ada tanggung jawab yaitu suami tidak memenuhi kebutuhan istri secara umum baik material maupun lahiriah, suami memiliki uang tetapi enggah memberikan nafkah kepada istrinya, tidak pernah memberikan perhatian kepada istri dan tidak memberikan tempat kediaman kepada keluarganya.
- c. Kawin dibawah umur yaitu pernikahan yang terjadi pada usia dini memicu terjadinya perceraian karena pola pikir diantara keduanya masih dalam tahapan yang labil, apalagi tanpa dibarengi dengan bimbingan dari orang tua atau keluarga kedua belah pihak.
- d. Faktor menyakiti salah satu pasangan dalam rumah tangga menjadi penyebab terjadinya perceraian antara lain:¹⁸
- 1) Kekejaman jasmani yaitu suami sering menyakiti fisik istri atau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
 - 2) Kekejaman mental yaitu suami menyakiti mental istri dengan memplihatkan perselingkuhannya dengan perempuan lain (nafkah batin) dan hal ini juga termuat dalam sighth taklik talak.

¹⁸ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 19 Juni 2014

- e. Dihukum yaitu jika selama suami dipenjara atau ditahan, diputuskan berat hukumannya, sementara istri memandang tidak akan kuat mengekang dirinya, maka ia boleh mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
- f. Cacat biologis yaitu seluruh cacat yang di derita pihak suami misalnya impoten, harus melalui pemeriksaan dari dokter sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama.
- g. Faktor yang terus menerus terjadi antara pasangan suami istri dalam rumah tangga antara lain:
 - 1) Gangguan pihak ketiga yaitu suami/istri melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain.
 - 2) Tidak ada keharmonisan yaitu percekcoan dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara pasangan suami istri dari awal pernikahan dan biasa disebut *syiqaq*. Dalam hal ini saksi yang dibutuhkan adalah pihak keluarga terdekat.
 - 3) Politis yaitu pada awal pernikahan antara suami dan istri telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun setelah itu salah satu pihak meminta cerai dan pihak suami meminta kembali uang belanja dan maharnya karena politisi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, lemah syahwat, gangguan pihak ketiga dan tidak ada tanggung jawab.

Dalam memutuskan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone hakim tidak hanya mengacu pada salah satu faktor penyebab perceraian yang diajukan pihak penggugat namun disatu sisi hakim memutuskan perkara karena ada kesinambungan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya.

Dengan adanya faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat dijadikan alasan perceraian dan merupakan barometer bagi hakim untuk menjatuhkan vonis cerai gugat atau cerai talak di Pengadilan. Menurut H. Kamaluddin¹⁹ faktor-faktor yang menyebabkan istri meminta cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone disebabkan oleh faktor tidak ada tanggung jawab, adanya gangguan pihak ketiga, KDRT, dan ekonomi tetapi lebih didominasi oleh faktor ekonomi dengan alasan bahwa seorang istri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya apabila faktor ekonomi tidak dipenuhi, hal ini disebabkan karena suami tidak punya penghasilan tetap, sehingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak dapat terpenuhi.

Faktor penyebab yang sering diajukan penggugat menurut H. Ahmad Jakar adalah antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus atau ditinggalkan oleh suami pergi merantau tanpa memberikan nafkah dan juga adanya gangguan pihak ketiga.²⁰ Sementara menurut Drs. Usman mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat boleh dikatakan rata-rata atau didominasi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena pada umumnya diawali dengan perselisihan dan pertengkaran. Meskipun pada akhirnya ada yang cerai dengan alasan yang ditinggalkan tetapi sebelum ditinggalkan biasanya sudah terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Dan sudah dipastikan bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut mengandung unsur kekerasan jika tidak sampai melukai fisik paling tidak korban mengalami kekerasan psikis terutama istri.²¹

¹⁹ H. Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 10 Maret 2014.

²⁰ H. Ahmad Jakar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

²¹ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014

Oleh karena itu, untuk menilai sebuah faktor atau alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar cerai gugat menurut hukum Islam ialah dengan menemukan jawaban apakah salah satu atau kedua belah pihak, “tidak mau” lagi hidup bersama menjalani ikatan suami istri tersebut. Kondisi ini disebut dalam Islam dengan istilah syikak atau perceraian psikologis, yang ditandai dengan terjadinya sikap nusyuz atau sikap “tidak mau” menjalankan kewajibannya. Penilaian berbagi faktor atau alasan yang menunjukkan nusyuz dengan menganalisa 3 perkara yang terjadi pada tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan putusan Nomor 0651/Pdt. G/2010/PA.Wtp. tertanggal 13 Oktober 2010, dan putusan Nomor 0146/Pdt. G/2011/PA. wtp. Tertanggal 8 Februari 2011 serta putusan Nomor 710/Pdt. G/2012/PA. Wtp. Tertanggal 20 Agustus 2012.

1. Putusan Nomor 0651/Pdt. G/2010/PA. Wtp. Tertanggal 13 Oktober 2010

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini Penggugat (NN) yang berumur 28 tahun, beragama Islam, dan pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, dan bertempat tinggal di Koppe, Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone adalah istri sah dari Tergugat (KNS) berumur 37 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, dan bertempat tinggal Kacimpong, Desa Mattiropurae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, yang menikah pada tanggal 19 Desember 1998. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 12 tahun lamanya, kedua suami istri bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri selama 5 bulan dan telah dikarunia seorang anak.²²

Dalam gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Februari 1999 antara

²²Data Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010

Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 1999 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

1. Tergugat sering cemburu dan marah bila melihat Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga.
2. Tergugat sendiri yang memegang keuangan keluarga tanpa memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengurus kebutuhan sehari-hari.
3. Tergugat meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008

sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi setelah dua bulan tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 11 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun1989 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

c. Analisis

Duduk perkara di atas menggambarkan masalah yang disengketakan adalah perkara gugatan perceraian. Dua hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini yaitu pertama, karena suami sering cemburu dan marah melihat istri berbicara dengan laki-laki lain, dan kedua, pihak suami telah meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dan memegang keuangan sendiri. Bilamana alasan-alasan ini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, karena dengan demikian berarti Tergugat (suami) telah melanggar taklik

talak yang pernah diikrarkannya segera setelah terjadi akad nikah. Dalam hal ini Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya.

Faktor suami suka cemburu, menurut penulis bukanlah merupakan pelanggaran ataupun pembangkangan atas kewajiban yang dimilikinya. Seorang suami yang cemburu pada laki-laki lain yang mendekati pasangannya, adalah merupakan sebuah sifat yang justru menunjukkan rasa sayang yang dimiliki oleh sang suami itu sendiri, sebuah rasa yang mestinya wajib dimiliki oleh seorang suami pada istrinya. Semakin tinggi rasa cemburu yang dimiliki seorang laki-laki, justru menunjukkan kualitas rasa sayang yang dimiliki pada pasangannya, karena merupakan reaksi dari rasa takut akan kehilangan atas apa yang dimilikinya.

Menurut penulis, suami yang sangat pencemburu, bukanlah merupakan sebuah bentuk nusyuz, karena tidak ada keharusan bagi seorang istri untuk menghilangkan rasa kecemburuan yang dimiliki atas suaminya sendiri, terkait hubungan dengan laki-laki lain meskipun laki-laki itu dari keluarga sekalipun.

Dalam hal ini kategori yang dianggap perbuatan nusyuz apabila seorang suami memiliki rasa cemburu, dalam menyikapi sikap tersebut sampai mencedarai dirinya sendiri bahkan sampai menghilangkan nyawa diri sendiri maka perbuatan tersebut digolongkan perbuatan nusyuz dan semestinya seorang istri mesti menjaga sikap agar perbuatan seperti itu tidak terjadi. Dan seorang istri yang memiliki suami yang seperti ini sangat perlu untuk berpikir dan mengambil tindakan yang lebih bijaksana dalam mensikapinya, dengan cara menjaga jarak dengan laki-laki lain atau menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan dalam berkomunikasi.

Atas dasar ini juga, seorang istri yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama untuk meminta cerai dari suaminya karena alasan moral yang disebabkan oleh faktor suami sangat pencemburu, tanpa disertai faktor lain yang menunjukkan suami bersikap nusyuz, seperti cara-cara melampaui batas dalam mensikapi rasa

kecemburuan misalnya, tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak jika pihak suami tidak rela atas gugatan istri.

Namun dalam hal perkara ini, faktor lain yang mendukung seorang istri mengajukan gugatan adalah suami yang memegang uang belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan perbuatan yang tidak baik dalam menjalani sebuah rumah tangga dan karena suami telah meninggalkan istri pergi ke rumah orang tuanya merupakan perbuatan yang melanggar dari sighat taklik talak.

2. Putusan Nomor 0146/Pdt. G/2011/PA. wtp. Tertanggal 8 Februari 2011

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini Penggugat adalah (WYH) yang berumur 18 tahun, beragama Islam, dan pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, dan bertempat tinggal di Dusun Annasa, Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone adalah istri sah dari Tergugat (SDR) berumur 26 tahun, beragama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, dan bertempat tinggal di Dusun III Lagoppo, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2008. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 3 tahun lamanya.²³

Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Qabla dukhul), dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan baik, sejak awal pernikahan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi. Ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak dapat membahagiakan Penggugat karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-

²³Data Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2011

laki normal meskipun Tergugat telah berusaha untuk berobat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2008 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Oleh karena hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua untuk:

1. Mengabulkan gugatan perceraian ini.
2. Menyatakan putus hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hal tersebut di atas.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

b. Pertimbangan Hukum

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan selengkapnya yang termuat dalam berita acara perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi

perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun1989 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

c. Analisis

Dari jalan perkara di atas dapat diketahui dengan alasan-alasan mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat), yaitu karena suami tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana laki-laki normal (Impoten). Bilamana alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini karena dengan demikian berarti Tergugat telah melanggar akan kewajibannya dalam sebuah perkawinan untuk memenuhi kebutuhan batin istri.

Di samping itu, dalam sebuah perkawinan terdapat tujuan sekunder yang sifatnya mendukung tujuan pertama yang bersifat primer. Misalnya, adanya nafsu seksual bagi suami istri yang dengan perkawinan itu bisa terpenuhi secara halal sehingga dengan itu dapat terhindar dari berbuat dosa, adanya rasa kasih sayang, dan

kenteraman dalam rumah tangga, mempunyai kemampuan untuk hidup mandiri dan lain-lain yang sifatnya bisa mendukung terwujudnya tujuan utama.

Berangkat dari prinsip tersebut di atas, maka tujuan utama dan tujuan sekunder dari perkawinan tersebut dapat berjalan lancar, maka masing-masing suami istri hendaklah terbebas dari segala hal yang menjadi kendala bagi terwujudnya tujuan tersebut. Bilamana pada diri salah satunya terdapat suatu hal yang bisa menjadi penghalang atau yang bertentangan dengan hal-hal yang mendukung tujuan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, bilamana tidak sabar, logikanya boleh meminta mundur dari perkawinan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum Islam dijelaskan bahwa di antara hal-hal yang dianggap bisa dijadikan pertimbangan untuk menuntut cerai adalah adanya kekurangan pada diri salah satu dari suami istri yang sifatnya bisa menjadi penghalang atau mengganggu tercapainya tujuan syari'at dalam perkawinan. Masalah tersebut mendapat perhatian serius di kalangan para ahli hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas faktor ini tidak dimasukkan dalam kategori nusyuz, karena bukan merupakan pelanggaran/ pembangkangan suami atas kewajibannya. Namun demikian dalam hal penyakit impoten, meski terbukti secara medis, menurut Wahbah al-Zuhaili, hakim tidak boleh langsung menjatuhkan putusan cerai ketika salah satu pasangan /pihak yang dirugikan mengajukan gugatan untuk bercerai, akan tetapi pengadilan memberikan waktu selama satu tahun semenjak perkaranya diangkat ke pengadilan. Karena penyakit impoten ada yang mungkin bisa diobati. Jika dalam satu tahun itu penyakit belum bisa disembuhkan, maka hakim boleh menceraikan pasangan suami istri tersebut.

Namun hal itu berbeda yang diungkapkan oleh Drs. Usman mengatakan bahwa suami mengalami penyakit impoten harus diperiksa melalui medis kesehatan

dengan prosedur Pengadilan Agama memberikan pengantar disertai oleh jurusita dan dijaga ketat disaat pemeriksaan, apabila penyakit yang diderita semenjak lahir maka hal ini bisa saja memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama tanpa menunggu satu tahun lagi berobat dengan alasan daripada menyakiti pihak istri karena tidak terpenuhi kebutuhan rohaniyah dan kebutuhan jasmani sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan diantara suami istri yang secara terus menerus.²⁴

Hal senada yang diungkapkan oleh H. Kamaluddin mengatakan bahwa apabila kasus cerai gugat karena penyakit impoten dari suami maka tidak perlu menunggu satu tahun lamanya untuk berobat karena penyakit impoten yang dialami suami dapat berdampak negatif terhadap istri karena suami mengalami penyakit seperti ini terkadang tidak membiarkan istri tidur nyenyak di malam hari, kalau hal ini terus menerus terjadi selama satu tahun sampai menunggu suami berobat maka akan menimbulkan kemudharatan terhadap pihak istri.²⁵

Mengutip pendapat Syeikh al-Majidi dalam kitabnya Ghoyatul Marom yang berbunyi:²⁶

وَأِنْ إِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya:

Jika kebencian seorang istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disaat itu hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut.

²⁴ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014.

²⁵ H. Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 10 Maret 2014.

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Putusan Nomor 0146/Pdt. G/2011/PA. Wtp.

Selain itu yang dijadikan pertimbangan juga adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya sama-sama menjelaskan tentang alasan perceraian karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas menurut penulis, solusi untuk perkara di atas harus diberi kesempatan kepada suami untuk berobat sepanjang pihak istri masih mau mempertahankan rumah tangga dengan jalan Pengadilan Agama menunda sidang yang cukup lama.

3. Putusan Nomor 710/Pdt. G/2012/PA. Wtp. Tertanggal 20 Agustus 2012.

a. Duduk Perkara

Dalam perkara ini Penggugat adalah (AAA) yang berumur 29 tahun, beragama Islam, dan pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, dan bertempat tinggal Kabupaten Bone adalah istri sah dari tergugat (BBB) berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, dan bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang menikah pada tanggal 20 Desember 2003. Setelah pelaksanaan akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Perkawinan telah berlangsung selama 10 tahun lamanya. Penggugat dan Tergugat bergaul dengan baik dan tinggal bersama selayaknya suami istri selama kurang 8 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak.²⁷

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat mengajak penggugat untuk ke Malaysia namun Penggugat tidak mau mengikuti Penggugat dengan alasan Penggugat anak tunggal dan tidak

²⁷Data Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2012

tahan berpisah dengan orang tua Penggugat dan Penggugat juga mengkhawatirkan sekolah anaknya.

- Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2012 dan pada saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

b. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat yang selalu ke Malaysia sedang penggugat tidak mau ikut ke Malaysia dengan alasan khawatir terbengkalai sekolah anaknya sehingga sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa ada jaminan nafkah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Penggugat dan saksi Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara

suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

“Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya:

“Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

c. Analisis

Duduk perkara di atas menggambarkan masalah yang disengketakan adalah perkara gugatan perceraian. Dua hal yang menjadi alasan tuntutan perceraian ini yaitu pertama, karena suami berbeda pendapat/prinsip, dan kedua, pihak suami telah meninggalkan istri kembali ke rumah orang tuanya. Bilamana alasan-alasan ini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai gugat ini di Pengadilan Agama.

Cerai gugat dengan faktor penyebab karena perbedaan pendapat/ prinsip menurut penulis bukan merupakan sebuah pembangkangan/pelanggaran terhadap suami atas kewajibannya. Sebagai pasangan suami istri, masing-masing pihak tentunya memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam hal watak, karakter, sifat maupun kebiasaan, dan juga terkadang perbedaan tingkat pendidikan, yang mana semua itu membuat perbedaan pendapat/prinsip antara suami istri adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.²⁸ Sebagai seorang suami yang memiliki kewajiban salah satunya adalah mengatur sekaligus memelihara jalannya kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada asas musyawarah, harus mampu bertindak lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan pendapat/prinsip dengan istrinya ini.²⁹ Dalam hal ini tampak jelas bahwa faktor beda pendapat /prinsip, tidak memenuhi kriteria untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis nusyuz, yang dijadikan faktor penyebab cerai gugat. Terkait dengan kewenangan mengambil keputusan didasarkan pada posisi, kedudukan dan hak/kewajiban dalam rumah

²⁸ Bahkan konflik yang diakibatkan oleh perbedaan dapat membuat hubungan suami istri makin berkembang dan maju, jika konflik tersebut dapat dikelola dengan baik. Menurut Ieda Purnomo Sigit Sidi, suami istri khususnya pasangan muda tidak perlu takut dengan adanya konflik yang muncul dalam rumah tangga, justru dengan adanya konflik akan membuat suami istri menjadi berkembang dan maju. Mereka akan semakin matang, karena konflik adalah fundamen untuk membentuk rumah tangga. Dengan demikian, suami istri akan mampu bertahan terhadap guncangan lain yang lebih besar. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 211.

²⁹ Mensikapi perbedaan dengan cara yang fair dan bijaksana merupakan salah satu dari 12 cara untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga, 12 cara tersebut ialah: 1. Bersikap jujur, 2. Saling mendorong untuk mendapatkan cita-cita bersama, 3. Saling menghormati, 4. Luangkan waktu bersama untuk saling membagi cita-cita, 5. Luangkan waktu untuk berdialog, berdiskusi, dalam percakapan sehari-hari sebagai cara untuk meningkatkan dan memperbaiki komunikasi 6. Tertawalah bersama-sama sekurang-kurang sekali sehari, 7. Selisih paham boleh-boleh saja tetapi lakukan dengan cara yang fair, 8. Bersedia untuk saling memaafkan, 9. Ingat saling berbaik hati adalah suatu hadiah yang amat besar nilainya, 10. Saling berbagi keinginan sehari-hari, 11. Buatlah keputusan bersama mengenai keuangan, disiplin anak-anak, pekerjaan rumah tangga, liburan dan lainnya. Jangan putuskan segala sesuatu sendirian, ingat dua kepala lebih dari satu kepala, 12. Luangkan waktu untuk berdua saja, agar rasa keintiman terus terjalin dengan baik dan makin kuat. Rencanakanlah liburan atau berpergian yang romatis. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 211.

tangga sangat jelas bahwa suami memiliki kewenangan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang terkait dengan kepentingan rumah tangga daripada istri.

Dengan demikian cerai gugat tidak lain kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana, tetapi pada waktu-waktu tertentu adalah suatu bencana yang diperlukan. Dengan itu, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Karena di samping banyaknya bencana dapat dibayangkan dari suatu cerai gugat yang menyangkut kehidupan kedua belah pihak dan terutama yang menyangkut anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan.

Terlebih dahulu perlu ditegaskan, bahwa karena dari segi moral, cerai gugat dinilai sebagai suatu perbuatan yang paling dimurkai oleh Tuhan, walaupun halal, maka kiranya akan dapat disetujui oleh umum, kalau kekuasaan untuk menyatakan perceraian itu tidak boleh diberikan secara terlalu luas, sehingga dapat berubah menjadi perbuatan yang sewenang-wenang, tetapi juga tidak boleh terlalu dipersempit, sehingga mengurangi hak kedua belah pihak.

Semuanya itu harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.

Kalau keputusan untuk bercerai itu timbul dari persetujuan yang baik-baik dari kedua belah pihak, maka tidaklah menjadi sulit untuk memisahkan hubungan perkawinan antara kedua belah pihak tetapi dengan alasan yang sesuai dengan syari'at Islam.

Untuk lebih lanjut penulis menggambarkan faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dengan melakukan wawancara

kepada sejumlah informan yang kasus cerainya telah diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone sekaligus bertindak sebagai informan yang memberikan informasi tentang faktor penyebab cerai gugat yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Setelah penulis mengadakan wawancara langsung dengan informan didapati bahwa cerai gugat yang terjadi memang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dialami Saninah³⁰ mengajukan gugatan di Pengadilan Agama disebabkan dari awal pernikahannya tidak ada kecocokan karena sebelum menikah suaminya telah menjalin cinta dengan perempuan lain dan perempuan itu telah hamil hasil dari hubungannya, bahkan sekarang suaminya telah pergi meninggalkannya kembali ke perempuan itu.

Nasib yang sama di alami Nanni³¹ dan Nurmasyita,³² perceraianya disebabkan karena suaminya orang emosional dan faktor kecemburuan yang berlebihan, dan marah bila istrinya berbicara dengan laki-laki lain sekalipun dengan keluarga sendiri. Bahkan dalam hal keuangan dipegang oleh suaminya karena tidak memberikan kepercayaan kepada istrinya untuk mengolah keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini suaminya kembali ke rumah orang tuanya.

Anita Volianawati³³ seorang ibu rumah tangga, ia cerai karena sudah tidak tahan lagi dengan tindakan suaminya yang suka minum-minuman keras, penjudi dan pemabuk. Sering pulang larut malam dengan dalam keadaan mabuk, terkadang

³⁰ Saninah, Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Awangpone, 7 Maret 2014.

³¹ Nanni, Putusan Nomor 0651/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014.

³² Nurmasyita, Putusan Nomor 0293/Pdt. G/2012/PA. Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Watampone, 25 Juni 2014 .

³³ Anita Volianawati, Putusan Nomor 0795/Pdt. G/2010/PA. Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Watampone, 25 Juni 2014.

suaminya meminta untuk dilayani secara paksa di tempat tidur bahkan sampai menyakiti badan istrinya disaat melakukan hubungan suami istri.

Demikian pula yang dialami Yemmi³⁴ dalam rumah tangganya bahwa suami tidak dapat menjamin rumah tangga sepenuhnya dalam hal keuangan, dan mertuanya ikut campur dalam rumah tangganya dalam hal keuangan bahkan menarik kembali mahar yang pernah diberikan waktu pernikahan berlangsung berupa tanah kering. Suami telah pergi meninggalkannya kembali ke rumah orang tuanya.

Hal yang sama dialami Liah Evayanti³⁵, Yammase³⁶ dan Asia Wahe³⁷ selain suami tidak memberikan kepercayaan dalam mengelola keuangan kebutuhan rumah tangga juga mempermasalahkan tentang tempat tinggal dimana suami tidak mau mandiri serta suami selalu mau kembali dan tinggal di rumah orang tuanya.

Lain lagi yang dialami oleh Gusti,³⁸ faktor yang menyebabkan perkawinannya kandas ditengah jalan karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya layaknya suami normal lainnya, karena suaminya mengalami kekurangan fisik (lemah syahwat), dan bahkan suaminya telah pergi meninggalkannya dan kembali ke rumah orang tuanya.

Sitti Halijah³⁹ seorang ibu rumah tangga cerai karena alasan kekerasan dalam rumah tangganya. Menurut penuturannya suami sudah bersikap bosan kepadanya

³⁴ Yemmi, Putusan Nomor 0641/Pdt. G/ 2010/PA. Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Besse Kajuara, 26 Juni 2014

³⁵Liah Evayanti, Putusan Nomor 0107/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Lamuru, 11 Maret 2014

³⁶Yammase, Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2011/PA. Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Barebbo, 26 Juni 2014

³⁷Asia wahe, Putusan Nomor 0806/Pdt. G/2010/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 11 Maret 2014.

³⁸ Gusti, Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 12 Maret 2014.

³⁹Sitti Halijah, Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2011/PA.Wtp. Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 7 Januari 2014.

dan sering dipukul. Tiga tahun terakhir sebelum cerai suaminya tidak memberikan nafkah yang mencukupi.

Menurut W. Widiyati⁴⁰, Dahlia⁴¹, Wirdaningsi⁴² ketiganya mengalami nasib yang serupa yakni suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain dan menurut penuturan mereka tidak mau di madu. Suaminya pergi meninggalkannya ke rumah istri keduanya dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

Burhanuddin bercerai disebabkan karena istri suka berlaku boros dan materialistik, istri menuntut banyak dari segi materi padahal penghasilannya sangat terbatas sebagai penjual. Istrinya suka marah-marah yang tidak jelas dan pada akhirnya istri mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.⁴³ sedangkan Asmar bercerai disebabkan karena istrinya seringkali bersikap keras kepala dan tidak mau melayani dengan baik, meskipun ia telah berusaha membantunya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga padahal ia merasa capek bekerja seharian dan juga disebabkan karena mertuanya ikut campur tangan dalam kehidupan rumah tangganya.⁴⁴

Sementara Nirmala Sari⁴⁵ perceraian terjadi disebabkan karena sejak suaminya kembali ke Timika sering terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui telpon

⁴⁰W. Widiyati, Putusan Nomor 0700/Pdt. G/ 2010/PA. Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, MT. Haryono, 26 Juni 2014.

⁴¹Dahlia, Putusan Nomor 0771/Pdt. G/2011/PA.Wtp, Honorer, *Wawancara*, Bone, 23 Juni 2014.

⁴²Wirdaningsi, Putusan Nomor 0070/Pdt. G/2010/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 23 Juni 2014.

⁴³Burhanuddin, Putusan Nomor 0250/Pdt. G/2012/PA. Wtp, Penjual, *Wawancara*, BTN Harvana, 10 Agustus 2014

⁴⁴Asmar, Putusan Nomor 0479/Pdt. G/2012/PA.Wtp, Petani, *Wawancara*, Bone, 12 Agustus 2014.

⁴⁵Nirmala Sari, Putusan Nomor 856/Pdt. G/2011/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 22 Juni 2014.

yang mengakibatkan hubungan keduanya pada akhirnya menjadi tidak harmonis, suami lebih mementingkan keluarganya daripada istrinya bahkan menyuruh istrinya mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Sementara rumah tangga Suriani⁴⁶ di Pengadilan Agama disebabkan karena perbedaan dalam memilih tempat tinggal bahkan suami menyuruh istrinya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Rosdianti⁴⁷ perceraianya dipicu akibat suami tidak dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena kelainan seks dan kelainan jiwa dimana sering menyiksa istri di tempat tidur, suami juga memiliki sifat yang suka cemburu apabila istrinya berbicara dengan laki-laki lain bahkan melarang istrinya untuk melaksanakan salat lima waktu. Suami sering menceritakan rahasia rumah tangganya kepada orang lain. Hal yang sama yang dialami oleh Lili Adriyani⁴⁸ dan Asmira⁴⁹ yaitu memiliki suami yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal lainnya karena mengalami kelainan fisik dan lemah syahwat, hingga akhirnya memicu perselisihan dalam rumah tangganya dan berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut Masiati⁵⁰ faktor yang menyebabkan keretakan rumah tangganya yaitu memang sama sekali saya tidak pernah mengalami kekerasan fisik hanya saja ditelantarkan oleh suami. Karena pada awalnya suami ke luar daerah untuk mencari nafkah, semula sering terjadi komunikasi dan mendapat kiriman uang belanja, namun beberapa tahun kemudian tidak pernah lagi dihubungi baik melalui surat maupun telpon dan kiriman uang tidak pernah

⁴⁶Suriani, Putusan Nomor 0317/Pdt. G/2012/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 22 Juni 2014.

⁴⁷Rosdianti, Putusan Nomor 0195/Pdt. G/2011/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 23 Juni 2014.

⁴⁸Lili Adriyani, Putusan Nomor 0657/Pdt. G/2010/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 24 Juni 2014.

⁴⁹Asmira, Putusan Nomor 0209/Pdt. G/2012/ PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 25 Juni 2014.

⁵⁰Masiati, Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Uloe, 5 Maret 2014

lagi berlanjut, meskipun sudah diusahakan sedemikian rupa namun tidak berhasil. Karena tidak tahan ditinggal oleh suami tanpa nafkah lahir dan batin maka saya mengajukan gugatan cerai terhadap suami di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Demikian pula yang dialami Darmayanti,⁵¹ memiliki suami yang suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sulit untuk dihentikan. Sementara suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Menurut penuturan Darmayanti yang membuatnya tersiksa adalah perilaku suami yang kasar dan sering menyakiti bagian tubuh tertentu. Tidak tahan diperlakukan seperti itu, akhirnya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Hal yang sama dirasakan oleh Fatmawati⁵² memiliki suami yang sering minum-minuman keras hingga mabuk dan tidak pernah memberikan uang belanja bahkan suaminya telah kembali dari Malaysia dan tidak menemui istrinya hanya kembali ke rumah orang tuanya.

Sementara Nur Foisiah Nur,⁵³ cerai gugat diajukan dipicu karena suami telah meninggalkan istrinya kembali ke tempat tugasnya di Papua Barat tanpa memberikan nafkah sedikitpun dan tanpa komunikasi dari suami selama pergi, akhirnya pada tahun 2008 kembali menjalin komunikasi karena istri melapor ke atasan suaminya untuk menyampaikan perihal perceraianannya.

Andi Fadli berpisah dengan istri disebabkan karena sering mengalami kekerasan psikis dari istri, saya sering dipermalukan oleh istri di depan tamu, seperti tindakan istri yang tidak menghargai tamu, dan atas tindakan itu aku sering dicemoohkan sesama teman kerja sebagai laki-laki yang tak bisa mendidik istri padahal selama ini aku telah berusaha untuk mendidik dan menasehati, malahan di respon kasar oleh istri.⁵⁴

⁵¹Darmayanti, Putusan Nomor 0191/Pdt.G/2011/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Bone, 28 februari 2014.

⁵²Fatmawati, Putusan Nomor 0391/Pdt. G/2012/PA.Wtp, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, BTN. Harvana, 22 Juni 2014.

⁵³ Nur Foisiah Nur, Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2010/PA.Wtp., PNS Pemda, *Wawancara*, Watampone, 2 Maret 2014.

⁵⁴Andi Fadli, Putusan Nomor 0218/Pdt.G/2010/PA.Wtp, Wiraswasta, *Wawancara*, BTN Karmila, 10 Agustus 2014.

Hal yang sama yang dirasakan Muhammad Ali sebagai kepala rumah tangga yang tak pernah dihargai karena istri menjalin hubungan spesial dengan laki-laki lain akibatnya sering terjadi perselisihan dan percekocokan di antara keduanya. Apabila istri ditegur atas perbuatannya yang selingkuh sering berkata kasar bahkan menyakiti badan suami dengan melempar gelas akibatnya suami harus dirawat di rumah sakit.⁵⁵

Dari hasil penelitian penulis di lapangan, masalah kasus cerai gugat karena alasan kekerasan bukan hanya sering terjadi pada istri tetapi juga dialami oleh laki-laki sebagai suami. Kekerasan yang dialami berupa kekerasan psikis dan fisik yang lebih banyak berpengaruh terhadap psikologi seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan warahmah tidak dapat tercapai lagi.

Sedangkan masalah yang dialami Hasnah⁵⁶ dan Herdianty⁵⁷ hampir sama karena pernikahan yang dilakukan atas kemauan orang tua kedua belah pihak, tidak saling kenal sehingga tidak ada rasa cinta diantara mereka dan selama pernikahan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri karena suaminya tidak normal, bahkan malam hari hanya mampu menyakiti istrinya di tempat tidur karena tidak membiarkan sang istri tidur, selalu diganggu dengan berbagai cara.

Dialami Hasrianti, pada awal pernikahannya terjalin hubungan yang baik dengan suaminya namun setelah istrinya ke Malaysia membawa barang dagangan dan kembali ke Bone didapati suaminya selingkuh dengan perempuan lainnya, hingga akhirnya mengajukan gugatan di Pengadilan Agama.

⁵⁵ Muhammad Ali, Putusan Nomor 009/Pdt. G/2012/PA. Wtp, Petani, *Wawancara*, Bone, 11 Agustus 2014

⁵⁶ Hasnah, Putusan Nomor 0761/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Tokaseng, 3 Maret 2014.

⁵⁷ Herdianty, Putusan Nomor, 0516/Pdt. G/2010/PA.Wtp, Mahasiswi, *Wawancara*, Bone, 22 Juni 2014.

Menurut penuturan Muh. Idris mengatakan bahwa perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya yaitu disebabkan karena:

- a. Pernikahan yang terjadi bukan karena keinginan sendiri namun adanya paksaan dari kedua orang tua.
- b. Istri yang sering marah-marah apabila di kasih uang belanja dalam jumlah yang sedikit karena pekerjaanku yang hanya menghasilkan sedikit uang
- c. Sekarang aku sudah menikah untuk kedua kalinya karena istriku mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.⁵⁸

Lain halnya yang dialami dengan Hamsa bahwa rumah tangga berakhir karena:⁵⁹

Istriku mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Bone tanpa sepengetahuanku dan bahkan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga. Aku bahkan masih mencintainya dan anakku sampai hari ini namun yang menyakitkan hati dengan adanya penuturan bahwa aku tak pernah memberikan uang belanja padahal selama ini aku menanggung semua kebutuhan keluargaku dan aku meninggalkan kediaman setelah istriku mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena aku sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga namun istriku tetap ingin bercerai.

Peristiwa lain yang dialami oleh Rina, setelah hamil pertamanya, tiba-tiba suaminya sering marah-marah yang tidak jelas, sering melakukan penjudian hingga menganiaya istri dan anaknya. Bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan dari istrinya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anak dan istri, pada akhirnya istri berada pada titik jenuh dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.⁶⁰ Sedangkan rumah tangga Rosnah⁶¹ berakhir disebabkan karena suami sering marah tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan suami lalai dalam menjalankan syariat Islam bahkan suami tidak bisa beradaptasi dengan keluarga istri.

⁵⁸ Muh. Idris, Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Supir Mobil, *Wawancara*, Watampone, 7 Agustus 2014.

⁵⁹ Hamsa, Putusan Nomor 0566/Pdt.G/2010/PA.Wtp., Petani, *Wawancara*, Bone 08 Agustus 2014

⁶⁰ Rina, Putusan Nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.Wtp., Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

⁶¹ Rosnah, Putusan Nomor 0251/Pdt. G/2012/PA.Wtp, Pegawai, *Wawancara*, Watampone, 5 Maret 2014.

Berdasarkan hasil interview kepada 37 responden tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone disebabkan karena beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, perselingkuhan, kecemburuan, pemabuk dan penjudi, pernikahan atas kehendak kedua orang tua, penelantaran keluarga dan berbagai macam faktor lainnya dan kasus yang paling menonjol adalah karena faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggung jawab suami dalam rumah tangga.

Penyebab cerai gugat dalam realitas kehidupan masyarakat harus didasari dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syara. Di satu sisi masih banyak problematika lainnya yang dihadapi oleh masyarakat muslim dalam realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu berikut ini penulis akan menggambarkan sebuah hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan yaitu berbagai macam faktor penyebab atau alasan yang menyebabkan cerai gugat dalam realitas masyarakat di Kabupaten Bone. Berdasarkan perkara yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama Watampone selama 3 tahun terakhir ada sebanyak 300 sampel kasus yang diambil, ditemukan 35 buah jenis faktor yang dapat menyebabkan terjadinya “perselisihan terus menerus” atau syikak seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2010-2012

No	Faktor-Faktor yang Penyebab Cerai Gugat	Persen
1.	Suami tidak memberi uang nafkah	14,4%
2.	Suami suka pencemburu	11,3%
3.	Suami tidak memberikan uang nafkah dengan layak	8,1%
4.	Suami sering marah-marah	8,1%
5.	Suami sering bertindak kasar (memukul, mengancam dll)	5,9%
6.	Suami sering berjudi	5,4%

7.	Suami selingkuh dengan wanita lain	5,4%
8.	Suami sering mabuk-mabuk/narkoba	4%
9.	Suami selingkuh dengan wanita lain	4%
10.	Suami tidak mampu menunaikan kewajiban sebagai laki-laki (Impoten)	4%
11.	Suami menikah lagi dengan perempuan lain	3,6%
12.	Suami suka main perempuan	3,2%
13.	Suami tidak mempunyai pekerjaan tetap/layak	2,3%
14.	Suami sering pergi bermalam tanpa sepengetahuan istri	2,3%
15.	Keluarga suami sering mencampuri urusan keluarga	2,3%
16.	Suami tidak terbuka masalah keuangan	1,8%
17.	Suami kurang tanggung jawab sebagai kepala keluarga	1,4%
18.	Suami berhutang tanpa sepengetahuan istri	1,4%
19.	Suami sering pergi tanpa sepengetahuan istri	1,4%
20.	Suami tidak harmonis dengan keluarga istri	1%
21.	Suami terlalu membatasi istri	1%
22.	Suami berbohong tentang masa lalunya	1%
23.	Sering berbeda prinsip /pendapat	0,9%
23.	Suami sering membohongi istri	0,9%
24.	Suami malas beribadah	0,9%
25.	Suami tidak adil terhadap istri-istrinya	0,4%
26.	Suami melarang istri berpakaian muslimah	0,4%
27.	Suami tidak memberikan nafkah batin dengan layak	0,4%
28.	Suami yang pergi meninggalkan istri	0,4%
29.	Suami yang tidak mampu menunaikan kewajibannya	0,4%
30.	Keluarga suai yang tidak harmonis dengan istri	0,4%
31.	Belum ada keturunan	0,4%
32.	Suami yang sering berbuat nekat/mencederai dirinya sendiri	0,3%
33.	Suami murtad	0,3%
34.	Suami tergantung pada orang tuanya	0,3%
35.	Suami bertindak kasar terhadap anak	0,3%

Faktor-faktor di atas menjadi penyebab-penyebab cerai gugat masyarakat di Pengadilan Agama Watampone. Hal ini bukan berarti bahwa penyebab terjadinya cerai gugat dalam realitas kehidupan masyarakat muslim hanya terbatas pada sejumlah faktor di atas, namun kemungkinan untuk bertambah masih sangat terbuka. Hal ini tentu saja disebabkan bahwa setiap daerah memiliki situasi dan kondisi serta problematika yang dihadapi masing-masing mempunyai kesamaan juga perbedaan dengan daerah-daerah lainnya. Di samping itu perkembangan disegala aspek kehidupan manusia setiap tahunnya tentu saja ikut menyebabkan munculnya persoalan-persoalan baru, yang bisa saja mengganggu harmonisasi sebuah ikatan pasangan suami istri.

Di antara faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone yang dipaparkan di atas ada beberapa hal yang penulis tidak masukan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban (nusyuz), namun dalam putusan pengadilan tetap dianggap faktor penyebab syikak. Faktor-faktor yang dimaksud adalah Suami sangat cemburu, Sering beda pendapat/prinsip, Keluarga suami tidak harmonis dengan istri, Belum ada keturunan, Suami impoten.

Faktor-faktor yang di atas tidak penulis masukkan sebagai salah satu bentuk nusyuz, didasarkan pada beberapa pertimbangan bahwa faktor tersebut alami terjadi dalam manusia bukan disebabkan karena pelanggaran/pembangkangan atas kewajiban yang dimiliki oleh suami. Seperti halnya faktor cemburu justru lebih baik dimiliki oleh setiap pasangan karena menandakan sebuah kasih sayang terhadap pasangannya. Karena merupakan reaksi dari rasa takut akan kehilangan atas apa yang dimiliki. Sedangkan faktor beda prinsip juga tidak termasuk ke dalam pelanggaran suami atas kewajiban istri karena masing-masing pihak tentu memiliki sedikit banyak perbedaan, baik dalam watak, karakter, sifat yang semua itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga.

Satria Effendi M. Zein, menjelaskan dua kriteria yang menjadikan perselisihan dalam rumah tangga, yaitu:

- a. Ketidak sesuaian pada kedua belah pihak. Artinya masing-masing pihak telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Hal inilah yang membedakan dengan *nusyuz* dimana ketidakcocokan itu terdapat pada satu pihak istri misalnya, bukan datang dari dua belah pihak.
- b. Sebuah cekcok rumah tangga baru bisa disebut *syiqaq*, bilamana percekocokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami istri secara damai. Bahkan percekocokan ini sejak mereka berumah tangga, maka mereka harus bercerai.⁶²

Berdasarkan hal ini, maka istri mengadukan persoalan ini kepada hakim, jika dapat dibuktikan kemudharatan dan kebenaran aduannya, maka hakim memutuskan untuk cerai. Jika istri tidak mampu untuk membuktikan kemudharatan maka aduannya ditolak. Masalah inilah yang dominan di Pengadilan Agama sekarang ini, sehingga putusan majelis hakim senantiasa mengambil pasal Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Satu hal lain yang perlu ditekankan bahwa ada dua hal yang penting untuk selalu diperhatikan dalam cerai gugat yaitu terkait dengan kondisi “tidak mampu”⁶³ dan “tidak mau”⁶⁴ menjalankan kewajiban. Kedua hal ini tentu saja merupakan dua

⁶²Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, h. 115-116.

⁶³Kondisi “tidak mampu” yang dimaksudkan dalam hal ini ialah, hilangnya kemampuan salah satu pasangan dalam upaya menunaikan hak dan kewajiban bagi pasangannya. Dalam hal ini, yang perlu untuk dilakukan dalam menilai boleh tidaknya hal itu dijadikan alasan pemutusan ikatan perkawinan ialah dengan melihat apakah alasan “tidak mampu” itu dapat dibuktikan oleh pihak yang mengajukan alasan ini. Pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan surat keterangan, dokumen-dokumen ataupun alat-alat bukti lainnyapada Pengadilan Agama sesuai dengan yang diatur oelh Undang-Undang. Jika hal itu dapat dibuktikan, maka alasan yang diajukan tentu saja dapat dikabulkan menurut hukum Islam dan sebaliknya. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 226.

⁶⁴ Kondisi “tidak mau” ialah sebuah keadaan yang menunjukkan salah satu pihak bersikap engga untuk menjalankan kewajibannya (*nusyuz*) baik suami maupun istri. Sikap tersebut tentu saja dapat mengarah pada keadaan dimana salah satu pihak “tidak mau” lagi untuk tinggal dan hidup bersama dengan pasangannya (*syikak*/perceraian psikologis). Dan untuk menilai apakah telah terjadi *syikak*/perceraian psikologis ini, maka diperlukan yaitu dengan memanfaatkan peran dan bantuan hakamain pada kasus yang menimpa sang istri, untuk mencari tahu alasan keengganan sekaligus mengupayakan solusi untuk menawar atau meluluhkan sikap keengganan sang istri tersebut. Jika masing-masing langkah penanganan itu menemui kegagalan, maka telah nyata dan terbukti bahwa

hal yang berbeda satu sama lain, meskipun keduanya dapat berimplikasi pada pemutusan ikatan perkawinan.

Kedua alasan “ketidakmampuan” dan “ketidakmauan” menjalankan kewajiban dipahami sebagai alasan-alasan cerai gugat yang cukup mendasar dan juga dibenarkan oleh tuntutan agama, meski dalam hal penanganannya terdapat perbedaan. Perbedaan dalam hal penanganan tersebut yaitu gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan menjalankan kewajiban, karena merupakan hak dari pasangan yang dirugikan untuk melanjutkan hubungan atau tidak, maka penanganannya cukup dilakukan dengan melakukan pembuktian-pembuktian. Adapun gugatan cerai dengan alasan ke tidak mauan menjalankan kewajiban, karena bersifat konflik, maka perlu terlebih dahulu dilakukan upaya perdamaian dengan menggunakan pengaruh keluarga masing-masing pihak sebagai hakam, sebelum hakim menjatuhkan keputusan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa cerai gugat dibolehkan selama dengan alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan hidup rukun dan damai, aman tentram kekal dan bahagia dalam satu rumah tangga, hal ini pun harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

C. Dampak dan Solusi Cerai Gugat terhadap Pihak-Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta menciptakan taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya.

salah satu pihak, memang telah sampai pada kondisi syikak/perceraian psikologis yaitu keadaan dimana salah satu pihak “tidak mau” lagi untuk tinggal dan hidup bersama pasangannya. Maka dalam hal ini sebenarnya pihak Pengadilan Agama tidak perlu melakukan mekanisme pembuktian lagi, karena memang tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, akan tetapi segera memproses kasus tersebut dan memberikan keputusan sesegera mungkin. Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, h. 226.

Karena itu hubungan suami istri itu sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan tinggi nilai manusia itu sendiri.

Hubungan antara manusia dalam kehidupan rumah tangga, tidak semudah apa yang dibayangkan, bukan angka-angka yang dapat dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun rumah. Perbedaan bahkan percekocokan pasti akan ada dan terjadi.

Untuk memahami adanya cerai gugat dalam Islam secara tepat, haruslah dikaitkan dengan serangkaian cara-cara yang dapat mengatasi ketegangan yang harus dilakukan sebelum cerai gugat diputuskan. Oleh karena itu, para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak boleh mengajukan gugatan cerai terhadap suami, kecuali karena terpaksa, demikian pendapat sebagian pengikut Hanafi dan Ahmad bin Hambal.

Cerai gugat sebagai sesuatu perbuatan yang halal namun tidak disukai Tuhan. tidak disukai cerai gugat karena memiliki berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunannya. Dampak tersebut antara lain secara psikologis, moral, sosial dan ekonomis.

Pemutusan ikatan perkawinan menimbulkan kekerasan dalam jiwa istri dan menjadikan perpisahan itu sebagai suatu tusukan yang menyakitkan. Bahkan bagi sang istri setelah diputuskan perkara gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama tentu akan mendapatkan predikat sebagai janda. Walaupun tidak semuanya demikian, tetapi janda merupakan simbol yang menunjukkan bahwa terjadi kegagalan perkawinan. Siapa yang punya penilaian seperti ini tentu saja masyarakat sekitar. Ini disebut masalah sosial atau beban sosial. Seyogianya suami dapat memberikan mut'ah (pemberian) untuk menyenangkan hati istri yakni memberinya sesuai dengan kemampuan. Perbuatan ini memiliki nilai psikologis di samping keberadaannya sebagai bentuk penghargaan.

Hal yang sama juga terjadi bagi suami apabila terjadi perceraian, maka dengan sendirinya akan disebut dengan duda. Duda pada masyarakat tertentu,

menunjukkan bahwa terjadi kegagalan dalam rumah tangga. Bukankah suami dalam Islam dipandang sebagai pemimpin rumah tangga. Ini juga disebut dengan masalah sosial atau beban sosial.

Sebagaimana yang dikatakan oleh H. Ahmad Jakar⁶⁵ bahwa dampak dari cerai gugat berimplikasi kepada kedua belah pihak baik suami maupun istri dimana diantara keduanya akan mendapat predikat status baru di masyarakat setelah perkaranya perceraianya dikabulkan, namun hal ini lebih berdampak juga kepada anak dari hasil pernikahan apabila orang tuanya bercerai psikologis anak akan berpengaruh terhadap mental dan sikapnya. Sedangkan solusi dalam menengani dampak tersebut yaitu Anak yang belum mumayyiz menjadi tanggung jawab seorang ibu, apabila anak itu sudah dewasa dapat menentukan sendiri tempat tinggalnya antara ikut bapak atau ibu, serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi dua secara adil.

Menurut Drs. Usman⁶⁶ mengatakan bahwa dampak dari cerai gugat yaitu berpengaruh terhadap harta bersama dalam perkawinan, anak yang dihasilkan dari perkawinan, putusnya hubungan silaturahmi dengan pihak keluarga istri atau suami, serta mengenai faktor ekonomi, tidak ada konsentrasi untuk berusaha kembali karena masalah yang dihadapi maka harta bersama yang diperoleh harus dibagi dua secara adil dan merata sedangkan mengenai hak anak dibebankan kepada istri apabila anak itu masih kecil tetapi jika sudah dewasa maka diberikan pilihan kepada anak tersebut untuk menentukan mau ikut ayah atau ibu. Solusi lain yang ditawarkan adalah dari Mahkamah Agung yaitu tuntutananya harus dinaikkan.

⁶⁵ H. Ahmad Jakar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

⁶⁶ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh H. Kamaluddin⁶⁷ bahwa dampak dari cerai gugat berpengaruh terhadap istri dan anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan, juga untuk harta bersama. Menurut penuturannya bahwa perempuan yang bercerai akan mendapat status janda dan kadang-kadang orang yang mau melamar untuk pernikahan selanjutnya melihat dari status perempuan itu sendiri karena seorang laki-laki akan mempertimbangkan status dari perempuan yang akan dinikahi. Sedangkan harta bersama selama perkawinan apabila terjadi suatu cerai gugat maka harus dibagi dua.

Menurut adat istiadat di Kabupaten Bone jika terjadi suatu perceraian suami istri, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, maka harta bersama yang diperoleh si suami istri dalam masa perkawinan biasanya dibagi antara kedua belah pihak secara damai. Bahkan apabila perceraian itu atas kehendak suami, biasanya harta bersama yang diperoleh suami istri itu diserahkan sepenuhnya kepada istri.

Tetapi kalau perceraian itu atas permintaan istri maka biasanya harta bersama itu lebih banyak diserahkan kepada suami manakala suami menolak pada saat istri minta cerai. Tetapi manakala suami istri itu sama-sama ingin untuk cerai, maka harta dibagi dua. Dan ada kalanya persoalan tersebut diserahkan kepada Pengadilan Agama kalau diantara kedua belah pihak yang berperkara tidak ada kesepakatan.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh

⁶⁷ H. Kamaluddin, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 10 Maret 2014.

salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individu (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua. Bila keadaan yang memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia.

Sedangkan menurut Hj. Heriyah⁶⁸ mengatakan bahwa dampak cerai gugat yaitu masing-masing berpisah dari pasangannya, dan dampak terburuk adalah bagi anak-anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan karena akan mempengaruhi mental anak yang memiliki orang tua yang bercerai berai. Selain itu pihak istri akan merasakan kekurangan di bidang finansial yang selama ini di tanggung oleh suami

⁶⁸Hj. Heriyah, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

dan setelah berpisah akan kembali mencari sendiri nafkah (uang) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Solusinya dari dampak perkara yang ditimbulkan menurutnya dengan memberikan permohonan kepada suami istri tentang hak dan kewajiban serta dampak buruk yang akan ditimbulkan apabila mereka bercerai.

Fasiha Koda⁶⁹ mengungkapkan dampak dari cerai gugat adalah berimplikasi terhadap anak, karena anak akan menjadi korban dari perceraian yang terjadi dari orang tuanya, apalagi perkara cerainya berakhir dengan hubungan yang tidak baik. Salah satu contohnya apabila ada pihak yang tidak mau menerima putusan yang dijatuhkan dari Pengadilan dan berakhir dengan memutuskan hubungan silaturahmi di antara suami istri dan anak terkadang menjadi korban dari permasalahan yang terjadi dari orang tuanya. Solusi yang ditawarkan yaitu harus bercerai dengan cara yang baik supaya di antara dua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan hubungan silaturahmi masih tetap terjaga.

Menurut Asdar Bakri bahwa selama perkara perceraianya yang telah dikabulkan di Pengadilan Agama banyak dampak yang ditimbulkan dalam kehidupannya saat ini terutama mengenai dalam hal pengasuhan anak yang selama ini dipelihara dan dididik oleh seorang ibu kini beralih terhadap dirinya yang sedikit banyak memberikan pemahaman atas tanggung jawab sebagai seorang *single parents* selain memelihara anak di rumah juga harus banting tulang untuk mencari nafkah.⁷⁰

Lain halnya yang dialami oleh Rusdi Jafar setelah aku bercerai dengan istri memiliki dampak yaitu:

aku mengalami trauma yang cukup berat untuk dihilangkan karena menikah atas kehendak sendiri namun setelah menjalin perkawinan harus kandas di tengah jalan, dan berpikir untuk menikah kedua kalinya masih sangat jauh dari

⁶⁹Fasiha Koda, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 6 Maret 2014.

⁷⁰ Asdar Bakri, Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2011/PA.Wtp, Wiraswasta, *Wawancara*, Watampone, 5 Agustus 2014

pikiranku karena takut terjadi kegagalan kedua kalinya dalam berumah tangga. Dengan kejadian ini aku takut untuk mendekati perempuan lagi.⁷¹

Sedangkan Menurut Muhammad Junaide⁷² dan Ahmad Bakhtiar⁷³ mengatakan dampak cerai gugat yang terjadi dalam kehidupannya lebih berimplikasi kepada anak-anaknya karena harus dibesarkan dan dididik tanpa kasih sayang seorang bapak. Menurut penuturan Akmah Bakhtiar mengenai harta gono gini yang masih tetap diperselisihkan sampai hari ini karena keduanya tak rela harta itu hanya dikuasai oleh salah satunya, upaya perdamaian telah ditempuh namun tidak mencapai mufakat hingga akhirnya perkara ini harus dilanjutkan di tingkat banding.

Lebih lanjut akan diuraikan mengenai dampak cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dalam tabel berikut:

Tabel 13

Dampak Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun
2010-2012

No	Dampak Cerai Gugat di Pengadilan Agama	Persen
1.	Akan mempengaruhi kejiwaan anak atas perceraian yang terjadi	15%
2.	Harta gono gini harus dibagi secara adil	15%
3.	Kejiwaan istri akan terganggu dalam menyikapi keadaan ini	10%
4.	Adanya rasa trauma untuk kembali membina rumah tangga	10%
5.	Istri atau suami tak ada motivasi untuk mencari nafkah lagi	10%
6.	Istri harus banting tulang untuk mencari nafkah sendiri	8%
7.	Memberikan pengalaman baru atas perceraian yang terjadi	8%
8.	Memberikan kemandirian kepada anak untuk menghadapi masalah	8%

⁷¹ Rusdi Jafar, Putusan Nomor 0123/Pdt.G/2010/PA. Wtp, PNS, *Wawancara*, Bone, 11 Agustus 2014

⁷² Muhammad Junaide, Putusan Nomor 081/Pdt.G/2012/PA. Wtp, Wiraswasta, *Wawancara*, Macanang, 04 Agustus 2014

⁷³ Ahmad Bakhtiar, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2011/PA. Wtp, Wiraswasta, *Wawancara*, Bone, 11 Agustus 2014

9.	Suami akan memiliki predikat status duda	8%
10.	Istri akan memiliki predikat status janda	8%

Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut penulis dampak yang dihasilkan dari perkara cerai gugat yaitu berdampak kepada suami dan istri karena akan mendapat predikat status janda dan duda yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaan atau psikologis masing-masing dan menjadi penilaian tertentu bagi masyarakat sekitar. Bagi anak yang ditinggalkan oleh suatu pasangan yang utuh, tentu akan memiliki perasaan yang berbeda sebelumnya. Sang anak memiliki kegembiraan dengan kehadiran secara lengkap ayah dan ibu, namun dengan perceraian yang terjadi sulit untuk mendapatkan ayah dan ibu secara lengkap lagi.

Sang anak mengalami beban psikologis atas perceraian orang tuanya. Kedua orang tua memandang anaknya sebagai kepanjangan umurnya, penerus kehidupannya, dan sumber kebahagiaan hidupnya. Orang tua menghabiskan sebagian besar usaha dan hidupnya untuk memelihara dan memberikan perhatian kepada anaknya. Seorang anak yang tumbuh di tengah keluarga yang harmonis akan memperoleh pendidikan dan perhatian yang cukup. Lain halnya dengan anak yang tumbuh di saat ibu dan bapaknya bercerai. Dia tumbuh di tengah bencana dan bahaya, serta terancam dengan kesengsaraan yang lebih besar dibandingkan anak yang lainnya. Karena sebuah perceraian pasti akan diikuti dengan hancurnya hubungan di antara ayah dan ibu si anak, dan hal itu tentunya menjadi pukulan berat baginya. Terkadang salah seorang dari kedua orang tuanya atau bahkan keduanya menyeleweng. Ini tentunya akan lebih memperdalam kesengsaraan anak, atau akan membentuk dirinya sebagai individu yang dipenuhi rasa dendam dan suka membangkang.

Di dalam perceraian khususnya cerai gugat, biasanya anaklah yang harus menanggung akibat-akibat pahitnya. Karena pada kebanyakan perceraian, anak akan kehilangan perhatian dan kasih sayang yang selama ini dia rasakan tatkala rumah

tangga kedua orang tuanya masih dalam keadaan akur. Jika berada dalam asuhan ibunya maka dia akan kehilangan kehangatan kasih sayang dari seorang ayah, dan sebaliknya jika berada di bawah asuhan ayahnya maka akan kehilangan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Dan jika dia berada di bawah asuhan orang lain maka dia akan kehilangan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya. Kehilangan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak tentu akan memberikan pengaruh, baik pada keadaannya sekarang maupun yang akan datang.

Bisa saja pengaruh cerai gugat hanya memberikan sedikit pengaruh, sekiranya suami istri berlaku adil terhadap syariat yang telah Allah tetapkan. Yaitu suami atau istri melakukan perceraian dalam keadaan darurat dengan cara yang baik, sebagaimana yang telah dikatakan Al-Qur'an dan mengikuti petunjuk-petunjuk Ilahi di dalam mengasuh, mendidik, dan membiayai anak, sehingga anaknya itu dapat melewati perceraian yang terjadi di antara ayah dan ibunya dengan hanya sedikit pengorbanan.

Penyalahgunaan cerai gugat bukan pada tempatnya akan mengakibatkan lebih banyak lagi penderitaan bagi sang anak, yang pada gilirannya akan berakhir menjadi kisah-kisah sedih yang menyayat perasaan dan mencururkan air mata. Suami istri yang menyalahgunakan cerai dengan maksud untuk dapat bebas dan mendapatkan kesenangan, akan terbang seperti angin, dimana sang ayah berada di Barat sementara sang ibu berada di Timur. Mungkin saja ayah telah mendapatkan seorang istri yang baru, dan begitu juga ibu telah mendapatkan suami baru, sementara anak yang malang terlunta-lunta tidak terurus dipinggir jalan. Jika datang berlindung kepada ayahnya maka akan mendapatkan istri yang baru dari ayahnya, yang mungkin bermuka masam kepadanya, dan sekiranya anak datang berlindung kepada ibunya maka dia akan menemukan suami yang baru dari ibunya, yang mungkin tidak menginginkan kehadirannya.

Alangkah baiknya suami istri yang hendak bercerai mau berpikir masak-masak akan nasib yang akan menimpa anaknya kelak, sehingga janganlah

mengajukan gugatan cerai hanya karena dorongan hawa nafsu. Namun seandainya cerai gugat itu terpaksa harus dilakukan, karena sebab-sebab yang memaksa suami istri melakukannya, maka lakukan dengan cara yang baik. Ambillah cara-cara terbaik dan hati-hati untuk menjaga masa sekarang dan masa depan anak, dengan begitu anak tidak akan tersia-sia.

Begitu luasnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh cerai gugat, maka Islam tidak menyukainya atau membencinya. Karena itu, kalau terjadi hal-hal yang dinilai dapat mengarah pada cerai gugat, maka perlu dipikir seribu kali sebelum diputuskan untuk menempuh cerai gugat.

Untuk mengurangi dampak negatif dari aspek ekonomis atau finansial, inilah peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan.⁷⁴

Pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul beban biaya tersebut.

Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Di dunia peradilan dikenal dua kategori kebenaran yaitu kebenaran formil⁷⁵ dan kebenaran materil.⁷⁶ Mencari kebenaran hukum formil tentu tidak sulit, karena tidak dari kebenaran yang sifatnya lahiriah, namun yang sulit adalah mencari

⁷⁴Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, h. 225

⁷⁵Kebenaran formil yaitu kebenaran yang diperoleh selama atau apabila segala prosedur dan persyaratan hukum telah dipenuhi. Kebenaran formil juga disebut pula dengan kebenaran secara procedural.

⁷⁶Kebenaran materil yaitu kebenaran sejati atau kebenaran hakiki.

kebenaran materil yakni kebenaran yang sesungguhnya. Seorang hakim dituntut untuk bisa mengarahkan secara maksimal kemampuannya.

Hukum formil dan hukum materil yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama didukung oleh integritas pribadi para hakim sebagai penegak hukum, karena itu sudah seyogyanyalah para hakim mampu memberikan kebenaran dan keadilan khususnya bagi pihak-pihak yang sedang berperkara.

Namun demikian, diperlukan pula keterbukaan dan kejujuran dari pihak-pihak yang sedang berperkara, yakni penggugat dan tergugat serta saksi yang menyampaikan keterangan dimuka sidang pengadilan, agar hakim (sebagai penegak hukum) berdasarkan laporan pihak yang berperkara, dapat memutuskan perkara dengan benar dan adil.

Dari sudut moral, para hakim atau majelis hakim berkewajiban mendapatkan dan menegakkan kebenaran materil melalui produk keputusannya. Ada ungkapan yang populer dikalangan ahli hukum bahwa putusan hakim tidak akan bisa merubah hakikat peristiwa yang pernah terjadi. Atau dengan kata lain, putusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Secara moral setiap hakim haruslah menegakkan kebenaran baik secara formil dan materil, dalam memutuskan setiap perkara tanpa dipengaruhi (intervensi) oleh pihak manapun (KKN). Karena disinilah makna pentingnya dicantumkan *basmalah* dan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pembuka setiap putusan Peradilan Agama di Indonesia.

Menurut penuturan dari H. Ahmad Jakar⁷⁷ bahwa dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama tetap berpatokan pada hukum materil dan Hukum fikih yang diterapkan tetap seimbang atau sejalan. Namun disisi lain tetap berpatokan kepada Kompilasi Hukum Islam karena merupakan suatu kumpulan kitab-kitab fikih yang telah disempurnakan.

⁷⁷ H. Ahmad Jakar, Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 3 Maret 2014.

Tetapi berbeda halnya yang diungkapkan oleh Drs. Usman mengatakan bahwa dalam menyelesaikan cerai gugat selain berpatokan kepada Kompilasi Hukum Islam juga tetap merujuk kitab-kitab lain baik itu hukum materil maupun Fikih Islam, keduanya tetap diterapkan dan tetap berlandaskan kepada hukum syar'i.⁷⁸

Dengan demikian, menurut penulis dalam memutuskan perkara cerai gugat harus berlandaskan kepada hukum materil maupun hukum fikih Islam serta merujuk dengan kitab-kitab lain supaya dalam menjatuhkan suatu perkara lebih berkekuatan hukum dan tetap dipercaya akan kebenarannya. Bukan berarti dengan adanya Kompilasi hukum Islam Maka kitab-kitab yang lain telah disampingkan bahkan dengan kata lain sudah tidak pernah lagi dibuka oleh hakim karena lebih memudahkan dengan hanya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam.

Upaya yang baik dalam pemecahan persoalan-persoalan sebelum membesar dan membeku adalah mengikuti sebagian cara yang bisa menghasilkan buah-buah positif dalam meredam bara perselisihan mengembalikan kedua insan pada bingkai kehidupan perkawinan.

Hilangnya perasaan cinta, tak berarti menjadi tanda akhir dari pernikahan. Karena faktanya, meski perasaan itu hilang, banyak pasangan yang memilih untuk tetap bertahan walau harus dijalani secara terpaksa dan penuh kepura-puraan. Menariknya, hal tersebut tak pandang bulu. Perempuan mapan dengan wawasan luas dan berpikiran maju pun turut berada dalam golongan ini. Alasan-alasan tertentu telah mematahkan ego dari pihak yang tengah dilanda *"lost love syndrome"*.

1. Faktor anak.

Faktor anak, seperti yang terungkap banyak kasus, memang menjadi alasan terbesar para pasangan untuk tetap bertahan. Bagaimanapun anak selalu menjadi korban atas perceraian orang tuanya. Meski kemudian pasangan yang

⁷⁸ Drs. Usman, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, *Wawancara*, Watampone, 8 Maret 2014.

telah berpisah mengklaim tetap akan memberikan perhatian dan kasih sayang terbaiknya kepada anak, toh luka hati anak bukanlah sesuatu yang mudah dihapuskan.

2. Faktor pencitraan.

Alasan kedua terbesar adalah faktor pencitraan. Hidup di negara Timur yang penuh dengan aturan normatif memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Sanksi sosial kadang lebih garang daripada sanksi mana pun sehingga sang pelaku tak berdaya. Hal ini pulalah yang membuat pasangan berpikir dua kali untuk merampungkan hubungannya. Belum lagi urusan norma dalam keluarga.

3. Faktor orang tua

Faktor orang tua menjadi faktor yang turut memberatkan hati untuk melepaskan diri dari pasangan. Hilangnya sandaran ekonomi juga menjadi alasan lain bertahannya pernikahan yang jelas “ambruk”. Meski di zaman modern banyak wanita yang berkarir sendiri, bukan berarti peranan suami sebagai tulang punggung keluarga hilang begitu saja.

4. Faktor ekonomi

Bila terjadi perceraian, tentu akan banyak pengeluaran yang ditanggung sendiri. Karena faktor inilah, istri pun pada akhirnya bersedia mengorbankan perasaan dengan tetap melabuhkan diri dalam ikatan pernikahan.

Paling penting dalam semua peristiwa adalah penyesalan dari masing-masing pihak atas apa yang telah terjadi. Menyadari dengan sepenuh hati. Memikirkan semua kesalahan satu persatu. Memastikan tekad untuk menghilangkan ketegangan sebelum terlambat. Melakukan itu harus tanpa keraguan, karena nafsu selalu menyuruh kepada keburukan yang kadang mengalihkan niat baik sebelum melakukannya, yaitu dengan mengkaji persoalan dari segala seginya dan

membayangkan apa yang akan terjadi kalau masing-masing tetap mempertahankan egoismenya, serta dampak-dampak buruk lain yang disebabkan yang kadang menemukan titik nadirnya pada cerai gugat, runtuhnya rumah tangga dan terlantarnya anak-anak. Berbagai tips yang perlu dikemukakan agar terhindar dari tindakan cerai gugat atau solusi menurut hukum Islam:

1. Perlu selalu diingatkan dalam kehidupan keluarga, bahwa hubungan suami istri adalah hubungan ibadah. Bukan sekedar hubungan cinta-cintaan semata.
2. Perlu dibangun kesamaan, keterusterangan, keterbukaan, antara suami istri mengenai informasi baik keuangan, maupun kemesraan serta keinginan berasama.
3. Jadikanlah shalat jamaah di rumah dan doa sebagai perekat kehidupan suami istri.
4. Kalau terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri, maka lakukanlah diskusi dengan berada antara kedua pasangan.
5. Batasilah persoalan mana yang harus diketahui oleh suami dan istri dan persoalan mana bisa diketahui oleh mertua dan persoalan mana yang bisa diketahui sang anak dan orang lain.
6. Tidak semua persoalan rumah tangga harus diketahui dan diselesaikan oleh keluarga atau orang tua ataupun orang lain. Diperlukan kebijakan suami istri untuk melakukan pembedaan persoalan.
7. Kalau terjadi hal-hal yang seharusnya disampaikan kepada orang tua, maka sampaikanlah dengan santun sebagai anak.
8. Dalam kondisi yang membutuhkan bantuan orang tua, maka orang tua akan mengangkat dua orang dari masing-masing keluarga untuk melakukan investigasi atau pencarian fakta yang dalam istilah agama Islam disebut *hakamain*.
9. Pencarian fakta yang dilakukan *hakamain* harus dilakukan secara hati-hati dan penuh kerahasiaan.
10. *Hakamain*, masih punya upaya untuk mendamaikan kedua pasangan itu.
11. Pihak *hakamain* perlu mencari anggota keluarga yang dipandang bisa memberikan nasehat. Boleh juga meminta pendapat imam desa atau ustadz atau BP4 yaitu badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian.
12. Apapun hasil keputusan dari point 13 ini kiranya dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan cerai gugat.⁷⁹

⁷⁹Hamzah Hasan Khaeriyah, *Membangun Keluarga Sakinah*, h. 118-119

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cerai gugat adalah langkah atau solusi terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, atau salah satunya ketika segala solusi telah gagal dan semua upaya untuk melanjutkan kebahagiaan keluarga menemukan jalan buntu, sehingga penderitaan dalam rumah tangga terjadi. Solusi itu penting agar kebahagiaan perkawinan tetap tegak di tengah-tengah kehidupan manusia. Ketika kebahagiaan rumah tangga antara dua insan tidak dapat dibangun karena ketidakcocokan karakter keduanya, maka masing-masing diberi waktu dan kesempatan agar melakukan sesuatu untuk menciptakan kebahagiaan dengan perkawinan dengan orang lain.

Namun, Islam tidak membolehkannya begitu saja, tetapi membungkusnya dengan hukum-hukum dan batasan-batasan, sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa cerai gugat tidak akan terjadi kecuali dalam beberapa keadaan yang sangat terpaksa. Oleh karena itu, cerai gugat bisa menjadi media untuk mewujudkan kebaikan universal dan kebaikan keluarga itu sendiri. Batasan-batasan dan hukum terpenting yang digariskan Islam untuk menciptakan tujuan puncak ini dapat dikembalikan pada beberapa masalah yaitu Islam *mengcover* ikatan pernikahan dengan *setting* kesucian, dan membungkusnya dengan keagungan, sesuatu yang membedakannya dari semua ikatan. Ia begitu luhur jika dibandingkan ikatan-ikatan yang dibuat manusia, berkaitan dengan kehidupan mereka. Islam memosisikannya dalam jiwa sebagai sesuatu yang sakral dan agung. Oleh Karena itu, Al-Qur'an menyifatinya dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada ikatan yang lain, ketika ia menyebutnya sebagai perjanjian yang kuat, bahkan Islam membuat semua orang membenci cerai gugat, dengan menggambarkan sebagai sesuatu yang sangat naif. Menganjurkan umat Islam agar menjauh darinya dengan sekuat tenaga dan sejauh-jauhnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dari pengamatan dan informasi yang penulis peroleh pada masalah cerai gugat dalam perspektif hukum Islam studi kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012 sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dari tahun ke tahun masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peristiwa cerai gugat lebih besar jumlahnya dibandingkan peristiwa cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat yang dilakukan pihak istri menandakan banyak tindakan perselisihan dan pertentangan yang dialami oleh pihak istri, dari keterangan pihak Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone bahwa hampir semua alasan cerai gugat yang dikemukakan oleh pihak penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Setelah diadakan pengecekan langsung di lapangan, di dapati bahwa cerai gugat yang terjadi memang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor diantaranya yaitu suami sangat pencemburu, suami tidak dapat memberi nafkah yang layak, suami suka marah-marah dan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain. Namun dalam satu sisi bahwa faktor ini pun didukung karena kondisi yang “ketidak mampuan” dan “ketidak mauan” dari salah satu pihak baik suami maupun istri yang disebabkan karena adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga diatur dalam pasal 116 Kompilasi hukum Islam.

2. Dampak cerai gugat terhadap pihak yang berperkara adalah berimplikasi kepada istri karena akan mendapat predikat dengan status sebagai janda dan juga akan mengalami gangguan psikologis begitupun dalam hal finansial yang selama perkawinan ditanggung pihak suami akan berubah setelah terjadinya perceraian maka dari itu suami harus memberikan mut'ah(pemberian) terhadap istri, pengaruh kepada suami karena akan mendapat predikat status duda dan merupakan beban moral yang mesti ditanggung dalam hal putusnya perkawinan, berdampak terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan karena akan berpengaruh terhadap beban psikologis, karakter dan gaya hidupnya yang dulunya mempunyai keluarga utuh malah sekarang mempunyai keluarga yang bercerai, mengenai hak asuh anak tetap kepada ibu selama anak itu belum mumayyiz tetapi apabila sudah dewasa maka hak anak untuk menentukan harus ikut bapak atau ibu. Mengenai harta bersama harus dibagi dua secara adil dan merata. Solusi yang baik dalam pemecahan persoalan-persoalan sebelum membesar dan membeku adalah mengikuti sebagian cara yang bisa menghasilkan buah-buah positif dalam meredam bara perselisihan mengembalikan kedua insan pada bingkai kehidupan perkawinan.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat adalah :

1. Akhir-akhir ini kecenderungan perempuan untuk mengajukan cerai lebih tinggi dibandingkan dengan pihak laki-laki. Oleh karena itu, dicarikan solusi melalui ijtihad ulang dalam masalah-masalah hak perempuan yang sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadist dan sumber lainnya berupa Undang-undang. Kiranya

dapat ditemukan suasana baru dalam kedamaian berumah tangga, yang tidak selalu dengan perkecokan dalam rumah tangga, tapi rumah tangga yang bahagia lahir dan batin di dunia dan akhirat kelak.

2. Hendaknya suami istri lebih meningkatkan pengetahuan agama dan memperkokoh keimanan dengan akhlak sehingga menghindarkan keluarga dari perselisihan dan pertengkaran yang berakibat buruk bagi kehidupan keluarga terutama anak.
3. Hakim yang senantiasa memutus perkara berdasarkan pasal 116 dalam Kompilasi hukum Islam yang menunjukkan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan, maka terjadi perceraian. Dapat memaksimalkan lembaga Arbitrase, agar pekerjaan halal yang di benci Allah tersebut dapat dikurangi. Karena cerai gugat sudah sangat memprihatikan bagi umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. IX; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Abd al-Ati, Harismudah. *Family Stucture in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "Keluarga Muslim". Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Abdissalam As Salmy al Damsyiqy, Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz. *Al mulqab bi al Sulthan al Ulama Qawaid al Ahkam Fy Mashaalih al Anaam Alaqa Alaih Thaha Abdul Rauf Said*. Mesir: dar umm al quran, 1991.
- Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, bin Muhammad. *Nailul Authar Juz VII*. t.c; Beirut: Dar al-Jil, 1973.
- Alimuddin, Cerai Gugat dan Implikasinya dalam Masyarakat (Studi Kasus Tahun 2007-2009 di Pengadilan Agama Watansoppeng), Tesis (tidak diterbitkan, 2011)
- Andi Tiham, Muhammad dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Anshori, Abddul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangan Di Indonesia*. Cet.I; Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2008.
- Apeldoorn, L. J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. XXII; Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia "Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya"*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arnus, Muhammad Mahmud. *Tarikh al-Qafha' fi al-Islam*. Kairo: Al-Mathba' al-Misriyah al-Hadisah, 1987.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- ash-Shiddiqy, Hasbi. *al-Islam II*. tc; Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Dagun, S. M. *Psikologi Keluarga*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dard, Abu Sunan Abi Dard. *Juz I*. Beirut: Dar Fikr, t. th.
- Dahlan, Abdul Aziz et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam Buku V*. Cet. 1; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh jilid II*. Cet. II; Jakarta: Dektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Departemen Agama, 1984.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *The Indonesia Marriage Law*. Jakarta: Biro Konsultasi Perkawinan, 1988.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. tc; Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1993/1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi III. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh Jilid III*. Cet. II; Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama / IAN Jakarta, 1984.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Effendi, Satria. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004.
- ER, Penis Loyo akibat Curiga Istri Selingkuh, Kompas. Com, Rabu 4 Juni 2008.
- Faisal, Sanapiah *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Fauzan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2005.
- Habsul, Wannimaq. *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994.
- al-Haddad, Tahir. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* terj. M. Adib Bisri. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Cet. II; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* terj. buku aslinya *Al-Khilafat al-Zaujiyyah* oleh Nor Hasanuddin. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

- Ibn 'A'is, Muhammad Ibn Musa Ibn al-Dahak al-Tarmisi>Abu 'A'is. *Sunan Tarmizi* (Cet. II: t.t.:Dar Fikr, 1998 M.
- Indra, Hasbi et al, *Potret Wanita Shalehah*. Cet. III; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. V; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Jauziyah, Ibn Qoyyim. *Fatwa-Fatwa Rasulullah*. Cet. I; Kairo: Maktabatul Qur'an, 2000.
- Jaziriy, Abd. Al-Rahman. *Kitab al-Fiqhu'ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz IV*. Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al Kubra, 1969.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Syaamil Cipta media, 2010.
- Khaeriyah, Hamzah Hasan. *Membangun Keluarga Sakinah*. Cet. I; Jakarta: Mazhab Ciputat, 2011.
- Kuzari, Ahmad. *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Latif, Syaerifuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia buku 2*. Cet. I; Jakarta: CV. Berkah Utami, 2010.
- Lihat Mimbar Hukum No. 63 Tahun XV (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA, 2004), h. 3-4 .
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: Inis, 1998.
- Madkour, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wajiz*. t. p., t.th.
- Mahkamah Agung RI Tahun 1992, Perihal Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum Peradilan Agama.
- Majelis Hakim, Pengadilan Agama Watampone, Keputusan Nomor 0014/Pdt G/2011/PA.Wtp.
- , Pengadilan Agama Watampone, Keputusan Nomor 0107/Pdt G/2011/PA.Wtp.
- , Pengadilan Agama Watampone, Keputusan Nomor 0195/Pdt G/2011/PA.Wtp.
- , Pengadilan Agama Watampone, Keputusan Nomor 0651/Pdt G/2010/PA.Wtp.
- , Pengadilan Agama Watampone, Keputusan Nomor 0658/Pdt G/2010/PA.Wtp.

- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Mandzur, Ibnu. *Lisat al-‘Arab*. tc; Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- al-Marighi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Marighi Jus 28* terj. Bahrin Abubakar, dengan judul "Tafsir Marighi". Cet. I; Semarang:CV. Toha Putra, 1987.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Syariat Islam “Menenal Jati Diri Manusia”*. Cet. I; Jakarta: Mihrab, 2004.
- Muhammad, Syaikh al-‘Allamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fiqih Empat Mazhab terj. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*. Cet. II; Jeddah: al-Haramain li ath-Thiba’ah wa an-Nasya wa at-Tawzi, 2004/1424.
- Muhktar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata “Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah Di Indonesia lengkap dengan Contoh Blanko Perkara*. Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Munandar, S. *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia Suatu Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Nasution, S. *Metode Research “Penelitian Ilmiah”*. Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- , *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Taristo, 1998.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, Putusan Nomor 0195/Pdt G/2011/PA.Wtp.
- Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada Tahun 2012.

- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab r.a. diterjemahkan M. Abdul Mujieb AS*. Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- al-Qurthubi, Abdullah Muhammad Bin Farj al-Maliki. *Aqdliyat Rasulallah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*. Cet. I; Beirut: Darul Qolam, 2000.
- Rahim, Abdul. *The Principles Muhammad Jurisprudence*. London: Luzac & Co, 1991.
- Rasyid, Harun. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- S. Suriasumantri, Jujun. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma keberagamaan" dan M. Deden Ridwan, et. al., *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu*. Bandung: Nuansa, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Cet. I; Depok: Elsas, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Jilid I*. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1980.
- Su'adah. *Sosisolgi Keluarga*. Cet. I; Bandung: Universitas Muhammadiyah, 2003
- Subiyanto. P. *Membahagiakan Pasangan "Kiat mengembangkan dan Memperdalam Relasi Suami Istri"*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sudarto, Wirawan. *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai*. Jurnal Ilmiah Psikologi; ARKHE, Vol 10 No. 1, 2001
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- , *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosda-karya, 2001.
- Supriatna dkk. *Fiqh Munakahat II*. Cet. I; Yogyakarta, 2009.
- Syaltut, Mahmoud. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. terjemahan Ismuha tc. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.

Tim Redaksi, *Mimbar Hukum* No. 30 Thn. VIII 1997, Edisi Januari-Februari. Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1997.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49.

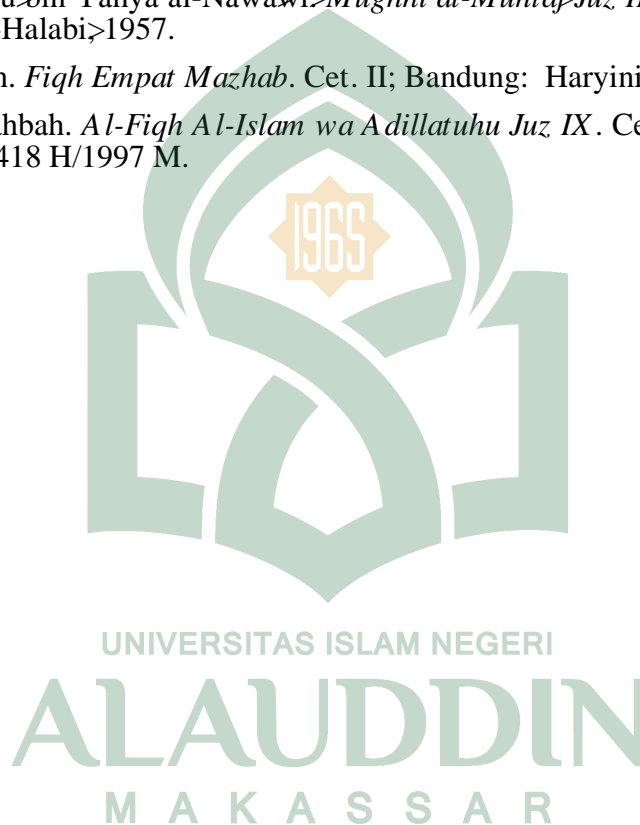
Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 amandemen Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Zakariyya, Abu bin Yahya al-Nawawi>*Mughni al-Muhtaj>Juz II* . Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi>1957.

Zaki, Abdullah. *Fiqh Empat Mazhab*. Cet. II; Bandung: Haryini, 2004.

al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu Juz IX* . Cet. X; Damaskus: Dar Fikr, 1418 H/1997 M.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,¹ yang tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata/informasi dan perilaku, dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti yang lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisa tentang cerai gugat dalam perspektif hukum Islam yang mencakup, faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat, dampak cerai gugat dan solusinya menurut hukum Islam.

Penelitian tesis ini dikategorikan sebagai studi kasus (*case study*).² Studi kasus terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial atau perilaku masyarakat di Kabupaten Bone dalam hal perceraian.

¹Penelitian Kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Taristo, 1998), h. 5. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

²Case study adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok manusia, lingkungan hidup tertentu atau lembaga sosial seperti perkawinan dan perceraian. Selanjutnya lihat S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 27.

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.

Penelitian deskriptif ini, dilakukan dengan berusaha mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang ada, artinya mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dengan variabel yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data-data konkret tentang putusan perkara-perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Jadi penelitian kualitatif dirancang agar mendapat suatu perspektif baru atau menelaah secara mendalam terhadap suatu persoalan dan hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap teori, sedang fenomena yang diangkat menjadi bahan untuk mengembangkan atau menyusun suatu teori baru.

1. Lokasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone. Pemilihan lokasi ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa belum pernah ada penelitian mengenai pelaksanaan cerai gugat, baik atas inisiatif istri maupun inisiatif suami.

Alasan lain penulis memilih lokasi tersebut karena merupakan salah satu lingkungan peradilan dalam kekuasaan kehakiman yang menangani perkara perceraian dan memduduki salah satu rangking tertinggi mengenai perkara cerai gugat yang berada di Sulawesi Selatan.

Adapun kasus perkara yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus-kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone pada tahun 2010-2012.

2. Pendekatan Penelitian

Objek kajian tesis ini adalah cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidisipliner karena sangat terkait dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, adapun pendekatan keilmuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis, teologi normatif dan sosiologis. Ketiga pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan.

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis atau perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menelaah semua undang-undang yang terkait dengan pembahasan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang atau ketetapan lain yang terkait.

2. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis yang digunakan mengacu pada keyakinan terhadap acara agama, loyalitas terhadap mazhab sendiri, komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif.³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami landasan teologis normatif para pihak yang berpakara dan para hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian yang seharusnya diselesaikan dengan cerai gugat.

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 28.

3. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.⁴ Dengan menggunakan pendekatan sosiologis akan ditemukan jawaban mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive*, dan bersifat *snowball sampling*.⁵ Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Maksud kedua dari *sampling* adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul, jadi pada penelitian kualitatif

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

⁵*Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54. Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi *sampling* tergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseorangan itu sudah ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan kronologis dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya. Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 225. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama menjadi besar. Penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).⁶ Teknik snowing sampling dilakukan karena dari jumlah sumber data yang terbatas tersebut belum mampu memberikan data yang konkrit dan lengkap, maka penulis mencari informan yang dapat memberikan data yang menguatkan hasil penelitian (mengetahui secara jelas data yang diinginkan).

Penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan tesis ini tentang proses penyelesaian perkara cerai gugat. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data adalah data yang diperoleh dari data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada institusi Pengadilan Agama Watampone. Lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Hakim Pengadilan Agama Watampone
- b) Panitera
- c) Pegawai Pengadilan Agama dan
- d) Para pihak yang berperkara

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer, seperti buku-buku yang terkait tentang cerai gugat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, baik berupa kitab fikih, Undang-undang, dan berbagai penelitian yang terkait dengan penelitian serta menelaah dokumen resmi Pengadilan Agama seperti berita acara perkara dan hasil-hasil putusan (hakim) Pengadilan Agama terkait kasus yang diteliti.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 224.

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk membangun pemahaman terhadap fenomena kompleks yang diteliti dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya peningkatan kualitas data, memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu menggambarkan secara kompleksitas.⁷ Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan ekspresi dari pengalaman objek yang meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, juga data-data sekunder yang diperoleh dari informan tambahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁸ Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu digunakan untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi bagi masyarakat pencari keadilan khususnya mengenai perempuan yang meminta cerai kepada suaminya menurut tinjauan hukum Islam di Kabupaten Bone dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

⁷M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 733.

⁸M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.⁹ Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interviu adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.¹⁰

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semiterstruktur,¹¹ yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas kondisi terkini mengenai kasus perkara cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Bone.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri, putusan, register pengadilan atau berita acara persidangan. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah (varia peradilan, mimbar hukum,

⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138.

¹¹Wawancara semiterstruktur termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat: *Idem, Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 73-74.

suara buldilag), buletin, foto-foto, rekaman pembicaraan, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa. Data dokumentasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan Pengadilan Agama Watampone.

d. Penelusuran Referensi

Penelusuran referensi ini dilakukan untuk menemukan landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, sekaligus merupakan inspirasi untuk melaksanakan penelitian di lapangan. Informasi yang ditemukan melalui penelusuran berbagai referensi sangat membantu mengarahkan penelitian ini.

Oleh karena jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan dikumpul melalui dokumentasi putusan Pengadilan Agama dibaca serta dicermati hasil putusan tersebut dengan memperhatikan landasan teori yang dikembangkan.

Dengan demikian pengumpulan data ini mengacu pada 3 (tiga) metode pengumpulan data yaitu:

1. Metode pengumpulan data dengan jalan mencatat seluruh elemen yang menjadi objek penyelidikan,
2. Metode pengumpulan data dengan cara mencatat sebagian kecil putusan atau dengan perkataan lain mencatat sampel putusan saja.
3. Metode pengumpulan data dengan jalan mengambil beberapa putusan, kemudian masing-masing putusan diselidiki secara mendalam.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah

“jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.¹²

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handphone yang memiliki aplikasi rekaman. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handphone digunakan untuk merekam pembicaraan selama wawancara berlangsung. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Didasarkan atas asumsi awal tentang pelaksanaan cerai gugat dalam perspektif hukum Islam, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang

¹²M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.

peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang cerai gugat, kemudian mengkaji dan menganalisis ketentuan cerai gugat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang berkaitan dengan inisiatif, prosedur, atau alasan pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan jenis-jenis perceraian di Pengadilan Agama dan secara khusus, mengenai peraturan tentang pelaksanaan cerai gugat. Selanjutnya peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan tentang bentuk perceraian dan pelaksanaan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.

Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar atau ulama khususnya pakar hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum umum). Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³ pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan.

¹³Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h. 103.

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁴

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai proses penyelesaian perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Watampone, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁵

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone sesuai dengan

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

¹⁵Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda-karya, 2001), h. 194.

fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan perkara cerai gugat dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Bone dalam bentuk teks naratif.

Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui proses penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone dalam perspektif hukum Islam. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.¹⁶ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁷

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei

¹⁶Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99.

(orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

7. *Pengujian Keabsahan Data*

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu proses penyelesaian perkara cerai gugat pada tahun 2010-2012 di Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

Pedoman wawancara untuk Pejabat Pengadilan Agama Watampone

1. Bagaimana profil dan keadaan kantor Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone?

.....

.....

.....

2. Apa penyebab terjadinya cerai gugat di Kabupaten Bone semakin meningkat dari tahun ke tahun ?

.....

.....

.....

.....

3. Implikasi apa yang timbul setelah terjadinya cerai gugat di kabupaten bone ?

.....

.....

.....

4. Bagaimana peranan Pengadilan Agama Watampone dalam menangani kasus cerai gugat di Kabupaten Bone ?

.....

.....

.....

Lampiran II

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami ?

.....

.....

.....

.....

2. Apakah permasalahan rumah tangga saudara tidak bisa lagi diperbaiki ?

.....

.....

.....

3. Bagaimana menurut saudara upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone di dalam menyelesaikan kasus saudara ?

.....

.....

.....

4. Bagaimana cara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

.....

.....

.....



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA / INTERVIEW

I. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

II. Riwayat Pendidikan

1. SD :

2. SMP :

3. SMA :

4. Perguruan Tinggi :

III. Daftar Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Watampone

1. Bagaimana profil dan keadaan Kantor Pengadilan Agama Watampone ?

.....

.....

.....

.....

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone? mengapa cerai gugat lebih banyak dibandingkan cerai talak ?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Apakah bapak/ibu biasa menyelesaikan perkara cerai gugat dengan metode sendiri atau ijtihad sendiri ?

-
-
-
4. Dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya cerai gugat apa bapak/ ibu biasa menemukan kasus sulit untuk diselesaikan?

-
-
-
-
-
-
5. Bagaimana upaya bapak/ibu hakim dalam mendamaikan kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone ?

-
-
-
-
6. Apa ada langkah-langkah prelitigasi Pengadilan Agama Watampone untuk menekan jumlah perkara cerai gugat yang semakin tahun semakin meningkat?

-
-
-
-
7. Apakah upaya perdamaian kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone tetap berdasarkan pada hukum materil atau merujuk pada kitab-kitab fikih?

.....

.....

.....
.....

8. Bagaimana relevansinya antara hukum materil dan hukum fikih Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama ?

.....
.....
.....
.....

9. Apakah perkawinan yang tak pernah rukun, karena istri lari dari suami /Impoten, padahal telah menerima banyak mahar, atau selainnya lalu si istri mengajukan gugatan cerai biasa (bukan secara *khuluk* atau tidak mau mengajukan *khuluk*), bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kasus seperti ini? Apakah talak *khuluk* perlu diterapkan dalam kasus tertentu ?

.....
.....
.....
.....
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

10. Apa yang menjadi ukuran bapak/ibu terhadap jumlah *iwad* (tebusan) yang dibayar oleh pihak istri ? (sesuai perdamaian, sesuai ukuran mahar, sesuai keputusan/keadilan atau sesuai dengan kerugian suami).

.....
.....
.....
.....

11. Bagaimana dampak cerai gugat terhadap pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Watampone ? jelaskan solusinya menurut hukum Islam ?

.....

.....

.....

.....

Watampone, 3 Maret 2014

Responden

(.....)



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Usman, SH., M.H.
Nip : 19650504.199203.1.003
Pangkat/Gol : IV/b
Jabatan : Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Alamat : Jl. Laksama Yos. Sudarso Watampone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Darliana
Nim : 80100212021
Alamat : Jalan Manuruki XI Nomor 3 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, dengan judul Tesis **“Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Watampone, 10 Maret 2014
Wakil Hakim Pengadilan Agama Wtp

(Drs. Usman, SH., M.H)

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Ahmad Jakar, M. H.
Nip : 150253759
Pangkat/Gol : IV/b
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Alamat : Jl. Laksama Yos. Sudarso Watampone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Darliana
Nim : 80100212021
Alamat : Jalan Manuruki XI Nomor 3 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, dengan judul Tesis **“Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Watampone, 5 Maret 2014

Hakim Pengadilan Agama Wtp

(Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. Heriyah, SH., M. H.
Pangkat/Gol : IV/b
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Alamat : Jl. Sungai Limboto Watampone

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Darliana
Nim : 80100212021
Alamat : Jalan Manuruki XI Nomor 3 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone, dengan judul Tesis **“Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Watampone, 10 Maret 2014
Hakim Pengadilan Agama Wtp

(Dra. Hj. Heriyah, SH., M. H.)

DAFTAR PERTANYAAN
WAWANCARA /INTERVIEW

I. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

II. Riwayat Pendidikan

1. SD :
2. SMP :
3. SMA :
4. Perguruan Tinggi :

III. Daftar Pertanyaan Untuk Penggugat/ Pihak yang berperkara

1. Apakah yang melatar belakangi saudara melakukan cerai gugat terhadap suami?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Apakah permasalahan rumah tangga saudara tidak bisa lagi diperbaiki?

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

3. Bagaimana menurut saudara upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Watampone di dalam menyelesaikan kasus saudara ?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana cara penyelesaian harta bersama dan hak penguasaan anak setelah terjadinya perceraian ?

.....
.....

.....
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
.....

Watampone, 3 Maret 2014

Responden

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

No	Nama Responden	Umur	Pend	Alamat	Tanda Tangan
1.	Saninah	23	SD	Awangpone	1.
2.	Nanni	28	SD	Watampone	2.
3.	Liah Evayanti	38	SMA	Lamuru	3.
4.	Gusti	20	SD	Bone	4.
5.	Sitti Halijah	27	SMP	Bone	5.
6.	Masiati	30	SD	Uloe	6.
7.	Darmayanti	31	SMP	Bone	7.
8.	Hasnah	27	SD	Tokaseng	8.
9.	Nur Foisiah Nur	30	S1	Bone	9.
10.	Rina	25	SD	Bajoe	10.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

No	Nama Informan	Umur	Pend	Alamat	Tanda Tangan
1.	Lili Adriyani	24	SMA	Apala	1.
2.	Nirmala Sari	25	S1	Bone	2.
3.	Yammase	38	SD	Barebbo	3.
4.	Asmira	30	SD	Bone	4.
5.	Fatmawati	29	SMA	Bone	5.
6.	Rosnah	18	SMA	Waji	6.
7.	Dahliah	33	S1	Bone	7.
8.	Nurmasyita	26	SMA	Bone	8.
9.	Suriani	20	SMP	Lonrae	9.
10.	Rosdianti	27	S1	Bone	10.
11.	Anita Volianawati	38	SMA	Bone	11.
12.	Yemmi	35	SMA	Bone	12.
13.	Asia Wahe	32	SMP	Bone	13.
14.	Hasrianti	38	SMA	Bone	14.
15.	W. Widiyati	37	SMP	Bone	15.
16.	Herdiyanti Maya	23	SMA	Bone	16.
17.	Wirdaningsi	37	SMA	Bone	17.

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR INFORMAN

DAFTAR INFORMAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Umur	Pend	Alamat	Tanda Tangan
1.	Muh. Idris	29	SMA	Watampone	1.
2.	Hamsa	29	SD	Bone	2.
3.	Andi Fadli	28	SMA	Watampone	3.
4.	Muhammad Ali	23	SD	Bone	4.
5.	Asdar Bakri	27	SMP	Bone	5.
6.	Rusdi Jafar	30	S1	Bone	6.
7.	Muh. Junaide	31	SMP	Macanang	7.
8.	Ahmad Bakhtiar	27	SD	Bone	8.
9.	Burhanuddin	30	SMA	Bone	9.
10.	Asmar	25	SD	Bone	10.

**DOKUMENTASI/VISUALISASI
WAWANCARA**



Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Ruang Sidang Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Ruang Tunggu Persidangan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Ruang Permohonan Gugatan



Ruang Meja 1 Panitia



Ruang Siadpa (Pengambilan Data)



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Wawancara dengan salah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama



Foto bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Darliana Jamaluddin, dilahirkan di Watampone 25 tahun yang lalu tepatnya tanggal 25 Oktober 1988. Ia lahir sebagai anak keempat dari empat bersaudara Hj. Kasmi Jamaluddin (kakak Sulung), Hj. Etha Jayanti (kakak) dan Murni Jamaluddin (kakak) dari pasangan suami istri H. Jamaluddin dan Hj. Daming. Tinggal di BTN. Dewi Karmila Sartika Blok A1 Nomor 3 Watampone. kontak person dapat dilakukan melalui HP. 085398761779/081355423448.

Pendidikan di Mulai dari tingkat SD, pada tahun 1994-2000 di SD 405 Mattungengkeng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, kemudian melanjutkan di SLTP Negeri 1 Pitumpanua Kabupaten Wajo tahun 2000-2003. Selanjutnya menempuh pendidikan SMA Negeri 1 Pitumpanua Kabupaten Wajo, tahun 2003-2006. Setelah tamat di SMA dan melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan (S1) pada jurusan Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Watampone (STAIN Watampone), tahun 2006-2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2012 sampai sekarang dengan konsentrasi Hukum Islam/Syariah.